



LAPORAN PENYELENGGARAAN **PEMERINTAHAN DAERAH**

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

TAHUN 2024

LPPD

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL.....iv

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang.....1

1.1.1 Penjelasan Umum 1

 a. Undang-Undang Pembentukan Daerah 1

 b. Data Geografis Wilayah 4

 c. Demografi.....16

 1) Jumlah Penduduk 16

 2) Penduduk Struktur Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia 16

 3) Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan 17

 4) Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 18

 5) Pertumbuhan Penduduk 19

 d. Jumlah Kecamatan dan Desa Kelurahan 21

 e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Daerah dan Pegawai
 Pemerintah.....22

 f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 26

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 31

 a. Permasalahan Pemerintah Daerah 31

 b. Visi dan Misi Kepala Daerah 38

 c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan
 Jangka Menengah.....43

 d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan
 Tahunan 49

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal 60

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 72

2.1 Capaian Kinerja Makro 72

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 73

2.1.2 PDRB Per Kapita.....73

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 74

2.1.4 Angka Kemiskinan.....77

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia 79

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....85

2.2.1 Indikator Kinerja Outcome 85

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 109

2.3.1 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 109

2.3.2 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	112
2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	113
2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	116
2.3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	125
2.3.6 Analisi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai.....	133
2.3.7 Analisi Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.....	137
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	140
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah/Kabupaten Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.....	140
3.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang di Terima dari Pemerintah Tingkat Atasnya	140
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Oleh Daerah/Kabupaten Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.....	143
3.2.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang di Terima dari Pemerintah Tingkat Atasnya	143
3.3 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah/kabupaten Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.....	146
3.3.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang di Terima dari Pemerintah Tingkat Atasnya	146
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL...150	
4.1 Urusan Pendidikan.....	150
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	150
4.1.2 Target Pencapaian SPM	150
4.1.3 Alokasi Anggaran	151
4.1.4 Dukungan Personil	152
4.1.5 Hasil Capaian	152
4.1.6 Permasalahan dan Solusi.....	155
4.2 Urusan Kesehatan	158
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	158
4.2.2 Target Pencapaian SPM	158
4.2.3 Alokasi Anggaran	160
4.2.4 Dukungan Personil	161

4.2.5 Hasil Capaian	161
4.2.6 Permasalahan dan Solusi.....	174
4.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	176
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	176
4.3.2 Target Pencapaian SPM	177
4.3.3 Alokasi Anggaran	177
4.3.4 Dukungan Personil	178
4.3.5 Hasil Capaian	179
4.3.6 Permasalahan dan Solusi.....	181
4.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	182
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	182
4.4.2 Target Pencapaian SPM	182
4.4.3 Alokasi Anggaran	183
4.4.4 Dukungan Personil	183
4.4.5 Hasil Capaian	184
4.4.6 Permasalahan dan Solusi.....	186
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	187
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	187
4.5.2 Target Pencapaian SPM	187
4.5.3 Alokasi Anggaran	188
4.5.4 Dukungan Personil	189
4.5.5 Hasil Capaian.....	191
4.5.6 Permasalahan dan Solusi.....	197
4.6 Urusan Sosial.....	199
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	199
4.6.2 Target Pencapaian SPM	199
4.6.3 Alokasi Anggaran	200
4.6.4 Dukungan Personil	201
4.6.5 Hasil Capaian	201
4.6.6 Permasalahan dan Solusi.....	213
4.7 Program dan Kegiatan	214
BAB V PENUTUP	245

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Senantiasa Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Lpaoran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyampaian laporan ini sebagai perwujudan pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efeisien sesuai (*good governance*), sehingga bagi pemerintah pusat laporan penyelenggara pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, merupakan Implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Secara garis besar LPPD Tahun 2024 memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan), capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, dan laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tentunya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah tidak terlepas dari adanya kendala , namun demikian dengan semangat dan adanya dukungan dari seluruh komponen maka penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilaksanakan sebagai mana yang diharapkan.

Kami menyadari bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala saran, pendapat maupun kritik dari semua pihak terutama dari pihak pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk lebih mempertajam efisiensi pelaksanaan tugas kami kedepan.

Kepada seluruh pihak yang telah membantu dan Tim Penyusun LPPD yang secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian laporan ini kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga segala upaya demi membangun Bumi LALLA TASSISARA senantiasa di Ridhoi oleh ALLAH SWT.

Tobadak, 24 Maret 2025

BUPATI MAMUJU TENGAH



Dr. H. ARSAL ARAS, SE., M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Mamuju Tengah merupakan Daerah Otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah dimaksudkan untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Barat pada umumnya dan Kabupaten Mamuju pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, berdasarkan ketentuan pasal 69 dan 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 ini mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukumnya, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 tahun 2017, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1789);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Komisi pemberantasan tindak pidana Korupsi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5344);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1312);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju Tengah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025;
20. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

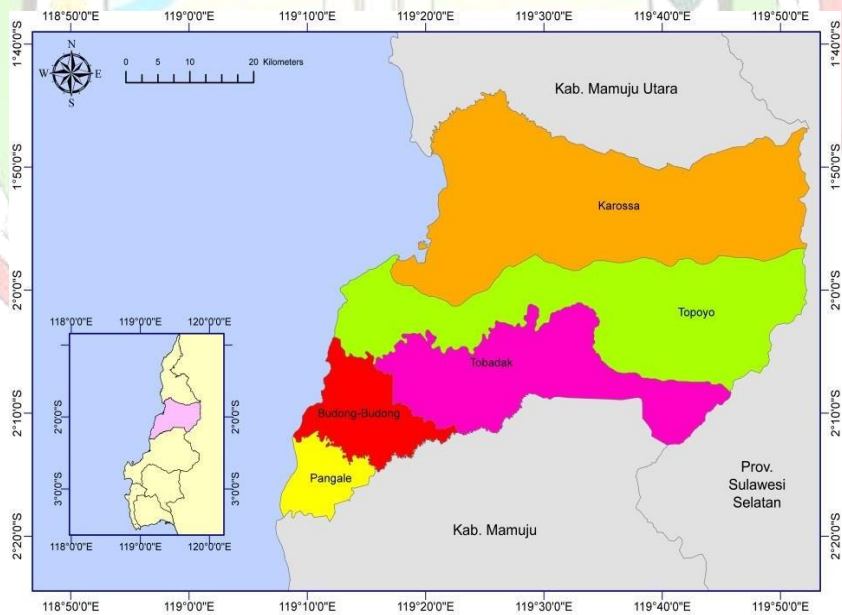
21. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Mamuju Tengah berada dalam wilayah administratif Provinsi Sulawesi Barat, terletak di antara ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, dan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Melihat kondisi geografis Kabupaten Mamuju Tengah, potensi utama yang dimiliki bersumber dari bidang pertanian dan perkebunan, dengan memberikan posisi cukup strategis bagi pengembangan perekonomian dan pembangunan.

Secara Geografis Kabupaten Mamuju Tengah terletak pada Bagian Barat Pulau Sulawesi dan berposisi pada bentangan Selat Makassar, yakni 1^o47'82"- 2^o17'31" Lintang Selatan, 119^o08'13"-119^o24'08" Bujur Timur. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Karossa dengan luas 1.175,38 km² atau 37,90 persen dari luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Sementara, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Pangale dengan luas 91,11 km² atau 2,94 persen.

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Mamuju Tengah



1) Batas Administrasi Daerah:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat, Pasal 5 ayat (1) Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Benggaulu Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu;
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Batu Bicara, Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah;
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Karama dan Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju; dan
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Tabel 1. 1
Batas Wilayah Administrasi per Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah

Kecamatan	Batas Wilayah			
	Utara	Selatan	Barat	Timur
Topoyo	Kec. Karossa	Kec. Tobadak	Selat Makassar	Prov. Sulsel dan Sulteng
Budong – Budong	Kec. Topoyo	Kec. Pangale	Selat Makassar	Kab. Mamuju
Tobadak	Kec. Topoyo	Kab. Mamuju	Kec. Budong-Budong	Prov. Sulsel
Pangale	Kec. Budong-Budong	Kab. Mamuju	Selat Makassar	Kab. Mamuju
Karossa	Kab. Pasangkayu	Kec. Topoyo	Selat Makassar	Prov. Sulsel

Sumber: RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, 2017-2037

2) Luas Wilayah

Dalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2017 tentang RTRW Kabupaten Mamuju Tengah 2017-2037 , luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah adalah 3.100,87 km², secara administrasi pemerintahan, terdiri atas 5 Kecamatan, 54 Desa, dan 2 (UPT) Unit Pemukiman Transmigrasi), namun pada tahun 2018 bertambah 1 (UPT) Unit Pemukiman Transmigrasi Saluandeang di Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak. Ibukota kabupaten terletak di wilayah Benteng Kayu Mangiwang Kecamatan Tobadak. Berdasarkan orbitasi, kecamatan yang letaknya terjauh dari ibukota kabupaten adalah ibukota Kecamatan Karossa (Karossa) yaitu sejauh 45 Km, dan ibukota kecamatan yang terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Budong-Budong yang berbatasan langsung dengan Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah. Berikut tabel wilayah administrasi dan luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, seperti

pada tabel berikut:

Tabel 1. 2
Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Per Desa/ UPT
Kabupaten Mamuju Tengah

No.	Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	Kecamatan	
			Luas (Ha)	%
1	2	3	4	5
1	Tobadak	1. Sulobaja	1.556,25	2,22
		2. Bambadaru	1.883,52	2,69
		3. Batu Parigi	21.634,24	30,91
		4. Palongan	2.790,60	3,99
		5. Mahahe	559,94	0,8
		6. Tobadak	7.036,96	10,05
		7. Salo Adak	5.702,06	8,15
		8. Sejati	28.827,80	41,19
		Kecamatan Tobadak	69.991,37	22,57
2	Pangale	1. Pangale	1.230,86	13,51
		2. Sartanamaju	912,4	10,01
		3. Polo Pangale	874,69	14,58
		4. Kuo	453,86	6,34
		5. Polo Lereng	1.230,06	13,5
		6. Polo Camba	1.795,13	19,7
		7. Lamba Lamba	1.177,25	12,92
		8. Kombiling	858,87	9,43
		9. Lemo Lemo	577,56	6,34
		Kecamatan Pangale	9.110,67	2,94
3	Budong-Budong	1. Lumu	1.424,94	5,71
		2. Tinali	429,23	1,72
		3. Salumanurung	1.004,83	4,02
		4. Kire	2.514,34	10,07
		5. Salogatta	1.619,03	6,48
		6. Pontanakayang	3.190,80	12,78
		7. Babana	4.117,32	16,49
		8. Pasappa	1.728,67	6,92
		9. Bojo	3.289,01	13,17
		10. Barakkang	4.135,40	16,56
		11. Lembah Hada	1.513,74	6,06
		Kec. Budong Budong	24.967,31	8,05
4	Topoyo	1. Budong Budong	1.769,62	2
		2. Paraili	620,2	0,7
		3. Topoyo	833,9	0,94
		4. Kabubu	388,88	0,44
		5. Waeputeh	787,49	0,89
		6. Tappilina	732,04	0,83
		7. Tangkou	338,04	0,38
		8. Tabolang	4.141,75	4,68
		9. Salupangkang	1.092,80	1,24
		10. Salupangkang IV	1.091,16	1,23

No.	Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan	Kecamatan	
			Luas (Ha)	%
1	2	3	4	5
		11.Tumbu	1.671,62	1,89
		12.Bambamanurung	476,03	0,54
		13. Pangalloang	1.414,53	1,6
		14. Sinabatta	1.794,58	2,03
		15. Salulekbo	71.327,33	80,61
		Kecamatan Topoyo	88.479,97	28,53
5	Karossa	1. Kambunong	16.942,40	14,41
		2. Tasokko	21.188,97	18,03
		3. Lara	10.222,32	8,7
		4. Karossa	32.860,37	27,96
		5. Lembah Hopo	2.149,64	1,83
		6. UPT Lara III	1.270,46	1,08
		7. Banggaulu	1.420,77	1,21
		8. UPT Mora IV	666,1	0,57
		9. Kayu Calla	964,12	0,82
		10. Kadaila	1.734,29	1,48
		11. Sukamaju	8.948,36	7,61
		12. Salubiru	13.228,86	11,26
		13. Sanjango	5.940,94	5,05
			Kecamatan Karossa	117.537,60
KAB. MAMUJU TENGAH			310.086,92	100

Sumber : RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, 2017-2037
Keterangan: UPT= Unit Pemukiman Transmigrasi, 2 UPT

Besaran luas wilayah di atas kemungkinan akan mengalami koreksi dengan mengikuti kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, serta Kebijakan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta yang termuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021.

3) Topografis

a) Kemiringan Lahan

Bagian wilayah dengan kemiringan lereng antara 0–2 persen seluas 95.734,54 ha (30,87%); 2-5 persen seluas 59.111,39 ha (19,06%); 8-15 persen seluas 58.409,61 ha (18,83%); 15 – 25 persen seluas 50.621,64 (16,32%) ha; 25-40 persen seluas 32.795,09 ha (10,57%) dan besar dari 40 persen seluas 13.414,47 ha (4,37%). Luas terbesar terdapat di wilayah Kecamatan Budong-Budong, yakni 21.928,51 ha. Sedangkan untuk kemiringan lereng antara di atas 40 persen terluas terdapat di Kecamatan

Karossa seluas 5.092 ha. Jika dicermati konfigurasi wilayah Kabupaten Mamuju Tengah menurut kemiringan lereng, maka bagian wilayah yang termasuk datar adalah bagian sebelah barat yang berbatasan dengan Selat Makassar. Sebaliknya, semakin ke Timur secara gradual juga tingkat kemiringan ini semakin tinggi dengan kondisi lahan yang bergelombang dan berbukit.

b) Ketinggian Lahan

Ditinjau dari aspek ketinggian wilayah, Kabupaten Mamuju Tengah dapat dibedakan menjadi 4 (empat) zona masing-masing zona dengan ketinggian antara 0 – 25 m, zona antara 25 m – 100 m, zona dengan ketinggian antara 100 m–500 m, zona dengan ketinggian 500 m – 1.000 m. Secara umum berdasar zona ketinggian di atas menunjukkan bahwa pada Bagian Selatan sebagian besar mempunyai ketinggian di atas 500 m, sedang semakin ke utara ketinggiannya semakin meningkat rata-rata sampai dengan 500 m. Secara proporsional, ketinggian wilayah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Posisi dan Tinggi Wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL)
Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah

No.	Kecamatan	Bujur	Lintang	Tinggi DPL
1	2	3	4	5
1	Topoyo	119 ⁰ 17' 07"	2 ⁰ 04' 05"	0-500
2	Budong – Budong	119 ⁰ 11' 87"	2 ⁰ 04' 66"	0-500
3	Tobadak	119 ⁰ 20'93"	2 ⁰ 05'52"	0-500
4	Pangale	119 ⁰ 08'13"	2 ⁰ 17'31"	0-600
5	Karossa	119 ⁰ 24' 08'	1 ⁰ 47'82"	0-500

Sumber : RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, 2017-2037

4) Geologi

Berdasarkan data geologi Kabupaten Mamuju Tengah, jenis tanah di daerah ini dapat digolongkan 7 (tujuh) jenis, yakni tanah aluvial, aluvial hidromorf, organol; aluvial hodromorf, glei humus; aluvial, aluvial hidromorf, orgonol; latosol; podsolik merah kuning; podsolik merah kuning, litosol, kandungan dari masing-masing jenis tanah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 4
Jenis dan Kandungan Tanah di Kabupaten Mamuju Tengah

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	2	3
1	Aluvial	9.563,35
2	Aluvial Hidromorf, Organol	45.484,54
3	Aluvial Hodromorf, Glei Humus	3.124,25
4	Aluvial, Aluvial, Hidromorf, Organol	2.841,85
5	Latosol	6.751,68
6	Podsolik Merah Kuning	147.109,36
7	Podsolik Merah Kuning, Litosol	73.585,41
Jumlah		288.460,44

Sumber : Data GIS, Profil Sulbar, 2019

Sedang untuk kandungan geologi di Kabupaten Mamuju Tengah secara garis besarnya dibagi menjadi 2 (dua), yakni kelompok bahan galian konstruksi dan kelompok galian industri. Berdasarkan data pada Departemen Pertambangan dan Energi, diketahui bahwa untuk kelompok bahan galian konstruksi meliputi:

- a) Granodiorit, tersebar di daerah Salubiro dan Bulukaling Kecamatan Karossa dengan perkiraan cadangan volume sebesar 58.443.750 meter kubik;
- b) Batu Pasir, tersebar di daerah Kombiling, Salupangkang dan Topoyo Kecamatan Topoyo, di Barakang Pangale, Bajo Kecamatan Pangale, Salumabongi, dengan volume sekitar 630.887.500 meter kubik;
- c) Konglomerat, tersebar di daerah Passapa, Tangkou, Topoyo dan Kecamatan Budong-Budong, dengan volume sekitar 134.475.000 meter kubik.

Sementara untuk kelompok bahan galian industri meliputi:

- a) Batu Sabak,tersebar di daerah Tobinta, Salubejau dan Salubarana Kecamatan Karossa dengan cadangan volume sekitar 22.050.000 meter kubik;
- b) Sekis, tersebar di daerah Tabolang, Kalando Kecamatan Topoyo, dan Batusitanduk Kecamatan Tobadak dengan cadangan volume sekitar 2.200.000 meter kubik;
- c) Batu Gamping, terdapat di daerah Salupangkang Kecamatan Topoyo dengan cadangan volume sekitar 5.625.000 meter kubik;
- d) Lempung, tersebar di daerah Karossa, Benggaulu, Durikumba, Lara,

Salubarana dan Tomemba Kecamatan Karossa dengan cadangan volume sekitar 1.297.575.000 meter kubik.

5) **Penggunaan Lahan**

Jenis penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah didominasi oleh Hutan Lahan Kering Primer dan Hutan Lahan Kering Sekunder, yakni masing-masing mencakup areal seluas 114.557,96 Ha (38,00%) dan 75.047,22 Ha (24,90%). Penggunaan lahan lainnya yang tergolong agak luas adalah Semak Belukar/Alang -alang seluas 53.689,22 Ha (17,81%), tegalan/ladang seluas 28.695,92 Ha (9,52%), dan Perkebunan/kebun seluas 13.692,46 Ha (4,54%). Penggunaan lahan lainnya berupa tambak, sawah, permukiman, hutan mangrove, padang rumput, dan lain-lain.

a) **Kawasan Budidaya**

Kawasan Budidaya terdiri atas :

• **Kawasan Pertanian**

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas Kawasan peruntukan tanaman pangan, adapun data kawasan peruntukan pertanian yang terdapat pada table berikut :

Tabel 1.5
Kawasan peruntukan tanaman pangan Tahun 2024

Jenis Kawasan	Kawasan Tanah Basah	Tanah Basah Kering	Kawasan Tanah Kering
Lahan Sawah			
- Irigasi	763,4		
- Tadah Hujan	4.266,80		
Lahan Pertanian Bukan Sawah			
- Ladang/Huma		16.240	
- Padang Penggembalaan/padang rumput		573	
- Tegal/kebun			14.362
- Perkebunan			478.685
- Ditanami pohon/hutan Rakyat			3.461
Luasan (Ha)	5.030,20	16.813,00	493.047,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah,2024

Kawasan tanah basah di Kabupaten Mamuju Tengah terletak pada lahan

sawah yaitu irigasi seluas kurang lebih 763,4 (tujuh ratus enam puluh tiga koma empat) hektar dan Tadah Hujan kurang lebih 4.266,80 (empat ribu dua ratus enam puluh enam koma delapan puluh) hektar. Sedangkan pada kawasan basah kering yaitu Ladang/huma seluas kurang lebih 16.240 (enam belas ribu dua ratus empat puluh) hektar dan wilayah Padang penggembalaan/padang rumput seluas 573 (lima ratus tujuh puluh tiga). Dan daerah yang kawasan tanah kering yaitu tegal/kebun dengan luas kurang lebih 14.362 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh dua) hektar, kawasan perkebunan dengan wilayah paling luas kurang lebih 478.685 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima) hektar, dan kawasan yang ditanami pohon/hutan rakyat seluas 3.461 (tiga ribu empat ratus enam puluh satu) hektar.

Pemanfaatan tanah yang baik di Kabupaten Mamuju Tengah dengan memanfaatkan sebagai lahan pertanian sehingga menghasilkan produksi tanaman pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Komoditi tanaman pangan yang paling banyak terdapat pada komoditi Padi dengan produksi hasil sebesar 15.823,800 (lima belas ribu delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ton, urutan kedua terdapat pada komoditi jagung sebesar 14.399,8 (empat belas ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan koma delapan) ton dan produksi tanaman yang komoditi paling rendah terdapat pada komoditi tanaman talas sebesar 0 (nol) ton. Adapun Data luas tanam, luas panen, produksi tanaman pangan sebagai berikut:

Tabel 1.6
Data Luas Tanam, Luas Panen, Provitass dan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Mamuju Tengan Tahun 2024

No	Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktifitas Kuintal/ha)
1	Padi	3.613,00	3.249,00	15.823,800	48.70
2	Padi lahan kering	-	-	-	-
3	Jagung	2.698.50	3.026	14.399,8	47,59
4	Kedelai	18,50	38,00	30,40	8,00
5	Ubi Kayu	17,00	34,00	814,50	293,56
6	Ubi Jalar	13,50	19,00	164,16	86,40
7	Kacang Tanah	6,80	9,80	7,15	7,30
8	Kacang Hijau	3,00	16,50	16,05	9,73
9	Talas	0	0	0	0
	2024	6.370,30	6.392,30	31.255,86	48.90

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah 2024 ,diolah 2025

6) Kesehatan

a) Kawasan Rawan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, ada 8 penyakit Menular yang tersebar di Kabupaten Mamuju Tengah yaitu: TBC, (Topoyo, Babana, Tasokko, Tabolang, Salugatta), Malaria (Batuparigi, Tappilina), Gigitan Hewan Penularan Rabies (Topoyo, Batuparigi, Kire), Kusta (Tobadak, Topoyo, Karossa), Diare Akut (Topoyo, Desa Bojo, Babana), Demam Berdarah (Tobadak, Bambadaru, Topoyo), Pneumonia (Topoyo), Tifoid (Pangale dan Polo Pangale) dan ada 2 Penyakit tidak menular yaitu: Diabetes Melitus (Lumu, Babana, Salugatta, Sulobaja, Bambadaru, Polongaan, Mahahe, Tobadak, Batuparigi, Topoyo, Kambunong, Tasokko, Karossa), Hipertensi (Babana, Kire, Lumu, Batuparigi, Topoyo, Salulebo, Tabolang, Salupangkang, Tasokko, Kambunong, Karossa).

Tabel 1.7
Data Sebaran Desa Rawan Penyakit Menular

No	Jenis penyakit	Menular/tidak menular	Desa penyebaran
1	TBC	Menular	Topoyo, Babana, Tasokko, Tabolang, Salugatta
2	Malaria	Menular	Batuparigi, Tappilina
3	Gigitan Hewan Penularan Rabies	Menular	Topoyo, Batuparigi, Kire
4	Kusta	Menular	Tobadak, Topoyo, Karossa
5	Diare Akut	Menular	Topoyo, Desa Bojo, Babana
6	Demam Berdarah	Menular	Tobadak, Bambadaru, Topoyo
7	Pneumonia	Menular	Topoyo
8	Tifoid	Menular	Pangale dan Polo Pangale
9	Diabetes Melitus	Tidak Menular	Lumu, Babana, Salugatta, Sulobaja, Bambadaru, Polongaan, Mahahe, Tobadak, Batuparigi,

			Topoyo, Kambunong, Tasokko, Karossa
10	Hipertensi	Tidak Menular	Babana, Kire, Lumu, Batuparigi, Topoyo, Salulebo, Tabolang, Salupangkang, Tasokko, Kambunong, Karossa

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah 2024, diolah 2025

Dari Tabel 1.7, Adapun Kebijakan dan program yang telah dilaksanakan untuk penanganan **Rawan Penyakit Menular**: Melakukan Skrining pada kelompok berisiko terutama pada penyakit TBC serta Screening pada yang berisiko malaria terutama pada warga yang punya riwayat dari Papua dan Kalimantan, pendampingan kasus, penyelidikan epidemiologi, fooging sarang nyamuk jika ada lonjakan kasus Demam Berdarah tetapi jika kasus Demam Berdarah hanya muncul 1 atau 2 kasus maka akan dilakukan rekomendasi pembersihan/pemberantasan sumber sarang nyamuk, untuk Gigitan Hewan Penularan Rabies melakukan edukasi jika tergigit hewan berupa anjing, kucing dan monyet maka harus segera dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan vaksinasi, pengobatan pada semua kasus yang rawan juga sudah tersedia di Puskesmas.

Sedangkan pada **Penyakit Tidak Menular**: Kegiatan yang dilaksanakan yaitu screening pada usia produktif untuk menjaring penyakit hipertensi dan diabetes mellitus dan selanjutnya dilakukan pemantauan untuk pengobatan serta memberikan edukasi gizi.

7) **Bencana Alam**
a) **Kawasan Rawan Bencana Banjir**

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Mamuju Tengah yaitu: Kecamatan Karossa terdapat 2 Desa dengan potensi sedang, 2 desa di potensi tinggi, Kecamatan Topoyo terdapat 1 Desa dengan potensi sedang dan 4 desa dengan potensi tinggi, Kecamatan Tobadak terdapat 4 Desa dengan potensi tinggi, Kecamatan Budong-Budong terdapat 4 Desa dengan potensi sedang, Kecamatan Pangale terdapat 4 Desa dengan potensi sedang dan 1 Desa dengan potensi tinggi.

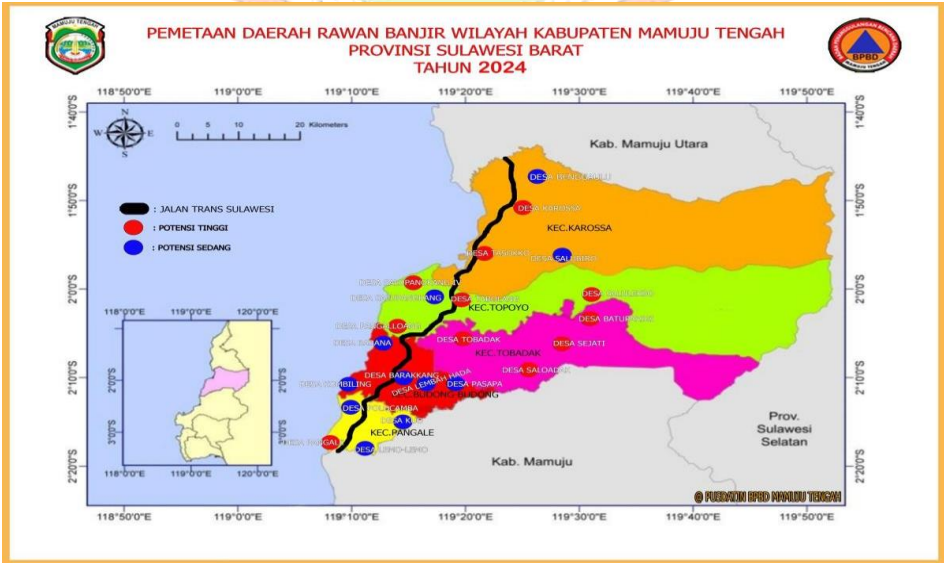
Tabel 1.8
Kawasan Rawan Bencana Banjir Tahun 2024-2025

No	Kecamatan	Desa	Klasifikasi potensi	
			Sedang	Tinggi
1	Karossa	Benggaulu	✓	-
2		Karossa	-	✓
3		Tasokko	-	✓
4		Salubiro	✓	-
5	Topoyo	Salupangkang IV	-	✓
6		Salupangkang	✓	-
7		Tabolang	-	✓
8		Salu Le'bo	-	✓
9		Pangalloang	-	✓
10	Tobadak	Tobadak	-	✓
11		Sejati	-	✓
12		Saloadak	-	✓
13		Batuparigi	-	✓
14	Budong-Budong	Babana	✓	-
15		Barakkang	✓	-
16		Lembah Hada	✓	-
17		Pasapa	✓	-
18	Pangale	Kombiling	✓	-
19		Pangale	-	✓
20		Polocamba	✓	-
21		Kuo	✓	-
22		Lemo-Lemo	✓	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, 2024-2025

Dari tabel 1.8 di atas, kawasan rawan bencana banjir Kabupaten Mamuju Tengah yang terbanyak berpotensi tinggi berada di Kecamatan **Tobadak** dan yang berpotensi sedang berada di Kecamatan **Budong-Budong**.

Gambar 1.2
Pemetaan Daerah Rawan Banjir wilayah
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024



b) Kawasan Rawan Longsor

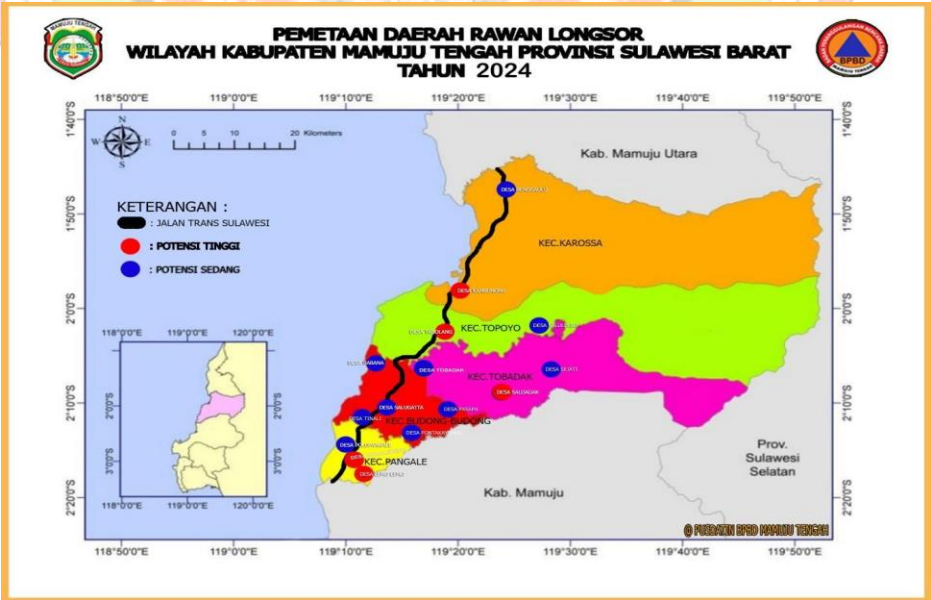
Longsor adalah perpindahan massa tanah, batuan, atau material lainnya ke arah lereng bawah. Longsor merupakan bencana alam yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda dan jiwa. Di Kabupaten Mamuju Tengah, ada 5 Desa yang dikategorikan berpotensi tinggi diantaranya: Kambunong, Tabolang, Saloadak, Lemo-Lemo, Pololerang dan ada 5 desa yang dikategorikan berpotensi sedang diantaranya: Benggaulu, Babana, Salugatta, Tobadak dan Polo Pangale.

Tabel 1.9
Kawasan Rawan Longsor Tahun 2024-2025

NO	KECAMATAN	DESA	KLASIFIKASI POTENSI	
			SEDANG	TINGGI
1	KAROSSA	BENGGAULU	✓	-
2		KAMBUNONG	-	✓
3	TOPOYO	TABOLANG	-	✓
4	BUDONG-BUDONG	BABANA	✓	-
5		SALUGATTA	✓	-
6	TOBADAK	TOBADAK	✓	-
7		SALOADAK	-	✓
8	PANGALE	POLOPANGALE	✓	-
9		LEMO-LEMO	-	✓
10		POLOLERENG	-	✓

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, 2024-2025

Gambar 1.3
Pemetaan Daerah Rawan Longsor Wilayah
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024



c. Demografi

1) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah DKB Semester I 2024 adalah sebanyak 144.810 jiwa terdiri dari laki-laki 74.403 jiwa dan perempuan 70.407 jiwa yang terbagi dalam lima kecamatan. Data jumlah penduduk Kabupaten Mamuju Tengah menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 10
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	L+P
1	2	3	4	5
1	Tobadak	15.597	14.692	30.289
2	Pangale	7.883	7.642	15.525
3	Budong-Budong	15.834	15.025	30.859
4	Topoyo	19.649	18.718	38.367
5	Karossa	15.440	14.330	29.770
	Jumlah	74.403	70.407	144.810

Sumber : Data DKB Semester I Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil data diolah 2025

Dari tabel 1.10 di atas, sebaran penduduk Kabupaten Mamuju Tengah terbanyak terdapat di kecamatan Topoyo sebanyak 38.367 jiwa, dan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Pangale yaitu sebanyak 15.525 jiwa.

2) Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia

Data penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur sangat penting sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan agar pembangunan dapat diarahkan sesuai dengan kebutuhan penduduk meliputi sektor seperti tenaga kerja, pendidikan dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur di suatu wilayah maka kebijakan yang akan diambil untuk pengembangan suatu wilayah lebih tepat dan efisien serta dapat mengetahui berapa penduduk belum produktif (0-14 tahun), penduduk produktif (15-59 tahun) dan penduduk kurang produktif (60 tahun keatas).

Data kependudukan Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 11
Komposisi Penduduk menurut jenis Kelamin dan Struktur Usia di
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

Umur	Mamuju Tengah		
	L	P	Jumlah
1	2	3	4
00-04	6.852	6.348	13.200
05-09	7.480	6.930	14.410
10-14	7.093	6.581	13.674
15-19	7.148	6.527	13.675
20-24	7.026	6.842	13.868
25-29	6.126	6.156	12.282
30-34	5.621	5.787	11.408
35-39	5.166	5.215	10.381
40-44	5.015	4.681	9.696
45-49	4.392	4.231	8.623
50-54	4.011	3.664	7.675
55-59	3.154	2.835	5.989
60-64	2.087	1.820	3.907
65-69	1.370	1.173	2.543
70-74	859	776	1.635
>75	1.003	841	1.844
Jumlah	74.403	70.407	144.810

Sumber : Data DKB Semester I Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Data diolah 2025

Berdasarkan tabel 1.11 di atas, Penduduk Mamuju Tengah paling besar pada rentang umur 20-24 tahun sebanyak 13.868 jiwa dari keseluruhan penduduk. Dan dapat disimpulkan bahwa kelompok penduduk belum produktif umur 0-14 tahun sebanyak 41.284 jiwa, penduduk produktif umur 15-59 tahun sebanyak 93.596 jiwa dan penduduk kurang produktif umur 60 tahun keatas sebanyak 9.929 jiwa. Dimana sebagian besar penduduk Kabupaten Mamuju Tengah berada pada rentang usia produktif 15-59 tahun.

3) Jumlah Penduduk menurut Pekerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga secara ekonomi maupun sosial. Berikut data ketenagakerjaan pada tabel berikut:

Tabel 1. 12
Jumlah Penduduk Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2024

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
Berusaha Sendiri	8.437	5.772	14.209
Berusaha dibantu Buruh tidak tetap/Buruh tidak dibayar	13.810	4.878	18.688
Berusaha dibantu Buruh tetap/Buruh dibayar	673	74	747
Buruh/Karyawan/Pegawai	8.104	5.607	13.711
Pekerja Bebas Pertanian dan non Pertanian	10.697	639	11.336
Pekerja Keluarga/tak dibayar	6.056	5.763	11.819
Jumlah	47.777	22.733	70.510

Sumber : Badan Pusat Statistik Mamuju Tengah 2025

Pekerjaan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah masih banyak masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai buruh karena pendidikan yang dimiliki masih rendah. Dari data di atas terdapat bahwa masyarakat yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar berjumlah lebih besar dibanding yang lain yaitu sebesar 18.688 jiwa.

4) Jumlah Penduduk berdasarkan pendidikan

Muara dari pembangunan adalah meningkatnya kesejahteraan penduduk dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Dimana penduduk merupakan target dari pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan lebih memacu pergerakan roda pembangunan.

Di Kabupaten Mamuju Tengah sebagian penduduknya masih berpendidikan SD ke bawah, hal tersebut dimaklumi karena Mamuju Tengah merupakan daerah pemekaran yang sumber daya manusianya masih sangat terbatas. Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.13
Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan 2024

Uraian	Tobadak	Pangale	Budong-Budong	Topoyo	Karossa	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Belum Sekolah	10.367	5.678	11.522	13.955	11.277	52.799
Belum Tamat SD	2.993	1.686	3.546	4.090	3.537	15.852
Tamat SD	6.839	3.674	6.829	7.923	6.582	31.847
Tamat SMP	3.748	1.864	3.391	4.359	3.440	16.802
Tamat SMA	4.481	1.912	4.188	5.577	3.816	19.974
Tamat D1D2	83	62	89	138	80	452
Tamat D3	391	123	261	459	237	1.471
Tamat S1	1.337	515	992	1.802	775	5.421
Tamat S2	48	11	39	61	24	183
Tamat S3	2	0	2	3	2	9
Jumlah	29.503	15.121	30.341	37.280	28.977	144.810

Sumber : Data DKB Semester I Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil data diolah 2025

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 paling tinggi hanya tamat SD adalah sebesar 31.847 jiwa hal ini membuktikan bahwa tingkat kemauan bersekolah anak masih rendah.

5) **Pertumbuhan Penduduk**

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk setiap tahun akan mengalami pengurangan dan peningkatan yang disebabkan adanya kematian serta kelahiran, berikut adalah data penduduk, laju pertumbuhan penduduk

Tabel 1. 14
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun

Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2020-2024 (%)
1	2	3
Pangale	15,33	NA
Budong-Budong	30,63	NA
Tobadak	29,88	NA
Topoyo	37,9	NA
Karossa	29,53	NA
Mamuju Tengah	143,27	NA

Sumber : Badan Pusat Statistik Mamuju Tengah 2025

Tabel 1. 15
Distribusi Persentase penduduk dan Kepadatan Penduduk 2024
 Data berikut menampilkan Distribusi persentase penduduk di setiap kecamatan serta kepadatan penduduknya.

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	2	3
Pangale	10,70	168
Budong-Budong	21,38	123
Tobadak	20,86	43
Topoyo	26,45	43
Karossa	20,61	25
Mamuju Tengah	100,00	46

Sumber : Badan Pusat Statistik Mamuju Tengah 2025

Persentase penduduk terbesar berada pada Kecamatan Topoyo sebesar 26,45 persen dan persentase penduduk terkecil berada pada Kecamatan Pangale yaitu sebesar 10,70 persen. Sedangkan dari segi kepadatan penduduk dapat dilihat bahwa Kecamatan Pangale adalah kecamatan yang paling padat dengan kepadatan penduduk 168 jiwa per km². Sedangkan Kecamatan yang rendah kepadatan penduduknya yaitu Kecamatan Karossa sebesar 25 jiwa per km².

Tabel 1. 16
Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

Data berikut menampilkan rasio jenis kelamin penduduk menurut kecamatan, sebagai berikut.

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	2
Pangale	102,9
Budong-Budong	105,3
Tobadak	105,7
Topoyo	105,1
Karossa	108,1
Mamuju Tengah	105,7

Sumber : Data DKB Semester I Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil data diolah 2025

Rasio jenis kelamin pada lima kecamatan pada Tahun 2024 mengalami keseimbangan, dengan Kecamatan Karossa mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 108,1.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa Kelurahan

1) Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati termasuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kabupaten Mamuju Tengah, memiliki 5 kecamatan, yaitu :

- a) Kecamatan Pangale;
- b) Kecamatan Budong-Budong;
- c) Kecamatan Tobadak;
- d) Kecamatan Topoyo;
- e) Kecamatan Karossa.

2) Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa di pimpin oleh Kepala Desa dan mempunyai salah satu tugas yaitu menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap tahun anggaran dan setiap habis masa jabatan kepada Bupati. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki 54 Desa yang terletak di 5 Kecamatan. Dengan uraian sebagai berikut :

1.	Desa Kambunong	28.	Desa Topoyo
2.	Desa Tasokko	29.	Desa Tabolang
3.	Desa Salubiro	30.	Desa Tangkau
4.	Desa Lara	31.	Desa Tappilina
5.	Desa Sukamaju	32.	Desa Salupangkang
6.	Desa Lembah Hopo	33.	Desa Bambamanurung
7.	Desa Karossa	34.	Desa Salupangkang IV
8.	Desa Kayu Calla	35.	Desa Salulebbo
9.	Desa Kadaila	36.	Desa Babana
10.	Desa Benggaulu	37.	Desa Kire
11.	Desa Sanjango	38.	Desa Lumu

12.	Desa Polo Pangale	39.	Desa Salumanurung
13.	Desa Sartanamaju	40.	Desa Barakkang
14.	Desa Polo Lereng	41.	Desa Tinali
15.	Desa Kombiling	42.	Desa Salugatta
16.	Desa Polo Camba	43.	Desa Pontanakayyang
17.	Desa Lamba-Lamba	44.	Desa Lembah Hada
18.	Desa Pangale	45.	Desa Bojo
19.	Desa Lemo-Lemo	46.	Desa Passapa
20.	Desa Kuo	47.	Desa Tobadak
21.	Desa Budong-Budong	48.	Desa Mahahe
22.	Desa Tumbu	49.	Desa Polongaan
23.	Desa Sinabatta	50.	Desa Batu Parigi
24.	Desa Waeputeh	51.	Desa Sulobaja
25.	Desa Kabubu	52.	Desa Bambadaru
26.	Desa Paraili	53.	Desa Saloadak
27.	Desa Pangalloang	54.	Desa Sejati

e. **Jumlah Perangkat Daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah**

Tabel 1. 17
Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Di bawah ini Tipe Instansi Pemerintah di Lingkup Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut :

No	Instansi	Tipe
1	2	3
1	Sekretariat Daerah Kab Mateng	B
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Mateng	B
3	Inspektorat	B
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	B
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)	B
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	A

No	Instansi	Tipe
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A
10	Dinas Kesehatan	B
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	B
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A
14	Dinas Sosial	B
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A
16	Dinas Lingkungan Hidup	B
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B
19	Dinas Perhubungan	B
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	A
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	C
22	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	A
23	Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata	B
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	C
25	Dinas Perikanan	B
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	A
27	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	B

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana diolah, 2024

Dari keterangan diatas, Perangkat Daerah dengan susunannya menurut tipe masih terdapat dua dperangkat daerah dengan tipe C yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Tabel 1. 18
Data Pegawai Berdasarkan Komposisi Instansi 2024

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2023 berjumlah 1727 orang dan mengalami peningkatan pegawai di tahun 2024 sebanyak 2643 Orang, dengan jumlah pegawai laki-laki berjumlah 1000 dan perempuan berjumlah 1643. Adapun tabel data pegawai berdasarkan komposisi instansi 2024 pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut :

No	Instansi	Pegawai		Total
		L	P	
1	2	3	4	5
1	SEKRETARIAT DAERAH KAB MATENG	23	18	41
2	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH	20	2	22
3	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH	9	7	16
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8	6	14
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	8	9	17
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	15	8	23
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5	6	11
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8	2	10
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7	5	12
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7	2	9
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	15	10	25
	DINAS PENDIDIKAN (PENGAWAS, PLS, PENILIK)	15	2	17
	DINAS PENDIDIKAN (SEKOLAH)	346	485	831
	P3K GURU	132	416	548
12	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	5	4	9
13	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	17	8	25
	PENYULUH PERTANIAN	16	8	24
14	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH , PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	17	3	20
15	DINAS PERHUBUNGAN	10		10
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	21	11	32
17	DINAS SOSIAL	6	3	9

No	Instansi	Pegawai		Total
		L	P	
18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8	3	11
19	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	9	3	12
20	DINAS PERIKANAN	15	6	21
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	10	3	13
22	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6	14	20
23	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	16	2	18
24	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5	4	9
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2	3	5
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	1	7
27	DINAS KESEHATAN	19	10	29
28	RSUD MAMUJU TENGAH	10	42	52
	PUSKESMAS PANGALE	6	24	30
	PUSKESMAS POLO CAMBA	5	18	23
	PUSKESMAS SALUGATTA	5	12	17
	PUSKESMAS BABANA	1	21	22
	PUSKESMAS TOPOYO	5	38	43
	PUSKESMAS SALUPANGKANG	5	16	21
	PUSKESMAS DURIKUMBA	5	27	32
	PUSKESMAS LARA	3	17	20
	PUSKESMAS TOBADAK	7	20	27
	PUSKESMAS SALOADAK	0	10	10
	PUSKESMAS BATUPARIGI	3	2	5
	P3K TENAGA KESEHATAN	97	314	411
29	KANTOR KECAMATAN TOBADAK	8	4	12
30	KANTOR KECAMATAN TOPOYO	9	3	12
31	KANTOR KECAMATAN KAROSSA	12	2	14
32	KANTOR KECAMATAN BUDONG- BUDONG	5	4	9
33	KANTOR KECAMATAN PANGALE	8	5	13
TOTAL		1000	1643	2643

Sumber: BKPSDM 2024 diolah 2025

Berdasarkan komposisi pegawai di atas terlihat bahwa jumlah pegawai terbanyak terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini

adalah Pegawai dilingkup sekolah yang mencapai 831 orang dengan pegawai laki-laki berjumlah 346 orang dan pegawai perempuan berjumlah 485 orang, hal ini terjadi karena jumlah guru yang mendominasi dibandingkan instansi lain.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1. 19
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Setelah Perubahan	Realisasi
1	2	3	4
1	PENDAPATAN DAERAH		
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.309.072.127,00	51.819.614.198,69
3	Pajak Daerah	12.993.479.302,00	12.064.921.118,00
4	Pajak Hotel	148.500.000,00	32.673.000,00
5	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	1.006.742.551,00
6	Pajak Reklame	400.000.000,00	302.845.126,00
7	Pajak Penerangan Jalan	5.171.738.904,00	6.225.662.570,00
8	Pajak Air Tanah	2.908.500,00	3.000.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700.000.000,00	658.879.773,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.500.000.000,00	3.175.091.213,00
11	Retribusi Daerah	15.747.142.378,00	14.022.486.339,00
12	Retribusi Jasa Umum	9.234.654.128,00	7.711.526.069,00
13	Retribusi Jasa Usaha	5.992.488.250,00	5.841.146.000,00
14	Retribusi Perizinan Tertentu	520.000.000,00	469.814.270,00
15	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.980.000.000,00	729.061.014,00
16	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.980.000.000,00	729.061.014,00
17	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	0	0,00

No	Uraian	Setelah Perubahan	Realisasi
1	2	3	4
18	Lain-lain PAD yang Sah	21.588.450.447,00	25.003.145.727,69
19	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	350.000.000,00	230.337.498,00
20	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	173.000.000,00	57.025.000,00
21	Jasa Giro	1.897.165.799,00	1.196.980.075,00
22	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	674.998.598,00	2.097.373.185,05
23	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	18.000.000.000,00	20.036.295.265,22
24	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0,00
25	Pendapatan dari Pengembalian	0	0,00
26	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	493.286.050,00	1.378.336.111,42
24	PENDAPATAN TRANSFER	613.833.052.176,00	610.185.349.767,00
25	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	587.932.352.000,00	583.771.260.129,00
26	Dana Desa	51.461.215.000,00	51.461.215.000,00
28	Pendapatan Bagi Hasil	25.900.700.176,00	26.414.089.638,00
30	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.256.616.936,00	7.746.528.903,00
31	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.256.616.936,00	7.746.528.903,00
32	JUMLAH PENDAPATAN	674.398.741.239,00	669.751.492.868,69

Sumber: BPKPAD (unaudited), 2024

Berdasarkan tabel pendapatan diatas, Total Realisasi pendapatan tahun 2024 tercapai sebesar 99,31%. Untuk pendapatan asli daerah sendiri, terealisasi sebesar Rp. 51.819.614.198,69 atau 99,06%, hal ini telah mengalami peningkatan dibandingkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2023 yakni sebesar Rp. 43.089.865.860,66 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 8.729.748.338,03. Hal ini merupakan tren yang sangat positif karena tiap tahunnya pendapatan asli

daerah Kabupaten Mamuju Tengah selalu meningkat bahkan pada tahun 2024 meningkat dengan angka yang cukup tinggi. Untuk kedepannya, pemerintah Kabupaten mamuju Tengah akan selalu berusaha agar dapat memaksimalkan Kembali potensi PAD atau intensifikasi potensi PAD dan melakukan pencarian potensi PAD baru atau ekstensifikasi potensi PAD untuk menambah pendapatan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.

1) Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Tabel 1.20
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Setelah Pergeseran	Realisasi
1	2	3	4
1	BELANJA		
2	BELANJA OPERASI	479.600.220.454,88	468.766.363.811,00
3	Belanja Pegawai	227.183.341.761,79	224.098.755.376,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	170.664.956.724,79	169.720.699.136,00
5	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.275.731.846,00	5.165.910.130,00
6	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.751.476.884,00	40.775.046.744,00
7	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.885.022.993,00	7.843.288.208,00
8	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.273.314,00	172.171.158,00
9	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	431.880.000	421.640.000,00
10	Belanja Pegawai BOS	0	0,00
11	Belanja Barang dan Jasa	209.941.443.206,39	203.078.457.820,00
12	Belanja Barang	42.936.332.837,99	41.479.567.820,00
13	Belanja Jasa	94.784.149.117,37	91.806.354.105,00
14	Belanja Pemeliharaan	3.087.839.224,00	2.964.644.154,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	26.626.539.602,99	25.692.786.208,00
16	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	986.725.000,00	978.527.650,00

No	Uraian	Setelah Pergeseran	Realisasi
1	2	3	4
	Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
17	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.750.492.362,04	16.712.447.138,00
18	Belanja Bunga	0	0,00
19	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0	0,00
20	Belanja Hibah	42.430.935.486,70	41.570.650.615,00
21	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	250.000.000,00	250.000.000,00
22	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	36.832.783.486,70	36.025.116.615,00
23	Belanja Hibah Dana BOSP	5.035.140.000,00	4.982.577.000,00
24	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	308.550.000,00	308.495.000,00
25	Belanja Bantuan Sosial	44.500.000,00	18.500.000,00
26	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	32.000.000,00	6.000.000,00
27	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	12.500.000,00	12.500.000,00
28	BELANJA MODAL	146.739.840.857,22	139.134.589.716,00
29	Belanja Modal Tanah	2.187.077.448,00	2.055.173.000,00
30	Belanja Modal Alat Besar	1.833.056.412,00	1.553.580.000,00
31	Belanja Modal Alat Angkutan	9.514.478.611,00	9.320.448.611,00
33	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.345.264.750,00	3.335.550.662,00
34	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.618.099.400,00	1.436.954.200,00
35	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.627.158.177,00	15.601.150.752,00

No	Uraian	Setelah Pergeseran	Realisasi
1	2	3	4
37	Belanja Modal Komputer	1.628.556.641,00	1.605.962.182,00
40	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	108.180.600,00	108.180.600,00
41	Belanja Modal Rambu- Rambu	99.324.509,00	99.161.850,00
42	Belanja Modal Peralatan Olahraga	64.200.000,00	64.065.000,00
43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.997.820.260,00	2.008.320.260,00
44	Belanja Modal Bangunan Gedung	39.832.939.832,00	37.209.398.557,00
46	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.384.329.100,00	4.068.930.296,00
47	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	42.014.552.679,42	39.925.812.750,00
48	Belanja Modal Bangunan Air	5.986.158.425,00	4.872.146.276,00
49	Belanja Modal Instalasi	13.797.591.530,00	13.181.275.688,00
50	Belanja Modal Jaringan	3.645.000,00	0,00
51	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	546.968.300,00	545.138.000,00
53	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	721.030.002,00	721.990.002,00
54	Belanja Modal Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	599.349.241,00	597.099.241,00
56	BELANJA TIDAK TERDUGA	616.770.079,00	475.105.500,00
57	Belanja Tidak Terduga	616.770.079,00	475.105.500,00
59	BELANJA TRANSFER	88.823.663.300,00	88.823.663.300,00
60	Belanja Bantuan Keuangan	88.823.663.300,00	88.823.663.300,00
61	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	88.388.663.300,00	88.388.663.300,00
62	JUMLAH BELANJA	715.780.494.691,00	697.199.722.327,00
63	SURPLUS/DEFISIT	(41.381.753.452,10)	(27.448.229.458,31)

Sumber: BPKPAD, 2024

Dari tabel realisasi Belanja Daerah diatas dapat dijelaskan bahwa Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah didominasi pada jenis Belanja Operasi sebesar Rp 468.766.363.811,00 atau 67,23% dari total belanja daerah, setelah itu ialah Belanja Modal sebesar Rp139.134.589.716,00 atau 19,95%, Belanja Transfer sebesar Rp88.823.663.300,00 atau 12,74% dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp475.105.500,00 atau sebesar 0.68% dari Total keseluruhan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

2) Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

Tabel 1. 21
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Setelah Pergeseran	Realisasi
1	2	3	4
1	PEMBIAYAAN		
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	41.381.753.452,10	41.381.753.452,10
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.381.753.452,10	41.381.753.452,10
4	Penghematan Belanja	41.381.753.452,10	41.381.753.452,10
7	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00
8	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00
9	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00
10	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0,00	0,00
13	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00
14	PEMBIAYAAN NETTO	41.381.753.452,10	41.381.753.452,10
15	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	13.933.523.993,79

Sumber: BPKPAD, 2024

Kabupaten Mamuju Tengah untuk tahun 2024 tidak menganggarkan pengeluaran Pembiayaan Daerah sehingga total penyertaan modal daerah sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp6.000.000.000.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Pemerintah Daerah

Permasalahan perencanaan pembangunan daerah di Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1) Tertinggalnya Perkembangan Kualitas Manusia

Kualitas pembangunan manusia tercermin dalam indeks pembangunan

manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mamuju Tengah masih rendah. Di tahun 2022 IPM Kabupaten Mamuju Tengah 66,89 masih dibawah IPM Provinsi Sulawesi Barat 66,92 dan Nasional 72,91. Bila dihubungkan dengan Visi RPJPN 2025-2045 menciptakan manusia unggul, IPM Kabupaten Mamuju Tengah masih jauh di bawah target nasional.

Penyebab rendahnya pembangunan manusia di Kabupaten Mamuju Tengah disebabkan oleh masih rendahnya rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup yang masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian nasional. Rata-rata lama sekolah yang masih rendah menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga tidak dapat bersaing dalam pasar kerja yang membutuhkan tingkat pendidikan tinggi dan terampil. masih kurangnya akses, ketersediaan serta kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan terhadap pelayanan kesehatan juga menjadi penyebab rendahnya angka harapan hidup. Kurangnya tenaga kerja terampil dan rendahnya pendidikan tenaga kerja menyebabkan tenaga kerja sebagian besar bekerja sebagai buruh dengan pendapatan rendah sehingga upah yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2) Terbatasnya Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Wilayah

Kabupaten Mamuju Tengah merupakan daerah yang strategis berada pada jalur yang mendukung konektivitas antar daerah di Pulau Sulawesi dan salah satu daerah yang akan menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) namun persoalan infrastruktur masih menjadi masalah dasar untuk jalan dan jembatan beberapa hal yang menjadi masalah yaitu kondisi lingkungan berupa daya dukung tanah yang menyebabkan usia jalan tidak maksimal selain itu tonase kendaraan juga menjadi salah satu penyebabnya, sekaitan dengan air bersih beberapa wilayah tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber air bersih yang aman dan bersih dan Pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien atau tidak berkelanjutan. Untuk persoalan sanitasi kurangnya akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak di beberapa wilayah dan juga faktor kesadaran masyarakat masih rendah sekaitan sanitasi layak, lalu untuk infrstruktur Perumahan dan Pemukiman. Infrastruktur perhubungan yang masih terbatas.

3) Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi

Masalah lainnya adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi. Dalam

dekade terakhir laju pertumbuhan ekonomi melambat karena dampak pandemic Covid-19 dan pasca pandemic Covid-19 pemulihan perekonomian belum optimal. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah melambat menjadi 2,20 persen lebih rendah dari rata-rata provinsi dan nasional. Secara rata-rata dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi memang rendah, paling tinggi sekitar 5,72% di tahun 2018. Dalam 20 tahun ke depan, agar Kabupaten Mamuju Tengah berkontribusi pada pencapaian cita-cita Indonesia untuk mencapai negara berpenghasilan kategori maju, diperlukan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6%. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan sub-sektor pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan. Sektor ini berkontribusi sekitar 70% PDRB sehingga perlambatannya sangat mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Faktor penyebab lainnya adalah terjadinya stagnasi pertumbuhan sector industri, baik industri pengolahan hasil pertanian maupun industri manufaktur. Hal ini merupakan tantangan karena Kabupaten Mamuju Tengah merupakan daerah penghasil sawit dimana perkembangan industri pengolahan sawit dapat mengakselerasi pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB. Tantangan dalam 20 tahun kedepan adalah bagaimana mendorong pertanian tanaman pangan Kabupaten Mamuju Tengah untuk mendukung kebutuhan pangan IKN di Kalimantan, terutama melalui komoditas andalan pisang dan tanaman pangan lainnya.

4) Meningkatnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan

Sejalan dengan prioritas RPJMN 2020-2024, RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 indikator pengurangan kemiskinan menjadi isu strategis utama dan menjadi salah satu prioritas pembangunan yang ditetapkan kedalam sasaran ke lima RPJMD yaitu “Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat dengan indikator penurunan angka kemiskinan sekitar 5,50 persen di akhir tahun 2026 serta kemiskinan ekstrem yang ditargetkan sebesar 0% di akhir tahun 2024.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukan terjadi kenaikan jumlah masyarakat miskin dalam kurun empat tahun terakhir. Pada tahun 2023 angka kemiskinan Mamuju Tengah telah mencapai angka 7,23 persen meningkat sekitar seratus jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu gini ratio juga mengalami peningkatan dari 0,29 menjadi 0,35 poin.

Hal ini tentu menjadi masalah yang serius bagi pembangunan daerah di Mamuju Tengah karena salah satu indikator penilaian dari kesejahteraan masyarakat adalah melalui tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu diperlukan berbagai kebijakan yang strategis dan tepat sasaran untuk menurunkan angka kemiskinan. Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah dapat diupayakan melalui (1). Pemenuhan sarana dan prasarana dasar bagi penduduk miskin melalui perluasan jaringan air bersih, pengembangan perumahan terjangkau dan penciptaan lingkungan sehat. (2) Meningkatkan Produktivitas masyarakat miskin dalam sektor pertanian, perkebunan peternakan serta perikanan. (3) Meningkatkan ketersediaan pasar hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan pertanian. (4) Meningkatkan perluasan dan kesempatan kerja dan peluang usaha penduduk miskin melalui penyiapan dan pemberdayaan tenaga kerja produktif. (5) Meningkatkan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui perluasan kepesertaan jaminan kesehatan dan pelayanan sosial. (6) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pelayanan bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin, mengembangkan sekolah kejuruan bagi siswa miskin dan pemanfaatan pendidikan non formal.

5) Rendahnya Pendapatan Masyarakat

PDRB/kapita Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp. 27,24 juta, lebih rendah dari rata-rata provinsi (Rp. 37,07 juta) dan rata-rata nasional (Rp.71,03 juta). Bila dihubungkan dengan visi RPJPN 2025-2045 yang mencanangkan pendapatan perkapita setara dengan negara maju, maka menurut Bank Dunia pendapatan setara negara maju minimal US\$ 11.906/tahun, atau sekitar Rp.185 juta/kapita/tahun. Artinya, Kabupaten Mamuju Tengah dapat berkontribusi pada pencapaian ekonomi Indonesia untuk setara dengan negara maju bila PDRB/kapita pada tahun 2045 meningkat tujuh kali lipat dari tahun 2022.

Penyebab dari rendahnya PDRB/kapita adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan formal. Pada tahun 2022, dari total angkatan kerja yang bekerja, lebih dari 60% berpendidikan formal SMP ke bawah. Selain itu, tingkat teknologi yang diaplikasikan masyarakat sangat rendah. Teknologi maju diterapkan pada perusahaan perkebunan sawit melalui pabrik pengolahan, tetapi manfaat dari nilai tambahnya kurang

memberi multiplier effect terhadap pendapatan masyarakat. Penyebab lainnya adalah rendahnya kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah terhadap nilai tambah perekonomian daerah.

6) Rendahnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik

Berdasarkan data Survey dari Bappeda Litbang Kabupaten Mamuju Tengah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 secara rata-rata sebesar 75,18 dengan predikat C (Kurang baik). Dimana survey mengambil sampel 6 (Enam) Pelayanan dasar pemerintah yaitu, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, dan Air Bersih. Adapun perolehan nilainya sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 73.29 dan Nilai Indeks Pelayanan 2.93. Berdasarkan hasil tersebut maka nilai mutu pelayanan berada pada kategori “C” atau “Kurang Baik”.
- 2) Pelayanan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan melalui sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 74.92 dan Nilai Indeks Pelayanan 3.00. Hasil tersebut menunjukkan dimana nilai mutu pelayanan pada kategori “C” atau “Kurang Baik”.
- 3) Pelayanan Kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah melalui sekolah menunjukkan hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 74.68 dan Nilai Indeks Pelayanan 2.99. Hasil tersebut menunjukkan dimana nilai mutu pelayanan pada kategori “C” atau “Kurang Baik”.
- 4) Pelayanan Perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP dan UMKM Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 76.49 dan Nilai Indeks Pelayanan 3.06 Hasil tersebut menunjukkan dimana nilai mutu pelayanan pada kategori “C” atau “Kurang Baik”.
- 5) Pelayanan Persampahan yang diselenggarakan oleh Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 75.13 dan Nilai Indeks Pelayanan 3.01

Hasil tersebut menunjukkan dimana nilai mutu pelayanan pada kategori “C” atau “Kurang Baik”.

- 6) Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi yang diselenggarakan oleh UPTD Air Bersih dan Sanitasi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 76.16 dan Nilai Indeks Pelayanan 3.05 Hasil tersebut menunjukkan dimana nilai mutu pelayanan pada kategori “C” atau “Kurang Baik”.

7) Ancaman Disharmoni Sosial Di Balik Heterogenitas Sosial Budaya

Ancaman disharmoni sosial juga merupakan masalah yang perlu diantisipasi. Apa lagi bila mengarah kepada konflik sosial. Ini disebabkan oleh karena secara sosial-budaya masyarakat yang menghuni Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari berbagai macam suku/etnis. Artinya, masyarakat Mamuju Tengah hidup dalam keberagaman, dalam heterogenitas sosial yang tinggi. Wilayah Mamuju Tengah dihuni oleh suku/etnis Mamuju, Mandar, Jawa, Lombok, Bali, oraja, Timor Timur, Bugis, Makassar dan lainnya. Sebagian dari suku/etnis ini hidup pada desa-desa yang sebelumnya merupakan unit pemukiman transmigran (UPT), bahkan saat ini masih ada yang statusnya sebagai UPT. Kondisi heterogen ini merupakan modal sosial dalam pembangunan daerah. Akar masalah yang perlu diantisipasi efeknya adalah bila terjadi kesenjangan ekonomi yang tinggi, maka heterogenitas sosial budaya yang tinggi dapat merupakan potensi konflik sosial. Karena itu, nilai La'la Tassisara yang kurang lebih bermakna meskipun berbeda tetapi tetap dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan, merupakan bingkai pengikat yang perlu terus direvitalisasi oleh seluruh elemen sosial-budaya dalam masyarakat serta dalam relasi antara pemerintah dan masyarakat, demi persatuan dan kesatuan.

a) Degradasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Degradasi lingkungan dan sumberdaya alam juga merupakan masalah pokok yang mengancam keberlanjutan pembangunan. Sebagai daerah yang mengandalkan sumberdaya alam sebagai basis nafkah masyarakat, Kabupaten Mamuju Tengah sangat berkepentingan untuk memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. Degradasi lingkungan dapat mengganggu siklus hidrologi dengan dampak pada terjadinya banjir karena luapan air sungai.

Lokasi rawan banjir dan longsor terutama Desa Pangale, Desa Lemo-Lemo dan Desa Karama Kecamatan Pangale; Desa Lumu, Desa Kire

dan Desa Babana Kecamatan Budong-Budong; Desa Tumbu Kecamatan Topoyo; dan Desa Benggaulu Kecamatan Karossa. Bencana tsunami juga rawan pada sejumlah desa pantai di Kecamatan Pangale, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Karossa. Wilayah pesisir ini juga rawan bencana gelombang pasang. Kabupaten Mamuju Tengah masih tergolong rawan bencana kebakaran lahan dan hutan. Masalah dibalik degradasi lingkungan ini adalah aktivitas perambahan hutan, dinamika siklus hidrologi terkait keberadaan perkebunan sawit, pencemaran lingkungan oleh aktivitas pabrik dan aktivitas masyarakat, aktivitas pertanian pada lokasi berkemiringan, pendangkalan sungai karena sedimentasi, berkurangnya keanekaragaman hayati, belum optimalnya pengelolaan sampah perkotaan, dan belum kuatnya kesadaran masyarakat atas kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam.

b) Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Masalah pokok lainnya adalah belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ini ditandai dengan masih rendahnya sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) daerah, yang menandakan bahwa kegiatan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Masalah di balik itu adalah belum mantapnya penyelenggaraan reformasi birokrasi. Delapan area reformasi birokrasi yang menjadi perhatian adalah budaya kerja, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik. Akar masalahnya adalah kuantitas SDM aparatur yang belum mencukupi, ini merupakan konsekuensi sebagai daerah otonomi baru. Selain itu, kompetensi sebagian SDM aparatur masih terbatas, disebabkan oleh kurangnya keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan terkait tupoksinya, baik pada level OPD Kabupaten dan Kecamatan maupun pada pemerintahan desa.

b. Visi dan Misi Bupati Mamuju Tengah

1) Visi Kepala Daerah Tahun 2021-2026

Visi RPJMD adalah gambaran tentang kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah diambil dari rumusan visi kepala daerah terpilih. Selain itu, visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 juga mengacu pada visi RPJMN 2020-2024, visi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2018-2023, dan visi RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah 2013-2025. Visi RPJMN Indonesia 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 adalah **“Sulawesi Barat Maju dan *Malaqbi*”**.

Visi RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah 2013-2025 adalah **“Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Daerah Agribisnis yang Sejahtera, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan”**. Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 dijabarkan dari visi kepala daerah terpilih yakni H. Aras Tammauni dan H. Amin Jasa. Adapun rumusan visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 adalah: **Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla’ Tassisara**.

Kata kunci yang terkandung dalam rumusan visi ini adalah maju, sejahtera, dan bingkai *Lalla’ Tassisara*. Ketiga kata kunci ini saling terkait satu sama lain dalam menggambarkan kondisi masa depan yang hendak dicapai bersama oleh seluruh warga Kabupaten Mamuju Tengah. Artikulasi atau penjelasan dari masing-masing kata kunci tersebut teruraikan sebagai berikut. **“Maju”** adalah kondisi dimana kualitas manusia Kabupaten Mamuju Tengah semakin tinggi dan didukung oleh pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai baik dari segi jangkauannya maupun dari segi kualitasnya. **“Sejahtera”** adalah kondisi dimana kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah semakin meningkat dengan didukung oleh pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. **“Bingkai La’la Tassisara”** adalah kondisi dimana kebersamaan di tengah keberagaman menjadi acuan nilai dan norma bagi seluruh warga Kabupaten Mamuju Tengah dalam menjaga dan memelihara ketertiban dan ketenteraman.

Dengan Visi tersebut, kualitas Kehidupan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah dicita-citakan semakin membaik, ditandai dengan indeks pembangunan manusia yang terus meningkat.

2) Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026

Misi adalah upaya umum yang hendak dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Maksud dari perumusan misi adalah untuk menjabarkan upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan setiap kata kunci dari visi. Rumusan misi dan penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut.

a) Mendorong Pemenuhan Infrastruktur Dasar

Upaya umum dalam misi ini mencakup pemenuhan infrastruktur jalan antar kecamatan, antara ibukota kecamatan dengan desa-desa, dan antar desa, baik dalam bentuk peningkatan kualitas jalan (terutama dari jalan kerikil menjadi jalan aspal) maupun dalam bentuk pemeliharaan jalan. Upaya umum ini juga mencakup pemenuhan fasilitas air minum sehari-hari dan fasilitas penanganan limbah domestik/sanitasi. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam pembangunan sarana/prasarana dalam mewujudkan agropolitan di ibukota kabupaten yang ditopang oleh sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di seluruh kecamatan;

b) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar

Upaya umum dalam misi ini mencakup pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) untuk urusan wajib pelayanan dasar mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan serta pelayanan umum lainnya;

c) Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian dalam arti umum yakni tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan, selain memperkuat sistem agribisnis dan agroindustri berbasis kelapa sawit untuk sebanyak-banyaknya memberi manfaat bagi kehidupan rakyat. Seiring dengan peningkatan daya saing perekonomian, kesejahteraan sosial juga menjadi perhatian, terutama dalam penanggulangan kemiskinan;

d) Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik

Misi ini mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi. Area reformasi birokrasi yang menjadi perhatian adalah budaya kerja, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik. Termasuk juga dalam misi ini adalah penguatan pemerintahan kecamatan dan pembinaan desa;

e) Memelihara Persatuan dan Kesatuan Masyarakat

Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara, memperkuat dan mengembangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang heterogen. Upaya itu dimaksudkan agar masyarakat tetap hidup rukun dan damai serta mengacu pada nilai Lalla' Tassisara, yakni berbeda-beda tetapi tetap dalam kebersamaan untuk membangun Kabupaten Mamuju Tengah;

f) Menjaga Keberlanjutan Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup

Misi ini mencakup upaya umum dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan seperti degradasi lahan, kerusakan sungai, kerusakan pesisir dan kerusakan tutupan lahan. Misi ini juga terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati serta pengelolaan sampah;

3) Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun RPJMD. Kriteria rumusan tujuan pembangunan adalah: 1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; 2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 4) dapat diukur dalam jangka waktu lima tahunan; dan 5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Langkah-langkah perumusan tujuan adalah: 1) merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih; 2) menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 3) merumuskan indikator tujuan yang memenuhi kriteria.

Tabel 1. 22
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai La'la Tassisara		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi-1: Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar		
Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar secara merata antar wilayah (T1)	Terpenuhinya infrastruktur dasar dalam mendukung pemerataan perkembangan sosial- ekonomi masyarakat (S1)	Mengefektifkan daya dukung infrastruktur transportasi dan perhubungan, informasi dan komunikasi, perumahan dan pemukiman, serta sumberdaya air sesuai karakteristik wilayah berbasis rencana tata ruang daerah
Misi-2: Meningkatkan kualitas pelayanan dasar		
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar dalam mendukung kualitas hidup yang layak (T2)	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten (S2)	Memenuhi ketersediaan data, sumberdaya manusia, dan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan SPM pelayanan dasar yang menjangkau semua target layanan
	Meningkatnya kualitas kehidupan manusia (S3)	Meningkatkan kemampuan literasi, resiliensi dampak pandemic dan penanganan 1.000 hari pertama kehidupan dalam pencegahan dan penanganan stunting, serta daya beli masyarakat untuk hidup yang layak
Misi-3: Mendorong daya saing perekonomian daerah		

Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah (T3)	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor-sektor perekonomian daerah (S4)	Memanfaatkan teknologi terkini dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui peran efektif pelaku utama dan pelaku usaha.
	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat (S5)	Pelibatan multistakeholder dalam penanggulangan kemiskinan diiringi dengan penyerapan tenaga kerja dengan pendapatan di atas upah minimum
	Berkembangnya kawasan agropolitan dan agribisnis berbasis kota terpadu mandiri (S6)	Pengembangan sarana/prasarana dan fasilitas ekonomi pendukung dalam produksi dan pengolahan komoditas unggulan agribisnis berbasis keterkaitan kawasan ibukota kabupaten dengan kawasan perdesaan.
Misi-4: Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik		
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi (T4)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (S7)	Percepatan implementasi road-map reformasi birokrasi dengan dukungan sistem elektronik yang mengintegrasikan data sektoral dan keuangan dari level perangkat daerah hingga pemerintah desa
	Berkembangnya inovasi daerah (S8)	Penguatan sistem inovasi daerah dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan ekonomi melibatkan kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.

Misi-5: Memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat		
Meningkatkan solidaritas sosial dan kerukunan antar ummat beragama (T5)	Terpeliharanya suasana tertib, tenteram, aman dan damai dalam interaksi antar kelompok masyarakat (S9)	Penguatan modal sosial antar kelompok masyarakat untuk memanifestasikan kebersamaan dalam mendorong kemajuan daerah yang membawa kemaslahatan untuk semua
Misi-6: Menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup		
Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan (T6)	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati daerah (S10)	Penyadaran pemangku kepentingan untuk pengendalian pencemaran, pencegahan degradasi lahan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, penanganan sampah dan limbah seiring dengan penegakan aturan lingkungan hidup

Sumber: RPJMD Kab. Mamuju Tengah 2021-2026

c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan Jangka menengah

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang bersifat strategis dimana secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dengan kata lain, program pembangunan daerah merupakan program unggulan (Dari masing-masing misi yang terkait secara langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD). Identifikasi program pembangunan daerah, dilakukan dengan cara menganalisisi sasaran, strategi yang telah dirumuskan kemudian dijabarkan kedalam program pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan. Dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021-2026 memuat penyelenggaraan 44 bidang urusan yang mencakup 171 program dimana terdiri atas:

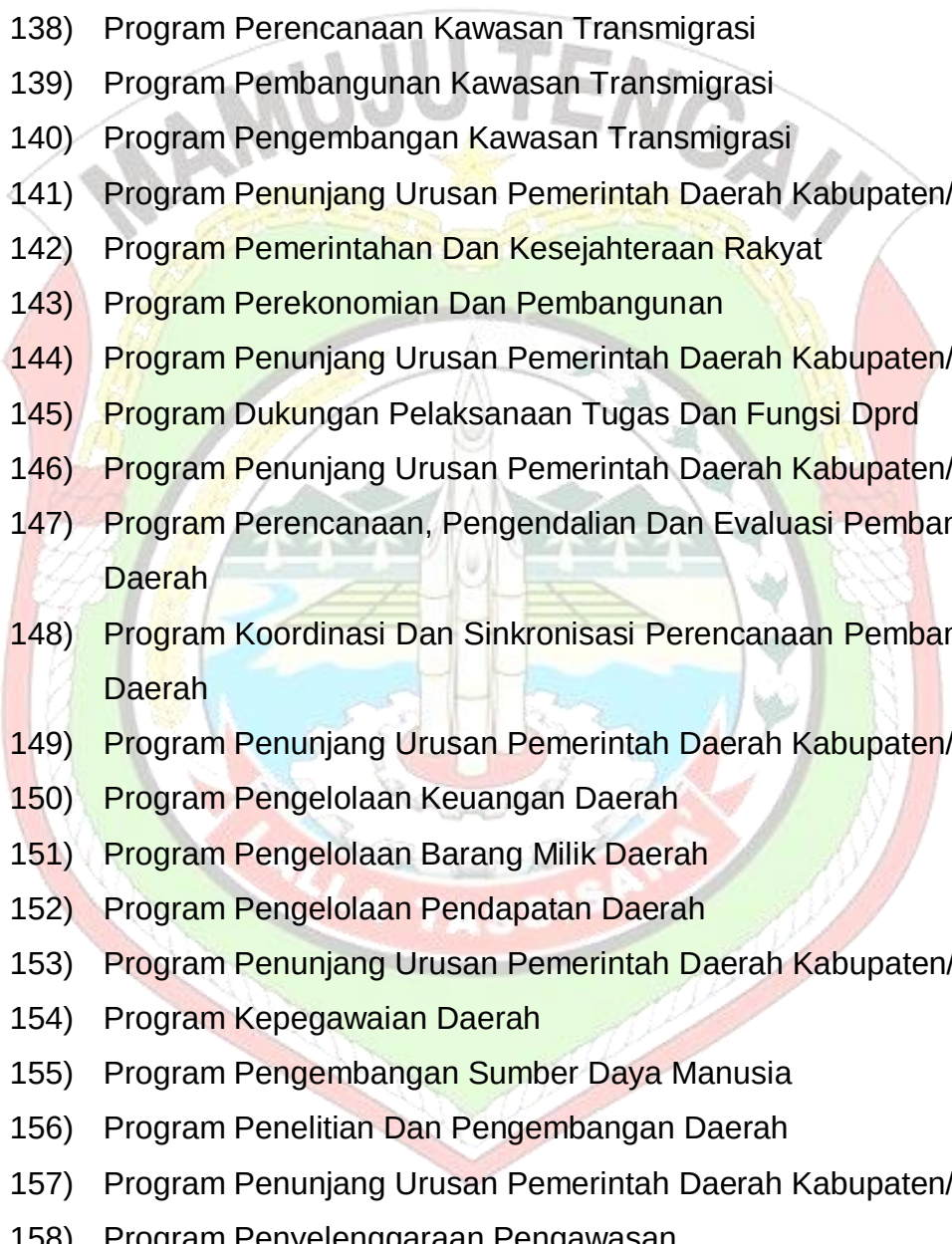
- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengelolaan Pendidikan

- 3) Program Pengembangan Kurikulum
- 4) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- 5) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
- 6) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 7) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 8) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 9) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- 10) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 11) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 12) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
- 13) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Umum
- 14) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
- 15) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 16) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- 17) Program Penataan Bangunan Gedung
- 18) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- 19) Program Penyelenggaraan Jalan
- 20) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 21) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 22) Program Pengembangan Perumahan
- 23) Program Kawasan Permukiman
- 24) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- 25) Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
- 26) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 27) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- 28) Program Penanggulangan Bencana
- 29) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 30) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 31) Program Pemberdayaan Sosial
- 32) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- 33) Program Rehabilitasi Sosial
- 34) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

- 
- 35) Program Penanganan Bencana
 - 36) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - 37) Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - 38) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 39) Program Penempatan Tenaga Kerja
 - 40) Program Hubungan Industrial
 - 41) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 42) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - 43) Program Perlindungan Perempuan
 - 44) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - 45) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
 - 46) Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
 - 47) Program Perlindungan Khusus Anak
 - 48) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 49) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
 - 50) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - 51) Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - 52) Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - 53) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - 54) Program Penyelesaian Ganti Krugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
 - 55) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 56) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - 57) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 58) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - 59) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
 - 60) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
 - 61) Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - 62) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - 63) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- 
- 64) Program Pengelolaan Persampahan
 - 65) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 66) Program Pendaftaran Penduduk
 - 67) Program Pencatatan Sipil
 - 68) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 69) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
 - 70) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 71) Program Penataan Desa
 - 72) Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - 73) Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - 74) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
 - 75) Program Pengendalian Penduduk
 - 76) Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
 - 77) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
 - 78) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 79) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
 - 80) Program Pengelolaan Pelayaran
 - 81) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 82) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
 - 83) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - 84) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 85) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
 - 86) Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
 - 87) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
 - 88) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
 - 89) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)
 - 90) Program Pengembangan Umkm
 - 91) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 92) Program Promosi Penanaman Modal
 - 93) Program Pelayanan Penanaman Modal
 - 94) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 95) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 96) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - 97) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - 98) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

- 
- 99) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 100) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 101) Program Pengembangan Kebudayaan
 - 102) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - 103) Program Pembinaan Sejarah
 - 104) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - 105) Program Pengelolaan Permuseuman
 - 106) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 107) Program Pembinaan Perpustakaan
 - 108) Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
 - 109) Program Pengelolaan Arsip
 - 110) Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
 - 111) Program Perizinan Penggunaan Arsip
 - 112) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 113) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - 114) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - 115) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
 - 116) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - 117) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - 118) Program Pemasaran Pariwisata
 - 119) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - 120) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
 - 121) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 122) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - 123) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 124) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 125) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - 126) Program Perizinan Usaha Pertanian
 - 127) Program Penyuluhan Pertanian
 - 128) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 129) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
 - 130) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

- 
- 131) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 - 132) Program Pengembangan Ekspor
 - 133) Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen
 - 134) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - 135) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
 - 136) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - 137) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 138) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
 - 139) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - 140) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - 141) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 142) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
 - 143) Program Perekonomian Dan Pembangunan
 - 144) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 145) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
 - 146) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 147) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - 148) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 149) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 150) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 151) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 152) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 153) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 154) Program Kepegawaian Daerah
 - 155) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 156) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
 - 157) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 158) Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - 159) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
 - 160) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 161) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - 162) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - 163) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - 164) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- 165) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 166) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 167) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- 168) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- 169) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 170) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
- 171) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

Program dan kegiatan prioritas daerah adalah program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat minimal. Penyajian program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dikelompokkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang berkaitan dengan klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang terdiri atas urusan wajib belayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan unsur penunjang pemerintah daerah, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintah umum serta program penunjang urusan pemerintah daerah.

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar;
- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan.

2. Kesehatan

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota;

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota;

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga;

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota;

Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota;

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota;

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota;

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah

Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota;
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota;
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB);
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.

5. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

6. SOSIAL

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota;
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

7. TENAGA KERJA

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK);
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

9. PANGAN

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota;
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.

10. PERTANAHAN

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

11. LINGKUNGAN HIDUP

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kabupaten/Kota;

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kabupaten/Kota;

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota;

Penyimpanan Sementara Limbah B3;

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang

Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

Pengelolaan Sampah.

12. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

Penataan Pendaftaran Penduduk;

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;

Pelayanan Pencatatan Sipil;

Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;

Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian

Database Kependudukan;

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan;

Penyusunan Profil Kependudukan.

13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi

Pemerintahan Desa;

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang

Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah

Kabupaten/Kota.

14. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian

Kuantitas Penduduk;

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

15. PERHUBUNGAN

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

16. KOMUNIKASI DAN INFROMATIKA

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

17. PENANAMAN MODAL, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota;

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan;

Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil;

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah

Kabupaten/ Kota;

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota;

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.

19. STATISTIK

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

20. PERSANDIAN

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

21. KEBUDAYAAN

Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;

Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

22. PERPUSTAKAAN

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota;

Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.

C. URUSAN PILIHAN

23. PERIKANAN

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota;

Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota;

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha

Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

24. PARIWISATA

Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

25. PERTANIAN

Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang
Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain;
Pengembangan Prasarana Pertanian;
Pembangunan Prasarana Pertanian;
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah
Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner
dalam Daerah Kabupaten/Kota;
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota;
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota;
Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan;
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

26. PERDAGANGAN

Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin
Usaha Toko Swalayan;
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Masyarakat di Wilayah Kerjanya;
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota;
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota;
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan
Pengawasan;
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri.

27. PERINDUSTRIAN

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

28. TRANSMIGRASI

Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi;
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian.

D. UNSUR PENUJANG PEMERINTAHAN DAERAH

29. SEKRETARIAT DAERAH

Administrasi Tata Pemerintahan;
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;;
Fasilitasi Kerjasama Daerah;
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

30. SEKRETARIAT DPRD

Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
Pembahasan Kebijakan Anggaran;
Peningkatan Kapasitas DPRD;
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
Fasilitasi Tugas DPRD;
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

31. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI DAERAH

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.

32. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;

Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah;

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah.

33. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;

Mutasi dan Promosi ASN;

Pengembangan Kompetensi ASN;

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;

Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

34. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

E. UNSUR PENGAWASAN

35. INSPEKTORAT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal;

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan;

Pendampingan dan Asistensi.

F. UNSUR KEWILAYAHAN

35. KECAMATAN

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

G. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

36. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

H. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

37. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
Administrasi Umum Perangkat Daerah;
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
Penataan Organisasi;
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
Layanan Administrasi DPRD.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar Hukum

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis Pelayanan Dasar dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis Pelayanan Dasar dan mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Adapun dasar hukum dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

- 9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 13 tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
- 10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

b. Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan system manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

1) Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

2) Pengumpulan Data

Pengumpulan data memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataan. Kemudian data yang perlu dikumpulkan pada tahapan pertama adalah terkait jumlah sarana dan prasarana yang tersedia serta barang dan jasa yang tersedia. Pengumpulan data harus sesuai dengan teknis Standar Pelayanan Minimal yang diharapkan pencapaian memenuhi target 100% dari target dan indikator pelayanan setiap tahun. Dalam tahapan pengumpulan data menggunakan form-form sebagai berikut:

a) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Dalam rangka mendukung pencapaian SPM Tahun 2024 di Bidang Urusan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan tahapan Pengumpulan Data digunakan form-form sebagai berikut:

- Pengumpulan Data Pendidikan

- Form 1.A.2 Jenis Pelayanan Dasar;
- Form 1.A.4 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Jumlah Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
- Form 1.A.7 Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar;
- Form 1.A.9 Rekapitulasi Kebutuhan Data Pemerataan Kualitas Hasil Belajar : Literasi Dan Numerasi;
- Form 1.A.11 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud);
- Form 1.A.12 Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Lingkungan Belajar.

- **Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan**
 - Form 1.B.2 Penghitungan Kebutuhan Mutu Minimal Layanan Pendidikan Kabupaten/Kota.
- **Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan**
 - Form 1.C.2 Rencana Pemenuhan SPM Pendidikan Dan Kerangka Pendanaan
- **Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan**
 - Form 1.D.2 Realisasi Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan
- **Capaian Target SPM Pendidikan (Rekapan)**
 - Form 1.E.1 Capaian Target SPM Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Form 1.E.3 Perhitungan Indeks Pencapaian Spm Pendidikan Kabupaten Tengah.

b) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Tahapan penerapan SPM urusan Pemerintahan bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, terdiri dari tahapan pengumpulan data Kesehatan, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, dan capaian target SPM Kesehatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai tahapan penerapan SPM urusan Pemerintahan bidang Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

- **Pengumpulan Data Kesehatan**
 - Form 2.A.2 Rekapitulasi Penduduk Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
 - Form 2.A.3 Rekapitulasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
- **Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan**
 - Form 2.B.4 Penghitungan Kebutuhan Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, Obat, Vaksin, Dan Perlengkapan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
 - Form 2.B.5 Penghitungan Kebutuhan SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Dasar Daerah Kabupaten/Kota
- **Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan**

- Form 2.C.3 Penyusunan Rencana Pemenuhan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota
 - Form 2.C.4 Penyusunan Rencana Pemenuhan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - **Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan**
 - Form 2.D.2 Capaian Pelaksanaan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
 - **Capaian Spm Bidang Kesehatan (Rekapan)**
 - Form 2.E.2 Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
- c) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM**
- Tahapan penerapan SPM urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah, terdiri dari tahapan pengumpulan data Pekerjaan Umum, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Pekerjaan Umum, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar Pekerjaan Umum, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar Pekerjaan Umum, dan capaian target SPM Pekerjaan Umum (rekapan).
- Untuk lebih jelasnya mengenai tahapan penerapan SPM urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Tengah, dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:
- **Pengumpulan Data Pekerjaan Umum**
 - Form 3.A.3 Kondisi Spam Jaringan Perpipaan Kabupaten/Kota
 - Form 3.A.4 Kondisi Spald Kabupaten/Kota
 - **Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum**
 - Form 3.B.3 Rumah Terlayani Spam Kabupaten/Kota
 - Form 3.B.4 Rumah Terlayani Spald Kabupaten/Kota
 - **Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum**
 - Form 3.C.3 Rencana Pemenuhan Air Minum Kabupaten/Kota
 - Form 3.C.4 Rencana Pemenuhan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota
 - **Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum**
 - Form 3.D.3 Capaian Layanan Air Minum Kabupaten/Kota
 - Form 3.D.4 Capaian Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota

- **Capaian Target Spm Pekerjaan Umum (Rekapan)**

- Form 3.E.3 Rekapitulasi Layanan Air Minum Kabupaten/Kota
- Form 3.E.4 Rekapitulasi Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota

d) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Tahapan penerapan SPM urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah, terdiri dari tahapan pengumpulan data Perumahan Rakyat, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Perumahan Rakyat, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar Perumahan Rakyat, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar Perumahan Rakyat, dan capaian target SPM Perumahan Rakyat (rekapan).

Untuk lebih jelasnya mengenai tahapan penerapan SPM urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Mamuju Tengah, dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

- **Pengumpulan Data Perumahan Rakyat**

- Form 4.A.4 Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana
- Form 4.A.5 Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana
- Form 4.A.6 Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana
- Form 4.A.10 Identifikasi Perumahan Di Lokasi Yang Menimbulkan Bahaya Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah
- Form 4.A.11 Identifikasi Perumahan Di Atas Lahan Bukan Fungsi Permukiman Di Kabupaten/Kota
- Form 4.A.12 Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota (<10 Ha)
- Form 4.A.13 Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota

- **Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat**

- Form 4.B.3 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana
- Form 4.B.4 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Terkena Bencana Kabupaten/Kota
- Form 4.B.7 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Form 4.B.8 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
- **Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat**
 - Form 4.C.2 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota
 - Form 4.C.4 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.
- **Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat**
 - Form 4.D.2 Rincian Capaian Pelaksanaan Spm Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Tahun-N Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana
 - Form 4.D.4 Rincian Capaian Pelaksanaan Spm Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun-N Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- **Capaian Target Spm Perumahan Rakyat (Rekapan)**
 - Form 4.E.2 Capaian Target Spm Perumahan Rakyat Kabupaten Mamuju Tengah

e) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS

- **Transtibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)**

Tahapan penerapan SPM urusan Pemerintahan bidang Trantibumlinmas-Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum) Kabupaten Mamuju Tengah, terdiri dari tahapan pengumpulan data Trantibum, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Trantibum,

penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar Trantibum, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar Trantibum, dan capaian target SPM Trantibum (rekapan).

Untuk lebih jelasnya mengenai tahapan penerapan SPM urusan Pemerintahan bidang Trantibumlinmas-Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum) Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

- **Pengumpulan Data Trantibum**

- Form 5.A.1 Perkiraan Rekapitulasi Jumlah Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter Dilokasi Penegakan Perda Dan Perkada
- Form 5.A.2 Perkiraan Rekapitulasi Daftar Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Serta Aset Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter Dari Lokasi Penegakan Perda Dan Perkada
- Form 5.A.3 Rekapitulasi Sop Kegiatan Penegakan Perda/Perkada
- Form 5.A.4 Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki Oleh Opd Satpol PP
- Form 5.A.5 Rekapitulasi Sumberdaya Manusia Yang Dimiliki Oleh Opd Satpol PP (Satpol PP, PPNS, Satlinmas)
- Form 5.A.6 Rekapitulasi Perda Perkada Yang Akan Ditegaskan Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- Form 5.A.7 Rekapitulasi Warga Negara Yang Terdampak Akibat Penegakan Perda Dan Perkada Dalam Radius 0-50 Meter
- Form 5.A.8 Rekapitulasi Aset Yang Dimiliki Oleh Warga Negara Yang Rusak Akibat Penegakan Perda Dan Perkada Dalam Radius 0-50 Meter

- **Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Trantibum**

- Form 5.B.1 Penghitungan Kebutuhan Penerima Layanan SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum
- Form 5.B.2 Penghitungan Kebutuhan Penyusunan SOP Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- Form 5.B.3 Penghitungan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP, PPNS, Satlinmas
- Form 5.B.4 Penghitungan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Satpol PP Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- Form 5.B.5 Penghitungan Perkiraan Kebutuhan Pelayanan Dasar Warga Negara Yang Terkena Dampak

- **Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Trantibum**
 - Form 5.C.2 Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Dan Kerangka Pendanaan
 - Form 5.C.4 Rencana Pemenuhan Personil Satpol PP
 - Form 5.C.6 Rencana Pemenuhan Sarana Dan Prasarana
- **Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Trantibum**
 - Form 5.D.2 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar Spm Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Warga Negara, Fasum, Fasos Dan Aset Warga Negara
 - Form 5.D.4 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Personil Satpol PP
 - Form 5.D.6 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Sarana Prasarana
- **Capaian Target Spm Trantibum (Rekapan)**
 - Form 5.E.1 Capaian Target Capaian Spm Sub Urusan Trantibum Kabupaten Mamuju Tengah.
- **Transtibumlinmas Urusan Pemadam Kebakaran (Damkar)**

Tahapan penerapan SPM urusan Pemerintahan bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Mamuju Tengah, terdiri dari tahapan pengumpulan data Damkar, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Damkar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar Damkar, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar Damkar, dan capaian target SPM Damkar (rekapan).

Untuk lebih jelasnya mengenai tahapan penerapan SPM urusan Pemerintahan bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Mamuju Tengah, dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:
- **Pengumpulan Data Damkar**
 - Form 5.A.1 Format Data Dukung Pelaksanaan SPM
 - Form 5.A.2 Daftar Relawan Kabupaten/Kota
 - Form 5.A.3 Daftar Warga Negara Yang Menjadi Korban Kebakaran Kabupaten/Kota
- **Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Damkar**
 - Form 5.B.1 Layanan Response Time Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit
 - Form 5.B.2 Layanan Pelaksanaan Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran
 - Form 5.B.3 Layanan Pelaksanaan Penyelamatan Dan Evakuasi

- Form 5.B.4 Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran
- Form 5.B.5 Layanan Pendataan, Inspeksi Dan Investigasi Pasca Kebakaran
- **Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Damkar**
 - Form 5.C.1 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar
- **Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Damkar**
 - Form 5.D.1 Rekapitulasi Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar (Pemadaman Dan Evakuasi) Kabupaten/Kota
 - Form 5.D.2 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar (Operasi Non Kebakaran) Kabupaten/Kota
- **Capaian Target SPM Damkar (Rekapan)**
 - Form 5.E.1 Capaian Target Spm (Rekapan)
- **Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana**

Tahapan penerapan SPM urusan Pemerintahan bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana Kabupaten Mamuju Tengah, terdiri dari tahapan pengumpulan data Bencana, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Bencana, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar Bencana, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar Bencana, dan capaian target SPM Bencana (rekapan).

Untuk lebih jelasnya mengenai tahapan penerapan SPM urusan Pemerintahan bidang Trantibumlinmas-Sub Urusan Bencana Kabupaten Mamuju Tengah, dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:
- **Pengumpulan Data Bencana**
 - Form 5.A.1 Daftar Warga Negara Yang Berada Di Kawasan Rawan Bencana
 - Form 5.A.2 Daftar Kerawanan Tempat Tinggal Individu Warga Negara
 - Form 5.A.3 Rekapitulasi Kelompok Warga Negara Berdasarkan Kelompok Kerawanan Desa
 - Form 5.A.4 Rekapitulasi Aparat Dan Warga Negara Di Kawasan Rawan Bencana
 - Form 5.A.5 Daftar Petugas Operasi Penanganan Darurat Bencana Berdasarkan Lokasi Penugasan
 - Form 5.A.6 Rekapitulasi Warga Negara Wajib Latih
 - Form 5.A.7 Daftar Ketersediaan Peralatan Pendukung Operasi Tanggap Darurat Bencana
 - Form 5.A.8 Daftar Ketersediaan Stok Logistik Pengungsian

- Form 5.A.9 Daftar Warga Negara Yang Menjadi Korban Bencana
- Form 5.A.10 Daftar Status Korban Bencana
- Form 5.A.11 Daftar Petugas Aktif Pada Operasi Tanggap Darurat Bencana
- Form 5.A.12 Daftar Kejadian Bencana
- **Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Bencana**
 - Form 5.B.1 Penghitungan Kebutuhan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Dan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Form 5.B.2 Penghitungan Kebutuhan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
- **Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Bencana**
 - Form 5.C.1 Rencana Pemenuhan Dan Kerangka Pendanaan Untuk Pelayanan Informasi Rawan Bencana Dan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Form 5.C.2 Rencana Proyeksi Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
- **Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Bencana**
 - Form 5.D.1 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Dan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Form 5.D.2 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana.
- **Capaian Target SPM Bencana (Rekapan)**
 - Form 5.E.1 Penentuan Bobot Tertimbang (Bt) Pada Spm Sub-Urusan Bencana
 - Form 5.E.2 Rekapitulasi Kinerja Tahunan Spm Sub-Urusan Bencana
 - Form 5.E.3 Rekapitulasi Capaian Tahunan Spm Sub-Urusan Bencana

f) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Tahapan penerapan SPM urusan Pemerintahan bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah, terdiri dari tahapan pengumpulan data Sosial, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Sosial, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar Sosial, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar Sosial, dan capaian target SPM Sosial (rekapan).

Untuk lebih jelasnya mengenai tahapan penerapan SPM urusan

Pemerintahan bidang Sosial Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

- **Pengumpulan Data Sosial**

- Form 6.A.1 Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis
- Form 6.A.8 Data Dan Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasa Pada Spm Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

- **Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Palayanan Dasar Sosial**

- Form 6.B.6 Penghitungan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti
- Form 6.B.7 Penghitungan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota

- **Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Sosial**

- Form 6.C.1 Rencana Pemenuhan Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti
- Form 6.C.2 Rencana Pemenuhan Penyandang Anak Terlantar Luar Panti
- Form 6.C.3 Rencana Pemenuhan Lansia Terlantar Luar Panti
- Form 6.C.4 Rencana Pemenuhan Gelandangan Dan Pengemis Lansia Luar Panti
- Form 6.C.5 Rencana Pemenuhan Korban Bencana Alam Dan Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota

- **Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Sosial**

- Form 6.D.5 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng Diluar Panti Kabupaten Kota

- **Capaian Target SPM Sosial (Rekapan)**

- Form 6.E.1 Capaian Target Spm Sosial

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja pemerintah daerah selama periode Tahun 2024. Dalam laporan ini menguraikan berbagai indikator makro yang mencerminkan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan di Mamuju Tengah. Capaian indikator-indikator ini merupakan hasil dari berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan, serta mencerminkan dinamika pembangunan daerah secara keseluruhan. Evaluasi capaian indikator makro ekonomi dan sosial di Kabupaten mamuju Tengah tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
Evaluasi Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Perubahan (%)
		2023	2024	
1	Pertumbuhan Ekonomi	2,80	2,98	6,43
2	Pendapatan Per Kapita	28,53	31,39	10,02
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,83	1,70	7,10
4	Angka Kemiskinan	7,32	7,72	5,46
5	Indeks Pembangunan Manusia	67,63	68,53	1,33

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju Tengah, 2025

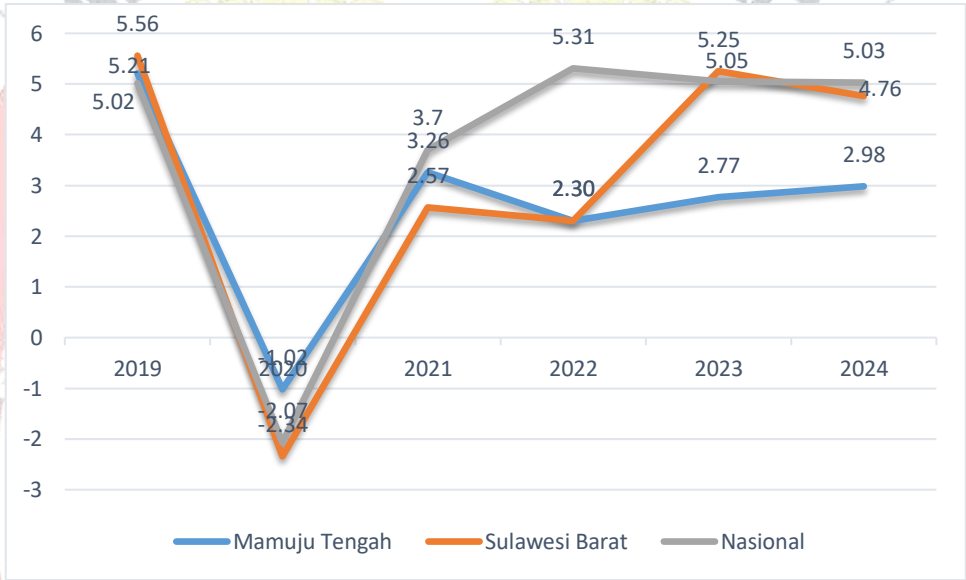
Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 6,43 persen dari tahun 2023 2,80 persen menjadi 2,98 persen. Pendapatan per Kapita tahun 2024 meningkat sebesar 10,02 persen dari 28,53 juta rupiah di tahun 2023 menjadi 31,39 juta rupiah pada tahun 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun 7,10 persen dari tahun sebelumnya menjadi 1,70 persen. Angka Kemiskinan mengalami kenaikan 5,46 persen dari tahun 2023 7,32 persen menjadi 7,72 persen di tahun 2024. Indeks Pembangunan Manusia meningkat 1,33 persen dari 67,63 menjadi 68,53 pada tahun 2024.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator asumsi dasar ekonomi makro utama yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai dasar untuk menghitung target-target pembangunan di tahun berikutnya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 mengalami peningkatan 0,18 poin dari tahun 2023. Sejak pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami perlambatan.

Gambar 2. 1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Kabupaten Mamuju Tengah, data diolah, 2025

Dari Gambar diatas, dapat dilihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten mamuju Tengah selama kurun waktu 2019-2024. Terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Mamuju Tengah masih di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional. Akan tetapi tren kenaikan positif mulai terlihat dari tahun 2022-2024.

Nilai PDRB ADHB pada tahun 2024 mencapai Rp. 4554,87 miliar and PDRB ADHK mencapai Rp. 2.469,05 miliar. Distribusi terbesar yang mendorong pertumbuhan ekonomi Mamuju Tengah dari sisi lapangan usaha yakni sektor pertanian yang berkontribusi sebesar 74,18 persen, sedangkan dari komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi adalah pengeluaran konsumsi LNPRRT yaitu 14,19 persen.

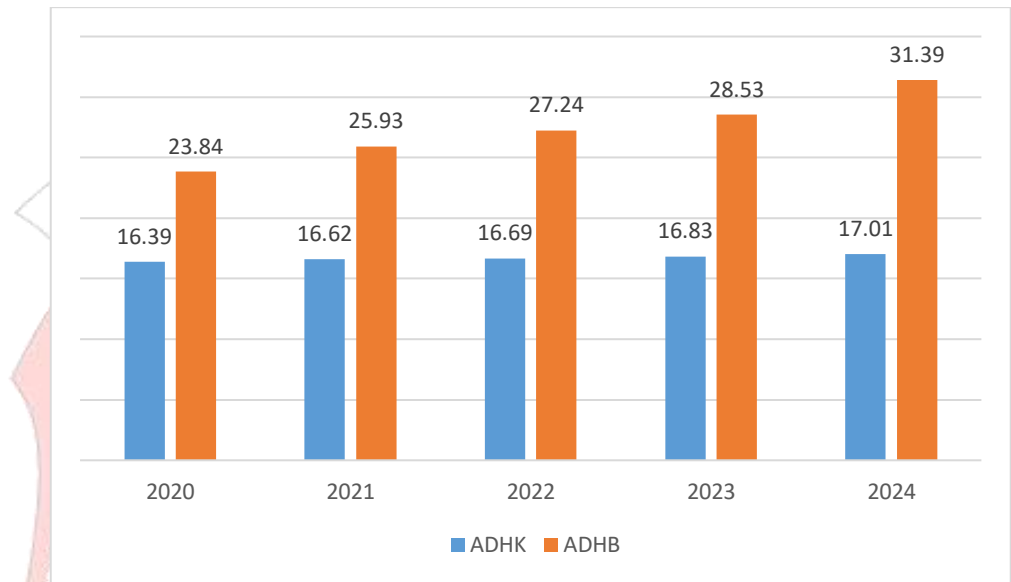
2.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita adalah salah satu indikator ekonomi penting untuk mengukur tingkat pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah dalam

periode tertentu. PDRB per Kapita diperoleh dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk.

PDRB Per Kapita Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Perkembangan kenaikan PDRB per Kabita di Mamuju Tengah dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 2. 2
Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Mamuju Tengah, 2025

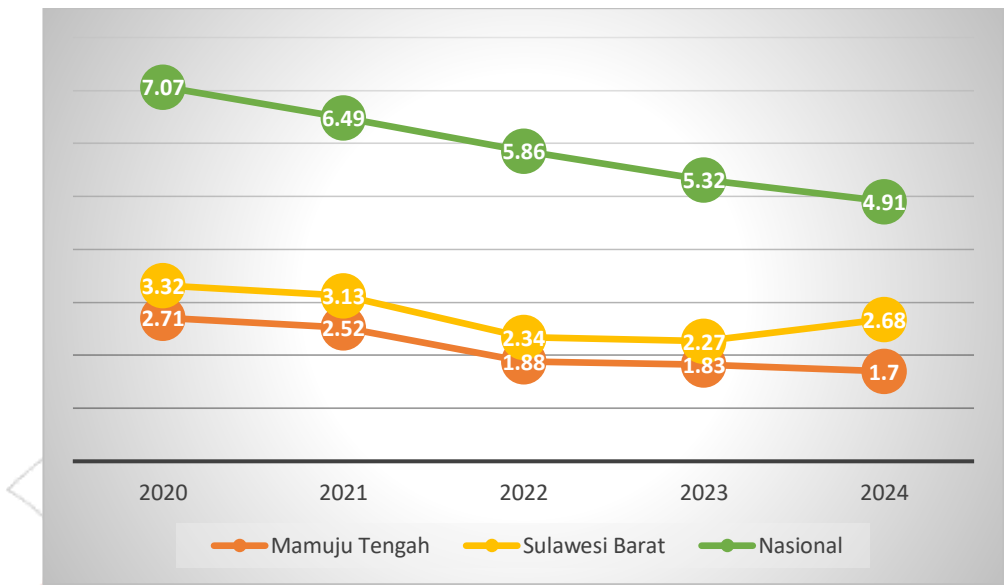
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan sebesar 31,66 persen dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dari tahun 2020 sebesar Rp.23,84 menjadi Rp.31,39 juta pada tahun 2024. Sedangkan untuk PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami peningkatan sebesar 3,7 persen dari tahun 2020 sebesar Rp. 16,39 juta menjadi Rp.17,01 juta. Nilai ini masih jauh dibawah PDRB Per Kapita Provinsi Sulawesi Barat yang mencapai Rp. 42,72 juta pada tahun 2024.

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang mengukur proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. TPT dihitung sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 mengalami penurunan sekitar 7,10 persen dari tahun sebelumnya dari 1,83 persen pada tahun 2023 menjadi 1,70 persen di tahun 2024. TPT Kabupaten mamuju Tengah berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional.

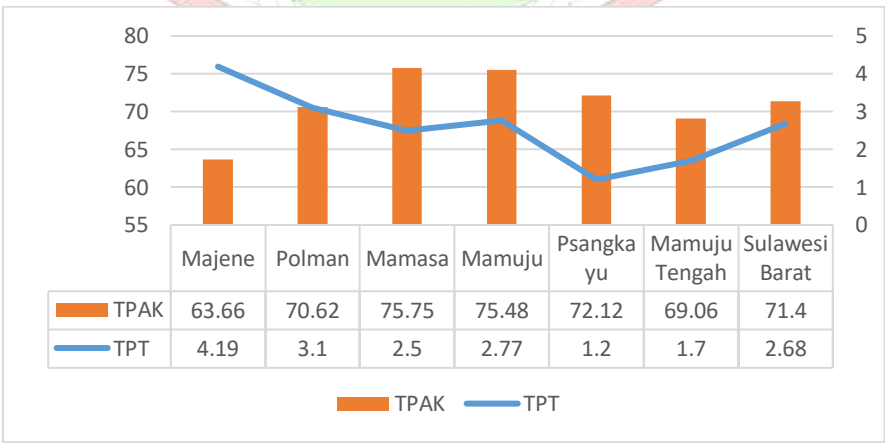
Gambar 2. 3
Tingkat Pengangguran Kabupaten Mamuju Tengah , Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Di provinsi Sulawesi Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten mamuju Tengah merupakan yang kedua terendah setelah Kabupaten Pasangkayu. Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 71.729 orang, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,06 persen. Penduduk yang Bekerja sebanyak 70.501 orang dengan Pengangguran Terbuka sebanyak 1.219 orang. Penduduk yang Bekerja didominasi pada lapangan kerja sektor informal yakni sebanyak 56.799 orang atau 80,55 persen dari TPAK, sedangkan yang bekerja pada sektor formal sebanyak 13.711 orang atau 19,45 persen dari TPAK.

Gambar 2. 4
Kondisi Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

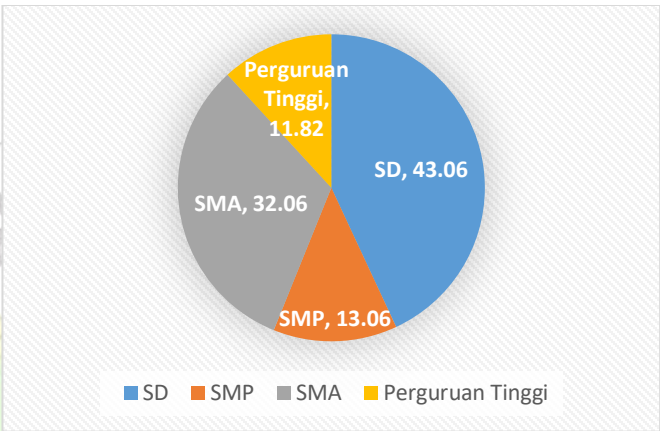


Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Menurut tingkat pendidikan, angkatan kerja di Kabupaten Mamuju Tengah

didominasi oleh mereka yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD sebesar 43,06 persen, lulusan SMA (32,06 persen) lebih banyak jika dibandingkan lulusan SMP (13,06 persen) dan lulusan perguruan tinggi sebesar 11,82 persen dari total angkatan kerja.

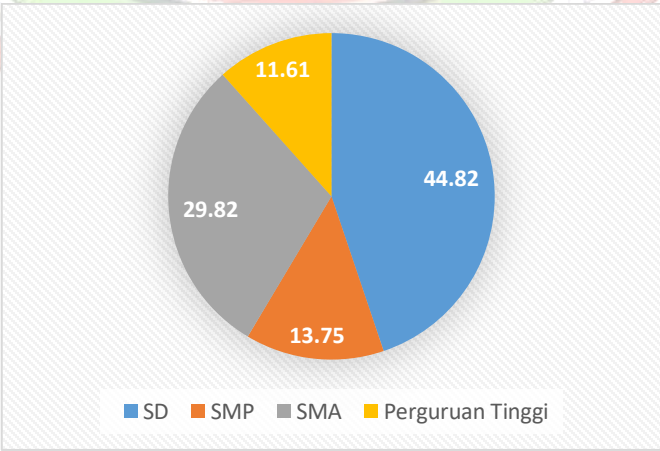
Gambar 2. 5
Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2024

Melihat lebih rinci pada penduduk 15 tahun ke atas yang berstatus bekerja, menurut tingkat pendidikannya masih didominasi oleh mereka yang berijazah paling tinggi SD. Bahkan, jumlahnya hampir separuh dari total penduduk yang Bekerja. Hal ini dapat menjadi indikasi rendahnya kualitas pekerja di Kabupaten Mamuju Tengah. Hal ini juga yang mempengaruhi besaran upah yang diterima oleh pekerja yang tentu akan mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran per kapita.

Gambar 2. 6
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

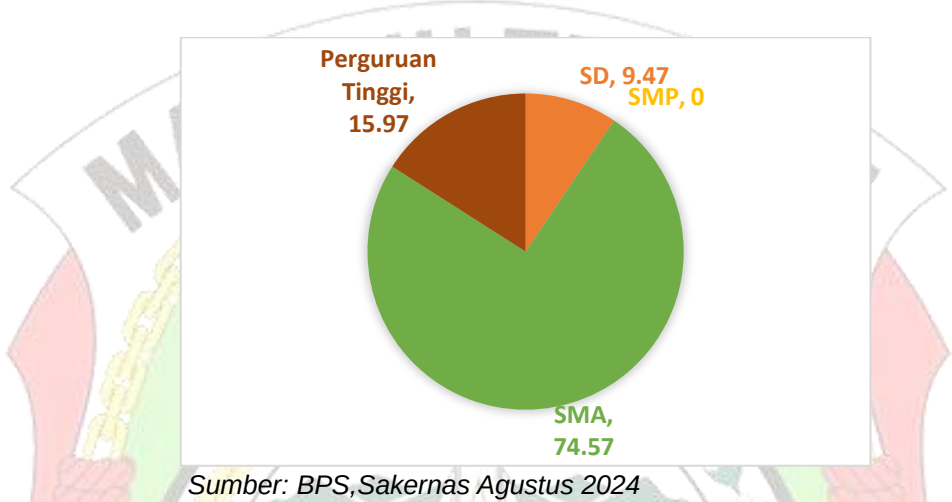


Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2024

Sementara itu, yang berstatus pengangguran terbuka, terjadi kontraposisi karena hampir seluruhnya dari penduduk lulusan SMA bahkan menyentuh angka 74,57 persen. Hal ini dapat dipengaruhi selain oleh keengganan

lulusan SMA untuk langsung bekerja karena pilihan apakah ingin melanjutkan sekolah atau tidak, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh pilihan pekerjaan apa yang ingin digeluti, di sisi lain keterampilan yang dimiliki juga tidak sesuai dengan pasar tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa orang-orang dengan pendidikan yang lebih tinggi akan cenderung lebih selektif dalam memilih pekerjaan (Wekke dkk, 2017).

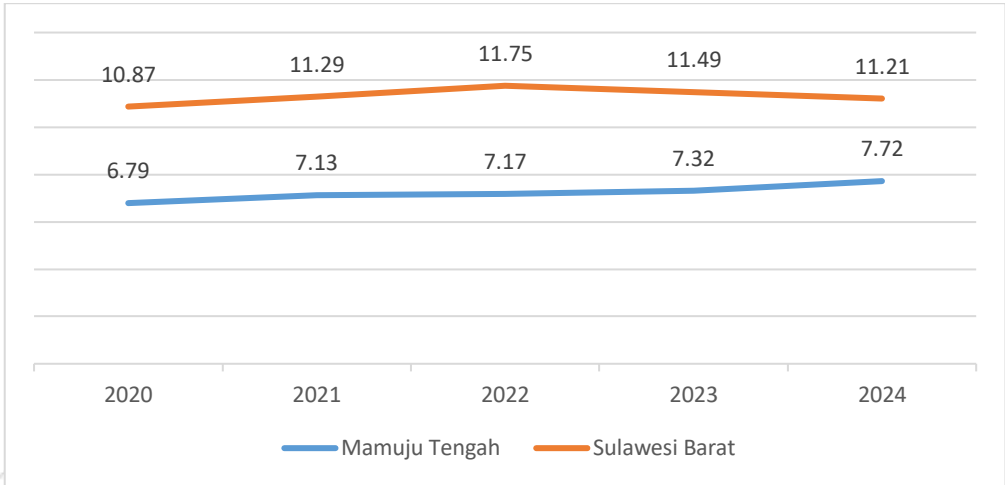
Gambar 2. 7
Persentase Penduduk Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024



2.1.4 Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu wilayah. Secara umum, kemiskinan merujuk pada kondisi ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Angka Kemiskinan biasanya dinyatakan dalam persentase, yang menunjukkan proporsi pendudukan yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan adalah batas minimum pendapatan atau pengeluaran yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tingkat Kemiskinan di Mamuju Tengah mengalami kenaikan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat, kemiskinan Mamuju Tengah masih dibawah rata-rata provinsi. Akan tetapi, di tahun 2022-2024 kemiskinan provinsi menurun, sedangkan kemiskinan Mamuju Tengah terus mengalami kenaikan. Secara absolut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Tengah meningkat dari 10,39 ribu jiwa di tahun 2023 menjadi 11,16 ribu jiwa di tahun 2024 atau naik 5,46 persen dari tahun sebelumnya menjadi 7,72 persen.

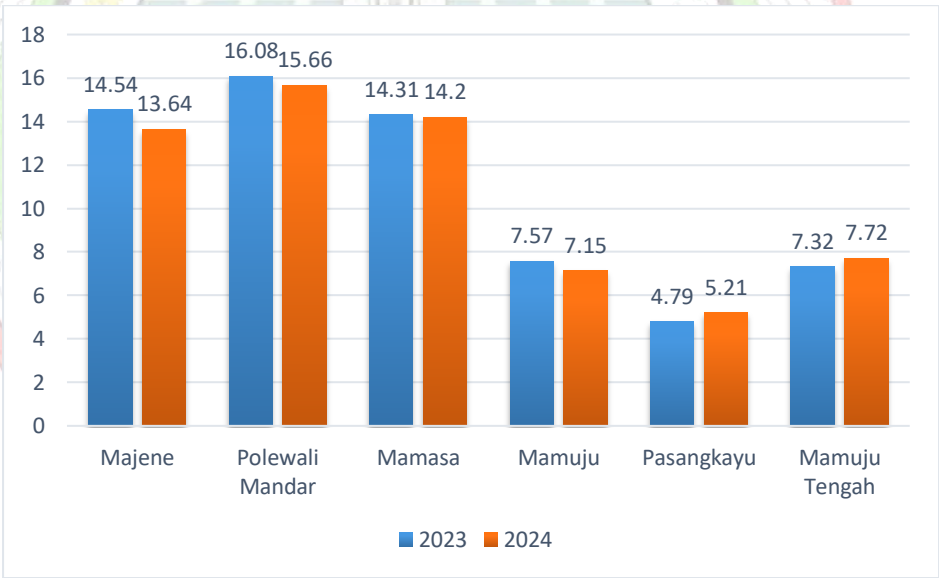
Gambar 2. 8
Tingkat Kemiskinan di Mamuju Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

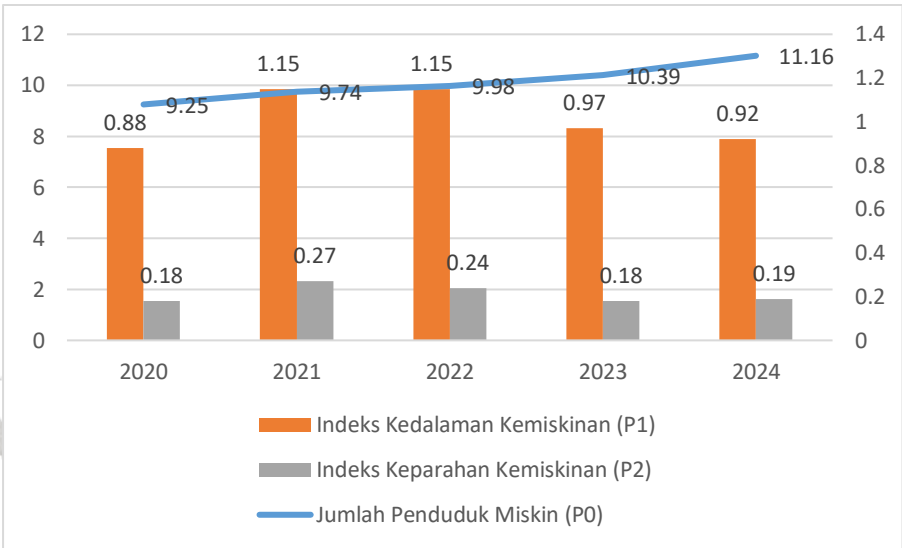
Jika dibandingkan antar kabupaten di Sulawesi Barat, tingkat kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah masih lebih rendah jika dibandingkan tiga kabupaten lainnya.

Gambar 2. 9
Perbandingan Tingkat Kemiskinan antar Kabupaten di Sulawesi Barat
Tahun 2023-2024



Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Gambar 2. 10
Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks
Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024



Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

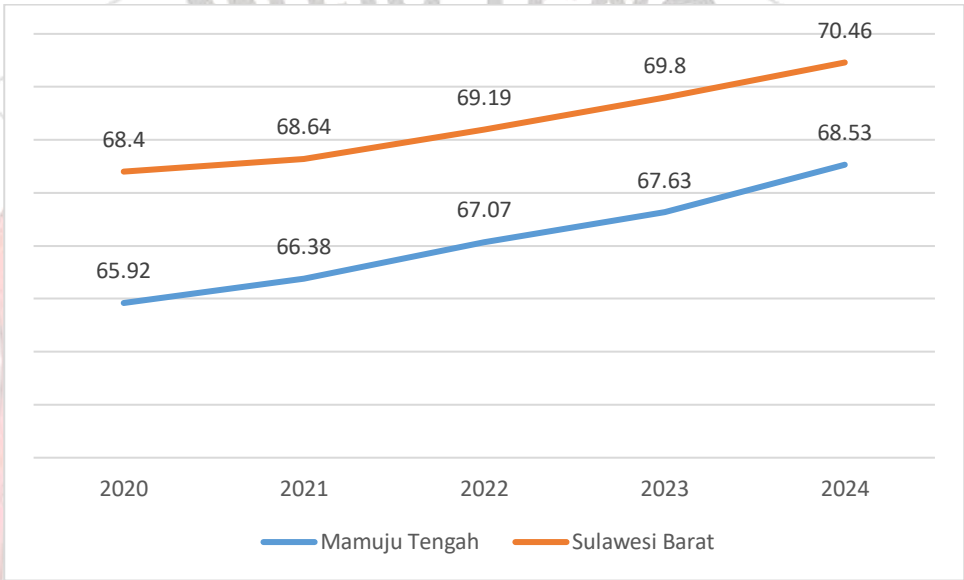
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin (P0) cenderung meningkat, tetapi kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) cenderung menurun. P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai P1 Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 adalah sebesar 0,92. Hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Tengah terhadap Garis Kemiskinan dapat dikatakan cukup jauh (melewati 1). P2 memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. menurunnya nilai P2 mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan. Nilai P2 Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 adalah 0,19 yang artinya ketimpangan pengeluaran per kapita penduduk miskin masuk dalam kategori sedang. Hal ini mengindikasikan upaya penanggulangan kemiskinan mungkin berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang paling dalam, tetapi belum berhasil dalam mencegah penduduk yang rentan miskin untuk tetap berada di atas garis kemiskinan seiring dengan meningkatnya Garis Kemiskinan dari Rp. 309.227 di tahun 2023 menjadi Rp. 324.888 pada tahun 2024.

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta

standar hidup layak. Hasil pembangunan manusia dapat dilihat melalui indikator yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2024 , pencapaian Indeks Pembangunan Manusia tercatat sebesar 68,53 poin indeks. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,9 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai IPM Mamuju Tengah pada tahun 2024 masih termasuk kategori sedang. Namun demikian, IPM Mamuju Tengah masih berada dibawah IPM Sulawesi Barat.

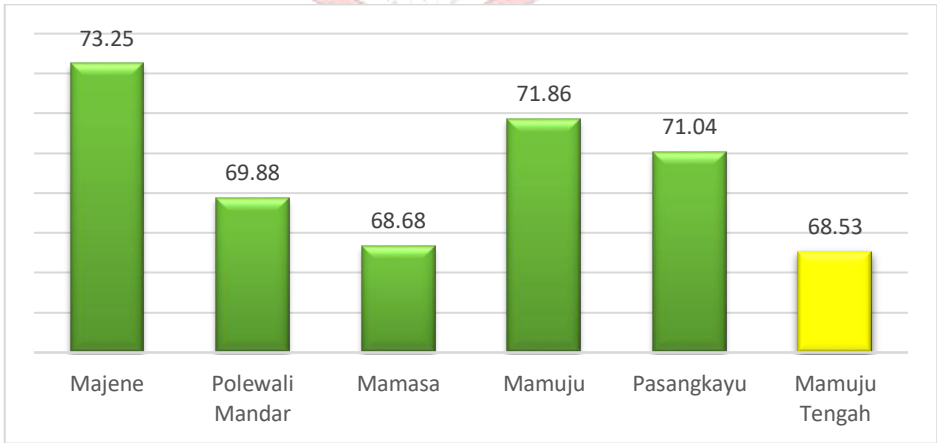
Gambar 2. 11
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Jika dibandingkan dengan capaian IPM setiap kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat, IPM Mamuju Tengah berada di posisi ke enam dari enam kabupaten di Sulawesi Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Mamuju Tengah di Sulawesi Barat harus lebih meningkatkan lagi IPM di Mamuju Tengah.

Gambar 2. 12
Perbandingan IPM Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024



Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Perhitungan IPM pada tahun 2023 dan 2024 mengikuti metode baru dengan menyesuaikan Angka Harapan Hidup berdasarkan Hasil Long Form tahun 2020. Indeks Pembangunan Manusia disusun atas 3 dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak.

A. Pendidikan

Dimensi pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM, memiliki dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). HLS memberikan gambaran lama sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah memberikan gambaran jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat suatu wilayah.

Harapan Lama Sekolah Mamuju Tengah pada tahun 2024 mencapai 12,68 tahun, berarti secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,68 tahun atau setara dengan Diploma I. Selama periode 2013-2024, HLS di Mamuju Tengah meningkat sebesar 1,57 tahun.

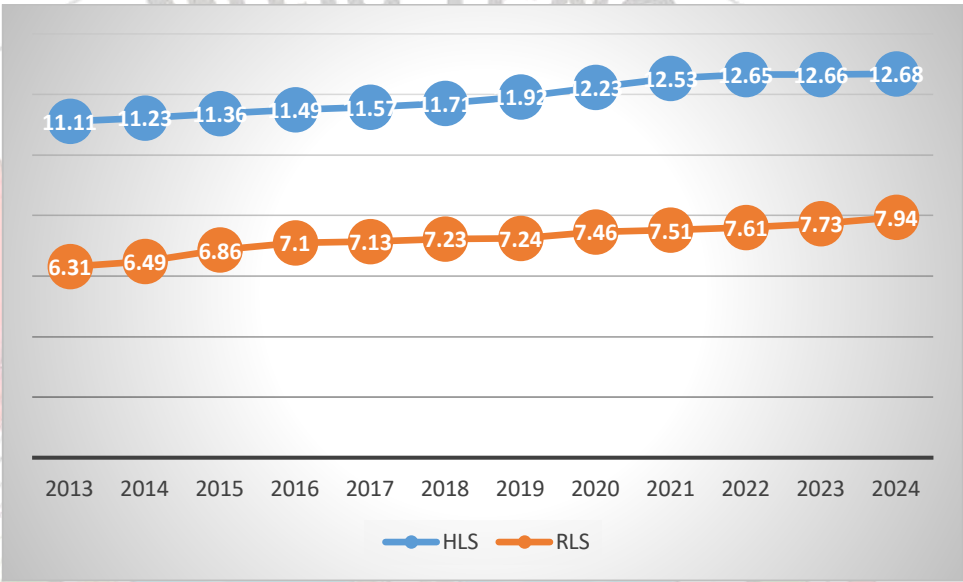
Selama periode 2013-2024, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,21 persen. Meningkatnya harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang telah semakin membaik.

Rata-rata Lama Sekolah Mamuju Tengah pada tahun 2024 mencapai 7,94 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 7,94 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII. Selama periode 2013 sampai 2024, RLS Mamuju Tengah rata-rata tumbuh sekitar 2,11 persen. Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang merupakan modal penting dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

Terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah. Hal ini menunjukkan potensi yang dimiliki Mamuju Tengah cukup tinggi yaitu Harapan Lama Sekolah yang mencapai 12,68 tahun atau setara dengan jenjang perkuliahan Diploma I. namun pada kenyataannya

Rata-rata Lama Sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk yaitu sebesar 7,94 tahun atau setara jenjang SMP kelas 2. Hal ini perlu mendapat mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya dengan menangani penduduk putus sekolah agar dapat tertampung dalam program paket yang nantinya jika lulus akan memperoleh ijazah yang setara.

Gambar 2. 13
Perkembangan HLS dan RLS Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2024



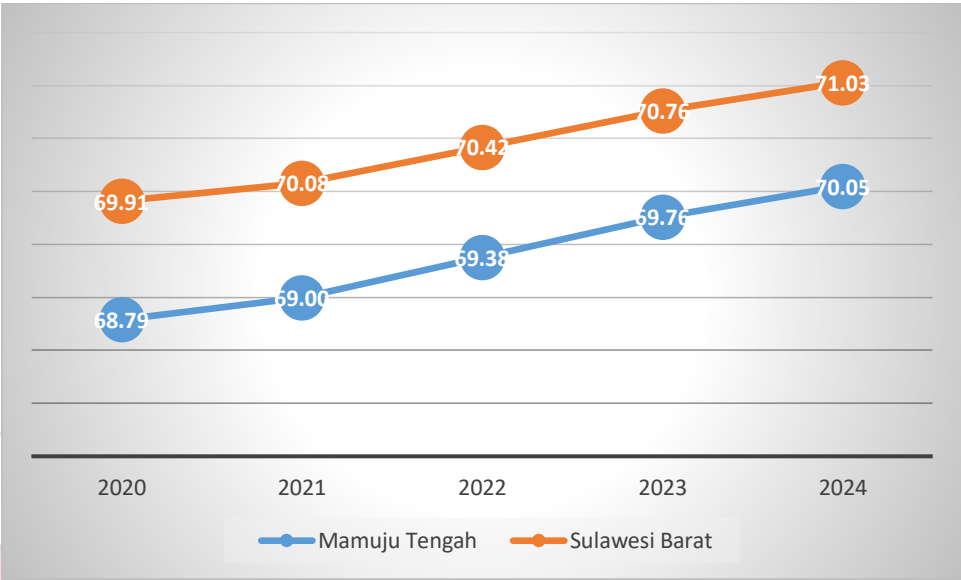
Sumber: BPS Mamuju Tengah, 2025

B. Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang mencerminkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. Harapan hidup saat lahir menunjukkan derajat kesehatan suatu wilayah. Semakin tinggi harapan hidup saat lahir suatu wilayah, semakin tinggi pula derajat kesehatan suatu wilayah.

Capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 yaitu 70,05 tahun. Nilai ini meningkat sebesar 0,29 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2023. AHH mencerminkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. Artinya, secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 70,05 tahun. Namun demikian, AHH Mamuju Tengah masih berada dibawah capaian AHH Provinsi Sulawesi Barat.

Gambar 2. 14
Angka Harapan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Mamuju Tengah, 2025

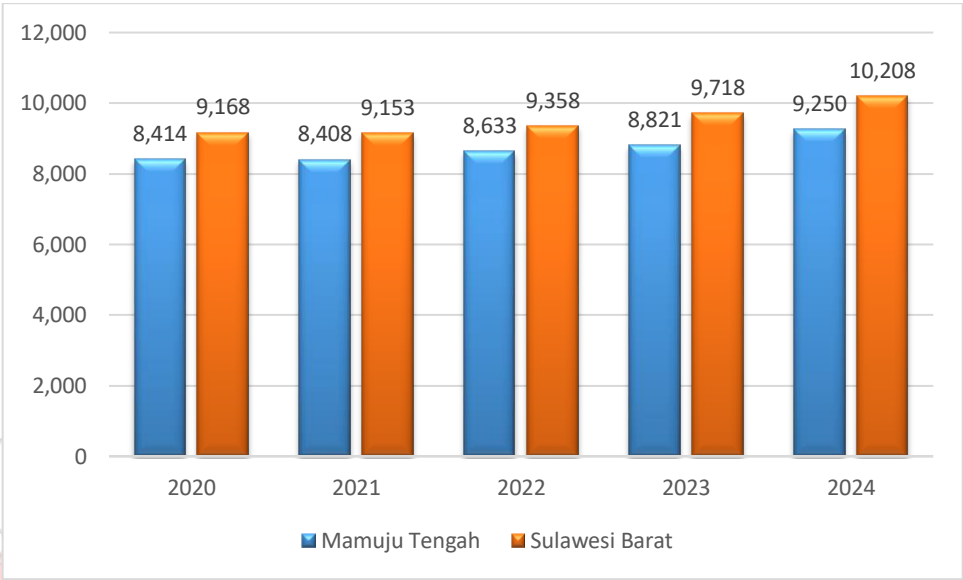
Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir memiliki hubungan yang erat dengan Angka Kematian Bayi. Angka Kematian Bayi (AKB) digunakan untuk mencerminkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin tinggi AHH maka semakin rendah tingkat kematian bayi. Rendahnya angka kematian bayi sejalan dengan rendahnya pelayanan kesehatan di masyarakat dan ketidakmampuan secara ekonomi.

Angka Kematian Bayi dapat dilihat dari tenaga penolong persalinan. Penolong persalinan menjadi faktor penting dalam menentukan keselamatan ibu dan bayinya. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis akan lebih aman dibandingkan dengan persalinan yang ditolong oleh tenaga non medis seperti dukun. Dengan ditolong oleh tenaga medis maka harapan angka kematian bayi akan semakin berkurang dan kesehatan reproduksi semakin meningkat. Peningkatan pelayanan tenaga medis dalam persalinan ini sangat berpengaruh pada angka harapan hidup di Mamuju Tengah.

C. Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) yang disesuaikan. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk mendukung standar hidup layak.

Gambar 2. 15
Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan (ribu rupiah) Mamuju Tengah dan Sulawesi Barat Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 sebesar Rp. 9.250 juta per tahun. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, pengeluaran per kapita Mamuju Tengah meningkat Rp. 429.000. Pada saat pandemi Covid-19 pengeluaran per kapita menurun, akan tetapi sejak kurun waktu tiga tahun terakhir mulai mengalami peningkatan kembali seiring pemulihan ekonomi. Secara rata-rata pengeluaran per kapita Mamuju Tengah masih dibawah Provinsi SulawesiBarat.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Outcome

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	5.302,00	91,70
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan	5.782,00	
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	16.174,00	96,64
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan	16.736,00	
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	6.260,00	79,32
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan	7.892,00	
1.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	2.932,00	86,39
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan	3.394,00	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan	154,00	1,06
				Jumlah Penduduk di kabupaten/kota	144.810,00	
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	1,00	100,00
				Jumlah RS di kabupaten/kota	1,00	
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1.945,00	68,80
				Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	2.827,00	
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	2.184,00	77,75
				Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	2.809,00	
1.b.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	2.225,00	82,99
				Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	2.681,00	
1.b.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	10.462,00	80,64
				Jumlah balita di kabupaten/kota	12.973,00	
1.b.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	22.262,00	90,39
				Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota	24.628,00	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
1.b.8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	79.676,00	85,03
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	93.699,00	
1.b.9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	9.614,00	95,50
				Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota	10.067,00	
1.b.10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.626,00	86,75
				Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	6.485,00	
1.b.11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.716,00	82,66
				Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	2.076,00	
1.b.12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	223,00	100,00
				Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	223,00	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
1.b.13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.753,00	100,00
				Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	2.753,00	
1.b.14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	3.782,00	100,00
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	3.782,00	
1.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	0,00	0,00
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	1,00	
1.c.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)	0,00	0,00
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)	1,00	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
1.c.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting	3.917,00	100,00
				luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	3.917,00	
1.c.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	24.129,00	83,68
				Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.	28.834,00	
1.c.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	22.265,00	77,22
				Jumlah rumah di Kabupaten	28.834,00	
1.c.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya	93,00	100,00

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
	Pelayanan Dasar			Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	93,00	
1.c.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap	108,55	24,55
				Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota	442,18	
1.c.8.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	54,00	73,97
				Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	73,00	
1.c.8.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi	86,00	100,00
				Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	86,00	
1.d.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	2,00	100,00
				Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	2,00	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
1.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	8,00	100,00
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	8,00	
1.d.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	62,94	87,04
				Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	72,31	
1.d.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	7.847,00	20,30
				Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	38.657,00	
1.d.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	1.623,00	100,00
				Jumlah unit rumah kab/kota	1.623,00	
1.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	2,00	100,00
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	2,00	
1.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	7,00	100,00
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	7,00	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	16.873,00	17,28
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	97.644,00	
1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00	0,07
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	143.274,00	
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	19,00	100,00
				Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	19,00	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
1.e.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	10,00	62,50
				Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	16,00	
1.e.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	12,18	12,18
1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	145,00	100,00
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	145,00	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	25,00	100,00
				Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	25,00	
2.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	3,00	75,00
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	4,00	
2.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	38,00	1,12
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan	3.401,00	
2.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	2.469.050.000.000,00	72597765363,13
				Jumlah tenaga kerja	3.401,00	
2.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	154,00	30,02
				Jumlah Perusahaan	513,00	
2.a.5	Urusan Pemerintahan	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	247,00	36,27

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
	Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar		negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker yang terdaftar	681,00	
2.g.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD	12.459.332.433,00	1,99
				Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD	626.340.061.312,10	
2.g.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	22,00	100,00
				Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	22,00	
2.g.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	21,00	30,14
				Jumlah penduduk perempuan	69.665,00	
2.h.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	45,42	113,55
				Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan	40,00	
2.i.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	30.369.901,00	99,13

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
	Berkaitan Pelayanan Dasar		izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	30.636.085,00	
2.i.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	29.816,00	100,00
				Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	29.816,00	
2.i.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	796.272,60	79,57
				Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	1.000.681,50	
2.i.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	4.106.078,00	97,23
				Jumlah penerima tanah obyek landreform	4.223.125,00	
2.i.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah	0,00	0,00
				Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	1,00	
2.i.6	Urusan Pemerintahan	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	1,00	100,00

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
	Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar		mediasi	Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	1,00	
2.j.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	73,32	73,32
2.j.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani	5.110,00	24,99
				Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota	20.444,09	
2.j.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota	0,00	0,00
				usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	1,00	
2.k.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	95.858,00	97,50
				Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	98.314,00	
2.k.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	21.073,00	45,32
				Jumlah anak usia 0-17 tahun	46.499,00	
2.k.1.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	48.532,00	98,88
				Jumlah anak usia 0-18 tahun	49.084,00	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
	Pelayanan Dasar					
2.k.1.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	27,00	84,38
				Jumlah PD	32,00	
2.l.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	4,00	57,14
				Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	7,00	
2.l.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	1,00	3,13
				Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	32,00	
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,59	2,59
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern	14.542,00	63,23
				Jumlah Pasangan Usia Subur	22.997,00	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	2.182,00	9,49
				Jumlah Pasangan Usia Subur	22.997,00	
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,614	0,61
2.n.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,55	0,55
2.o.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	28,00	84,85
				Jumlah PD	33,00	
2.o.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	3,00	75,00
				Jumlah Layanan Publik	4,00	
2.o.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	36.030,00	36,12
				Jumlah penduduk	99.750,00	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
2.p.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset	9,00	75,00
				Jumlah seluruh koperasi aktif	12,00	
2.p.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	1.819,00	38,86
				Jumlah usaha mikro keseluruhan	4.681,00	
2.q	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota	34.893.224.111,00	5,93
				Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	588.443.667.356,00	
2.r.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota	175,00	0,44
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	39.458,00	
2.r.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	2.592,00	6,57
				jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	39.458,00	
2.r.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	4,00	4,00

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
2.s.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	33,00	100,00
				jumlah PD	33,00	
2.s.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	33,00	100,00
				jumlah PD	33,00	
2.t	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	99,00	15,35
				Jumlah area penilaian	645,00	
2.u	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	2,00	66,67
				Jumlah cagar budaya yang terdata	3,00	
2.v.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	51,82	51,82
2.v.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	10,44	10,44

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
2.w.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	47,00	47,00
2.w.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	61,00	61,00
3.a	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	5.088,66	110,06
				Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	4.623,54	
3.b.1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	-1,00	-100,00
				Jumlah wisatawan tahun n-1	1,00	
3.b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	7.728,00	15,50
				Jumlah wisatawan tahun n-1	49.853,00	
3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	26.640,00	19,41
				Jumlah kamar yang tersedia	137.240,00	
3.b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	8.930.000.000,00	0,20

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
				Total PDRB Berlaku	4.554.870.000.000,00	
3.b.5	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata	1.039.415.551,00	2,01
				Total realisasi PAD	51.807.356.237,52	
3.c.1	Urusan Pilihan	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	31.256,00	488,99
				luas panen	6.392,00	
3.c.2	Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	-30,00	-20,98
				Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	143,00	
3.d	Urusan Pilihan	Kehutanan			100,00	100,00
3.e	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	0,00	0,00
				Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	1,00	
3.f.1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	6,00	60,00
				Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota	10,00	
3.f.2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	8.109,30	65,79
				RDKK	12.326,00	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
3.f.3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	51,00	7,08
				jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	720,00	
3.g.1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1)	62,00	30,24
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	205,00	
3.g.2	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jumlah Target Jenis Industri Prioritas kab/kota yang ditetapkan	0,00	0,00
				Jumlah Realisasi Jenis Industri Prioritas kab/kota	1,00	
3.g.3	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	5,00	100,00
				Jumlah izin yang dikeluarkan	5,00	
3.g.4	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0,00	0,00

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
			oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dikeluarkan	1,00	
3.g.5	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0,00	0,00
				Jumlah izin yang dikeluarkan	1,00	
3.g.6	Urusan Pilihan	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	7 Informasi industri secara lengkap dan terkini	75,00	75,00
3.h	Urusan Pilihan	Transmigrasi			100,00	100,00
4.a.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	224.098.755.376,00	32,14
				Jumlah APBD	697.199.722.327,00	
4.a.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Jumlah PAD	51.807.356.237,52	7,74
				Jumlah Pendapatan pada APBD	669.685.234.907,52	
4.a.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3,00	3,00

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
4.a.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3,00	3,00
4.a.5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures	427.177.213.196,00	61,27
				jumlah belanja APBD	697.199.722.327,00	
4.a.6	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	9,00	9,00
4.b.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	0,00	0,00
				jumlah kontrak keseluruhan tahun n	1,00	
4.b.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	104.026.598.898,00	58,40
				Jumlah seluruh pengadaan	178.139.569.584,00	
4.b.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan	178.139.569.584,00	46,41
				total belanja operasi dan modal	383.802.198.151,00	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
4.b.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	107.042.891.003,00	93,45
				Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	114.543.629.296,00	
4.c.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas	693,00	90,59
				Jumlah seluruh pegawai	765,00	
4.c.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	366,00	47,84
				seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	765,00	
4.c.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	244,00	66,67
				seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	366,00	
4.d.1	Fungsi Penunjang Urusan	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	697.199.722.327,00	0,84

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	2024	
					Elemen data	Capaian Kinerja
	Pemerintahan		belanja total dalam APBD	Total belanja APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)	691.421.652.801,00	
4.d.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	51.807.356.497,52	13,72
				Total PAD dalam APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)	45.557.332.856,00	
4.d.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset	Manajemen Aset	4,00	4,00
4.d.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA	41.381.753.452,10	6,13
				total belanja anggaran tahun sebelumnya	674.664.560.084,00	
4.e.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	67.630.743.834,00	97,42
				Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	69.421.858.965,60	
4.e.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	9,00	75,00
				total jumlah dokumen yang telah dirinci	12,00	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.3.1 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerinth daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang ditampilkan pada Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	terpenuhinya infrastruktur dasar untuk pemerataan pembangunan	1	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai Indeks	$(\text{BxN kemantapan jalan kabupaten} + \text{BxN Akses Air Minum Layak} + \text{BxN Akses Sanitasi Layak} + \text{BxN Pemukiman layak huni} + \text{BxN Rumah Layak Huni} / 5) \times 100\%$	Laporan Kinerja Dinas PU dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Meningkatnya daya Saing Sumber Daya Manusia	2	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	$(\text{BxN Angka Rata-rata Lama Sekolah} + \text{BxN Angka Harapan Lama Sekolah} + \text{BxN Angka Harapan Hidup} + \text{BxN Pengeluaran Perkapita} / 4) \times 100\%$	BPS Kabupaten Mamuju Tengah
		3	Prevalensi Stunting	Persen	$\text{Jumlah anak balita stunting pada tahun n} / \text{total jumlah anak balita yang diperiksa pada tahun n} \times 100\%$	Dinas Kesehatan

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
3	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	4	Angka kemiskinan (persen)	Persen	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - y_i}{Z} \right]^{\alpha}$ Dimana: $\alpha = 2$ Z = garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < Z$ q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk	BPS Kabupaten Mamuju Tengah
		5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Dimana: TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) PP = Jumlah Pengangguran (orang) PAK = Jumlah Angkatan Kerja (orang)	BPS Kabupaten Mamuju Tengah
4	Berkembangnya kawasan agropolitan berbasis kota terpadu mandiri	6	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	$R_{(t-1,t)} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ Dimana: $(t-1,t)$ = laju pertumbuhan ekonomi (%) $PDRB_t$ = Jumlah PDRB tahun t (Rp) $PDRB_{t-1}$ = Jumlah PDRB tahun $t-1$ (Rp)	BPS Kabupaten Mamuju Tengah
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	7	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Laporan Hasil Evaluasi KemenPAN RB	KemenPAN RB
		8	Nilai LPPD	Nilai	Hasil evaluasi LPPD	Bagian Pemerintahan Setda

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		9	Opini BPK	Kategori	Hasil evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKPAD
6	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	10	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	Persen	$PG\ K3 = \frac{GK3_{n-1} - GK3_n}{GK3_{n-1}} \times 100\%$ Dimana: PG K3 = Penurunan gangguan K3 GK3 _{n-1} = Jumlah gangguan K3 tahun sebelumnya GK3 _n = Jumlah gangguan K3 tahun ini	SATPOL
7	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati daerah	11	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (Nilai)	Nilai Indeks	$IKLHD = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ Dimana: IKA: Indeks Kualitas Air IKU: Indeks Kualitas Udara IKL: Indeks Kualitas Lahan	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : Bagian Organisasi, 2025

2.3.2 Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Target-target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 diukur dan dianalisis tingkat keberhasilan atau kegagalan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang tercermin dalam capaian sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidak berhasilan sasaran program dilakukan dengan mengukur indikator sasaran program yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran strategis. Analisis capaian sasaran program difokuskan pada IKU yang merupakan indikator kinerja yang terkait langsung terhadap pencapaian sasaran program dan sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Dalam tabel berikut terdapat data Pengukuran Kinerja Tahun 2024, yaitu:

Tabel 2.3
Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pemerintah
Kabupaten Mamuju Tengah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA	TARGET
1	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Untuk Pemerataan Pembangunan	Indeks Infrastruktur Daerah	78,08
2	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	67,46
		Prevalensi Stunting	14
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Angka Kemiskinan	5,17
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1,80
4	Perkembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	Pertumbuhan Ekonomi	5,17
5	Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	CC
		NILAI LPPD	2,99
		OPINI BPK	WTP

6	Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	100%
7	Terpeliharabya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Iklhd)(Nilai)	79

Sumber: Bagian Organisasi, 2025

2.3.3 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

A. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator- indikator *outcome* atau *output* dari masing-masing kegiatan yang terkait dengan sasaran yang diinginkan.

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, hal ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Capaian indikator kinerja

=

Realisasi

Target

x 100%

- b) Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Capaian Indikator Kinerja

=

Rencana - (Realisasi-Rencana)

Rencana

x100 %

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.4
Skala yang digunakan bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif dan Negatif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik Sekali
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Cukup
5	<55	Kurang

B. Pengukuran Kinerja

Tabel 2.5
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Untuk Pemerataan Pembangunan	Indeks Infrastruktur Daerah	78,8	-	-
2	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	67,46	68,53	101,58
		Prevalensi Stunting	14	16,73	80,5
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Angka Kemiskinan	5,17	7,72	50,67
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1,80	1,70	105,5
4	Perkembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	Pertumbuhan Ekonomi	5,17	2,98	57,64

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
5	Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	CC
		NILAI LPPD	2,99	-	-
		OPINI BPK	WTP	-	-
6	Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	100	100	100
7	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragama n Hayati Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Iklhd)(Nilai)	75,59	73,32	92,82

Sumber : Bagian Organisasi, 2025



2.3.4 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tabel 2.6
Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis 1
Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Untuk Pemerataan Pembangunan

No	IKU	satu an	Kondisi awal 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Infrastru ktur Daerah	%	65,13	73,41	62,08	84,57	63	52	82,53	76,3	68,88	90,27	78.8	-	-

Sumber : Bagian Organisasi, 2025

Terpenuhinya infrastruktur dasar untuk pemerataan pembangunan dapat dilihat melalui indeks infrastruktur daerah yang selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini membuktikan keberhasilan dalam pemerataan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah.

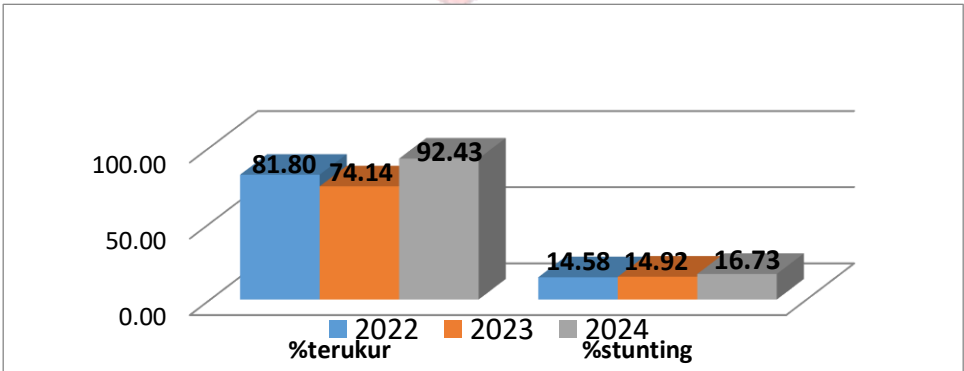
a. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sasaran ini diukur oleh dua indikator yaitu indeks Pembangunan Manusia dan Prevelensi Stunting. Indeks Pembangunan manusia mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan tercapainya target pada tahun 2024 dengan capaian 101,58% atas realisasi 68,53%. Adanya peningkatan capaian pada tahun 2024 dapat dibuktikan dengan membandingkan hasil capaian pada tahun sebelumnya yaitu realisasi sebesar 67,45%. Berdasarkan perbandingan ini dapat dikatakan bahwa realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan 1,08% dibandingkan realisasi tahun 2023. Sedangkan prevelensi Stunting tahun 2024 berada pada angka 16,73% dengan capaian kinerja 80,5%. Terjadi peningkatan jumlah prevelensi stunting di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 1,84% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 14,89%.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat angkanya pada Tahun 2024 dan sudah melebihi dari target akhir RPJMD. Realisasi pada tahun 2024 lebih tinggi 0,84% dari target kondisi akhir Tahun 2026 sebesar 67,69. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan suatu wilayah dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. IPM Mamuju Tengah Tahun 2024 menduduki peringkat terakhir Kabupaten di Sulawesi Barat.

Hasil pembangunan manusia dapat dilihat melalui indikator yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2024 pencapaian Indeks Pembangunan Manusia tercatat sebesar 68,53 dengan kategori capaian “Sangat Baik Sekali”. Kemudian pada Prevelensi Stunting Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 berada pada angka 16,73 dengan kategori capaian “Baik”

Gambar 2.16
Prevelensi Stunting



Di tahun 2024 prevalensi stunting di kabupaten Mamuju Tengah sebesar 16,73 % dengan balita terukur sebesar 92,43 %. Angka tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2023, yaitu sebesar 14,2% dengan balita terukur sebesar 74,14%. Ada beberapa faktor determinan yang mempengaruhi kejadian stunting di Mamuju Tengah. Diantaranya Adanya anggota keluarga yang merokok, Kepemilikan JKN, air bersih, jamban sehat, kecacingan, imunisasi, serta penyakit penyerta. Faktor determinan yang paling tinggi yaitu Adanya anggota keluarga yang merokok sebesar 43,83%.



Tabel 2.7
Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2024

No	IKU	satuan	Kondisi awal 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Manusia	%	65,71	66,34	66,18	99,75	67,00	66,89	99,83	67,14	67,45	100,46	67,46	68,53	101,58
2	Prevelensi Stunting	%	8,15	8,15	14,19	25,88	8	16,69	-8,62	15	14,89	100,73	14	16,73	80,5

Sumber : Bagian Organisasi, 2025

Dari tabel di atas bahwa, indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan yang signifikan dengan capaian kinerja (%) pada tahun 2024 101,58% dan Prevelensi Stunting yang mana pada tahun 2024 capaiannya 80,5% yang mengalami penurunan dari tahun 2023 capaiannya 100,73%.

b. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Faktor angka kemiskinan mamuju tengah meningkat yaitu pertumbuhan ekonomi yang melambat, pendapatan masyarakat yang melambat. “Disisi lain pengeluaran dalam hal pembelian barang pokok dan penting lainnya tidak ikut turun, sehingga rata rata angka kemiskinan yang tadinya rentang itu sudah berada di garis kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tematik dalam penanggulangan kemiskinan daerah setempat, pemerintah kabupaten mamuju tengah telah menyalurkan bantuan-bantuan sosial kepada Orang miskin dan PPKS lainnya sehingga mereka lebih sejahtera dan mandiri,

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Bukan angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi). Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya. Penganggur, terdiri dari: mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai kerja.

Tabel 2.8
Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tahun 2021-2024

No	IKU	satu an	Kondisi awal 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Angka kemiskinan	%	6,79	6,79	7,13	94,99	6,30	7,17	86,19	6,13	7,32	80,58	5,17	7,72	50,67
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,71	2,62	1,82	130,53	2,53	1,88	125,69	1,85	1,83	101,08	1,80	1,70	105,5

Sumber : Bagian Organisasi, 2025

c. Perkembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 tercatat sebesar 2,98 persen. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di Mamuju Tengah pada tahun 2024 adalah Pengadaan Listrik dan Gas mencapai 12,95%. Jika ditinjau dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi adalah pengeluaran konsumsi LNPRRT sebesar 14,19%. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,18% dibandingkan pada tahun 2023.

Tabel 2.9
Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis 4
Perkembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri Tahun 2021-2024

No	IKU	satu an	Kondisi awal 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pertumbuh an Ekonomi	%	-0,40	1,69	3,39	200,59	3,87	2,20	56,87	4,33	2,80	64,6	5,17	2,98	57,64

Sumber : Bagian Organisasi, 2025

d. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sasaran ini diukur oleh Tiga indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai LPPD dan Opini BPK. Indeks RB Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 adalah 55,85 dengan kategori “CC” sedangkan pada tahun 2023 dengan nilai 44,36. Indeks Reformasi Birokrasi mengalami kenaikan nilai sebesar 11,49. Nilai LPPD pada tahun 2024 belum dapat dijabarkan karena belum adanya hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri. Opini BPK tahun 2024 belum ada nilai.

Tabel 2.10
Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis 5
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2021-2024

No	IKU	satu an	Kondisi awal 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	%	C	C	C	100	CC	C	Kurang	CC	C	Kurang	CC	CC	Cukup
2	Nilai LPPD	%	-	2,9	-	-	3	2,79	94	2,99	-	-	2,99	-	-
3	Opini BPK	%	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	-	-

Sumber : Bagian Organisasi, 2025

e. Terpeliharanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Sasaran ini diukur oleh Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan pada tahun 2023 dengan nilai capaian 100% ini menunjukkan bahwa Upaya dan strategi diterapkan berhasil secara optimal dalam mengurangi jumlah insiden gangguan ketertiban dan kemananan di Kabupaten Mamuju Tengah.

Tabel 2.11
Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis 6
Terpeliharanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 2021-2024

No	IKU	satu an	Kondisi awal 2020	Taahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realissi	
1	Terpeliharanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	50%	55%	100%	181,8%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Organisasi, 2025

f. Indeks Kualias Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan

kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Tabel 2.12
Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis 7
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati 2021-2024

No	IKU	satuan	Kondisi awal 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati Daerah	%	71,38	74,7	55	73,62	75,00	55	73,33	75,29	78,56	104,34	75,59	73,32	92,82

Sumber : Bagian Organisasi, 2025

2.3.5 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;

Tabel 2.13
Perbandingan Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Untuk Pemerataan
Pembangunan Dengan Target Akhir RPJMD

No	IKU	satuan	Kondisi awal 2020	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD 2024	Kondisi Akhir 2026
				Target	Realisasi			
1	Indeks Infrastruktur Daerah	%	65,13	78,8	-	-	78.8	81,16

Tabel 2.14
Perbandingan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Dengan Target Akhir RPJMD

No	IKU	satuan	Kondisi awal 2020	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD 2024	Kondisi Akhir 2026
				Target	Realisasi			
1	Indeks pembangunan manusia	%	65,71	67,46	68,53	101,58	67,46	67,69
2	Prevelensi stunting	%	8,15	14	16,73	80,5	14	6,90

Dilihat dari klasifikasi IPM menurut UNDP, nilai IPM Mamuju Tengah pada tahun 2024 termasuk kategori sedang. Jika dilihat dari tahun 2014 hingga tahun 2024, IPM Kabupaten Mamuju Tengah terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya sebesar 7,05 poin yaitu dari 61,48 pada tahun 2014 menjadi 68,53 pada tahun 2024. Hal ini berarti bahwa pencapaian pembangunan manusia di Mamuju Tengah semakin membaik, seperti program pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang telah lebih dirasakan dampak positifnya bagi masyarakat. Dari tahun 2014 hingga 2024, IPM Mamuju Tengah menunjukkan perkembangan secara rata-rata sebesar 1,04 persen dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,705 poin di setiap tahunnya. Peningkatan IPM pada periode tahun tersebut menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia di Mamuju Tengah semakin membaik.

Faktor pola asuh yang tidak benar yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi stunting. dalam upaya penurunan stunting, Kabupaten Mamuju Tengah telah bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar tetap menjaga gizi seimbang pada anak, serta membantu menyalurkan suplay makanan maupun minuman bergizi pada anak dan balita. kabupaten mamuju tengah canangkan 37 kampung KB secara serentak. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam Rapat Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting dan Launching Program DASHAT. launching dashat dan kampung KB yg merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi gizi seimbang ibu hamil, baduta, balita, terutama keluarga miskin.pemerintah kabupaten mamuju tengah juga melibatkan peran desa dalam pencegahan dan penurunan

stunting, peran desa tersebut dalam upaya pencegahan stunting adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan Stunting
- 1) penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - 2) pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - 3) pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - 4) bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - 5) pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - 6) pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - 7) kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- Perencanaan pencegahan dan penanganan stunting, wajib dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui:
- 1) sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanganan stunting;
 - 2) menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
 - 3) pendataan terhadap kelompok sasaran;
 - 4) pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat; dan rembuk stunting desa.

Tabel 2.15
Perbandingan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Dengan Target Akhir RPJMD

No	IKU	satuan	Kondisi awal 2020	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD 2024	Kondisi Akhir 2026
				Target	Realisasi			
1	Angka kemiskinan	%	6,79	5,17	7,62	50,67	5,17	5,50
2	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,72	1,80	1,70	105,5	1,80	2,44

Sasaran ini diukur oleh Dua indikator yaitu Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Garis kemiskinan Mamuju Tengah tahun 2024 adalah sebesar Rp. 324.888,-. Berdasarkan garis kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Tengah tercatat sekitar

11,16 ribu jiwa atau sekitar 7,72 persen dari total penduduk. Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan hal ini dibuktikan dengan tercapainya target pada tahun 2023 dengan capaian 105,5% dari target 1.80% dan realisasi 1,70%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 101.08% dari target 1.85% dan realisasi 1,88%.

Tabel 2.16
Perbandingan Perkembangan Kawasan Agropolitan
Berbasis Kota Terpadu Mandiri Dengan Target Akhir RPJMD

No	IKU	satua n	Kondisi awal 2020	Tahun 2024		Capaia n Kinerja (%)	Target RPJMD 2024	Kondisi Akhir 2026
				Target	Realisasi			
1	Pertumbuh an ekonomi	%	-0,40	5,17	2,98	57,64	5,17	6,15

Laju pertumbuhan PDRB menurut harga konstan atau yang lebih dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Besarnya laju pertumbuhan ekonomi Mamuju Tengah tahun 2024 adalah sebesar 2,98 persen.

Tabel 2.17
Pertumbuhan Ekonomi

Rincian/Description		Satuan/Unit	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/SOCIAL					
Penduduk ¹ /Population ¹		ribu jiwa/thousand people	139,81	142,46	145,12
Laju Pertumbuhan Penduduk ¹ /Population Growth ¹		%	1,99	1,92	1,91
Angka Harapan Hidup ^{1-eo} /Life Expectancy ¹		tahun/years	68,97	69,37	69,68
Angka Melek Huruf Usia 15+/Literacy Rate Aged 15+ %			94,93	96,39	97,71
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ² % Labour Force Participation Rate-LFPR ²			63,15	66,01	69,06
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ² % Unemployment Rate-UR ²			1,88	1,83	1,70
Penduduk Miskin ³ /Poor People ³		ribu jiwa/thousand people	9,98	10,39	11,16
Persentase Penduduk Miskin ³ %			7,17	7,32	7,72

Rincian/Description	Satuan/Unit	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Percentage of Poor People ³				
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁴ Human Development Index ⁴	—	67,07	67,63	68,53
EKONOMI/ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku ⁵ Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price ⁵	triliun rupiah trillion rupiahs	3,81	4,06	4,54
Laju Pertumbuhan Ekonomi ⁶ /Economic Growth ⁶	%	2,34	2,77	2,98
PDRB Per Kapita Harga Berlaku Per Capita of GRDP at Current Price	juta rupiah million rupiahs	27,27	28,53	31,39

Analisi Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan yang mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

- a) Perubahan Iklim: Variabilitas iklim seperti pola hujan yang tidak teratur, periode kekeringan atau banjir yang berlebihan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan mengurangi produktivitas pertanian. Dalam hal ini produksi Pangan sangat terpengaruh oleh fenomena El-Nino dimana Sebagian besar lahan baku sawah di Mamuju Tengah adalah sawah tadah hujan yang hanya mengandalkan Air Hujan sebagai sumber pengairan.
- b) Ketersediaan Prasarana Pertanian berupa Irigasi sangat mempengaruhi produksi Pangan terutama Padi. DI Mamuju tengah yang Sebagian besar adalah Sawah Tadah Hujan saat ini sudah mengalami alih fungsi lahan Pertanian menjadi Komoditas Kelapa Sawit yang harganya lebih stabil. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya pengairan untuk mengalir sawah produktif.
- c) Alih Fungsi Lahan. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi pengurangan luas baku sawah akibat terjadinya alih fungsi lahan ke Kelapa Sawit. Hal ini sekali lagi Sebagian besar akibat tidak adanya irigasi Pertanian di semua sawah di Mamuju tengah.
- d) Ketersediaan Sarana Produksi. Diantaranya adalah perubahan kebijakan kuota pupuk subsidi dan Kouta Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- e) Ketersediaan Benih Berkualitas. Factor ini juga menjadi penghambat rendahnya capaian produksi. Terdapat kegiatan pengadaan benih untuk mengantisipasi Kejadian Bencana Puso yang diakibatkan kekeringan. Saat itu tidak tersedia benih unggul di pasaran yang tahan dengan kekeringan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produksi

- f) Program Peremajaan Sawit Rakyat. Penurunan luas lahan produktif Kelapa Sawit akibat dari program peremajaan Kelapa Sawit.
- Adapun angkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan melalui Rencana Tindak Lanjut sebagaimana berikut:
- a) Melakukan sosialisasi dan fasilitasi pemetaan di tingkat desa dan kecamatan dengan melibatkan seluruh unsur baik pemerintah desa, kecamatan, petani, dan swasta.
 - b) Perlunya penambahan jumlah PPL di Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
 - c) Perlunya peningkatan SDM khususnya bagi para petani agar dapat mengikuti perkembangan pertanian modern.
 - d) Harus ada pengusaha lokal yang menjamin pemasaran hasil pertanian petani Kabupaten Mamuju Tengah, perlu adanya branding produk lokal sehingga tidak diakui menjadi produk milik daerah lain, untuk komoditas tanaman pangan khususnya padi rencananya akan ada korporasi pangan.
 - e) Harus mendorong terbentuknya UKM yang mengolah hasil pertanian beserta filitasi bantuan alat pengolah hasil pertanian yang modern.
 - f) Sosialisasi mitigasi bencana pertanian sebagai upaya pengendalian bencana pertanian
 - g) Penyediaan benih pokok melalui pemberdayaan penangkar dan kelompok penangkar
 - h) Dukungan anggaran guna penyediaan infrastruktur sarana pengairan pertanian Koordinasi dengan pihak pusat dan provinsi guna fasilitasi prasarana pertanian agar lebih memadai
 - i) Pembinaan dan penyuluhan teknik GAP (Good Agricultural Practices) adalah cara pelaksanaan budi daya tanaman pertanian (pangan, buah dan sayur) dan perkebunan secara baik, benar dan tepat.
 - j) Adanya koordinasi lintas sektoral guna pengendalian alih fungsi lahan produktif.

Tabel 2.18
Perbandingan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dengan Target Akhir
RPJMD

No	IKU	satuan	Kondisi awal 2020	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD 2024	Kondisi Akhir 2026
				Target	Realisasi			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	%	C	CC	CC	CC	CC	B
2	Nilai LPPD	%	-	2,99	-	-	2,99	3.04
3	Opini BPK	%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

- a) Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.
- b) LPPD merupakan laporan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada pihak terkait, termasuk masyarakat, mengenai kinerja dan pencapaian yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. LPPD biasanya berisi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan, anggaran yang digunakan, serta hasil yang telah dicapai selama periode tertentu. LPPD juga mencakup

evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

- c) Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:
- 1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - 2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
 - 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - 4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 2.19
Perbandingan Terpeliharanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dengan Target Akhir RPJMD

No	IKU	satuan	Kondisi awal 2020	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD 2024	Kondisi Akhir 2026
				Target	Realisasi			
1	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	%	50	100	100	100	70	80

Sasaran ini diukur oleh Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan pada tahun 2024 dengan nilai capaian 100% ini menunjukkan bahwa Upaya dan strategi diterapkan berhasil secara optimal dalam mengurangi jumlah insiden gangguan ketertiban dan kemananan di Kab.Mamuju Tengah.

Tabel 2.20
Perbandingan Terpeliharanya Kualitas
Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati
Daerah Dengan Target Akhir RPJMD

No	IKU	satuan	Kondisi awal 2020	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)	Target RPJMD 2024	Kondisi Akhir 2026
				Target	Realisasi			
1	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD)	%	71,38	75,59	73,32	92,82	75,59	76,00

Capaian Kinerja ini tidak terlepas karena adanya Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut dilaksanakan di 5 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, dengan sasaran utama bagi usaha/kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Kegiatan yang dimaksud ialah pabrik/perkebunan kelapa sawit, perbengkelan, pengelolaan kayu, pabrik pengelola gabah, dll yang dianggap berdampak pada lingkungan. Pemantau dilaksanakan guna untuk mencegah sedini mungkin kelalaian dari pengelola baik yang tidak disengaja ataupun mungkin karena kesengajaan pelaku usaha/kegiatan.

2.3.6 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Berdasarkan hasil analisis kondisi umum daerah Kabupaten Mamuju Tengah, diidentifikasi sejumlah permasalahan pembangunan daerah yang perlu memperoleh penanganan sungguh-sungguh di masa depan dan berbagai isu- isu strategis daerah yang diyakini akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah selama lima tahun mendatang. Permasalahan dan isu-isu strtagis pembangunan daerah dimaksud dijelaskan secara terstruktur sebagai berikut:

1. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Angka indeks pembangunan manusia terbentuk dari rata-rata lama sekolah/angka harapan sekolah, usia harapan hidup, daya beli yang diukur dari pengeluaran perkapita. Pada tahun 2024, IPM di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 68,53 terus meningkat secara konstan bila dilihat pada tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 sebesar 67,07.

2. Kualitas SDM

Upaya pengembangan kualitas hidup manusia pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari dalam kandungan ibu sampai usia lanjut. Peningkatan kualitas manusia tidak hanya tercermin dari pada upaya penyediaan lapangan kerja dan jaminan memperoleh pendapatan, tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar sebagai masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Dalam konteks demikian, pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Mamuju Tengah yang lebih sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab/bermartabat, serta berdaya saing untuk menciptakan masyarakat Mamuju Tengah yang lebih sejahtera. Selain upaya tersebut, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan mental spiritual terus dikembangkan secara konsisten guna mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku semua orang agar berorientasi pada kemajuan daerah.

3. Taraf Hidup Masyarakat

Pada tahun 2024, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Mamuju Tengah untuk kebutuhan makanan adalah sebesar Rp 606.549,-. Nilai ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2023 yakni Rp 531.320,-. Persentase pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran perkapita sebulan masyarakat Mamuju Tengah pada tahun 2024 adalah sebesar 48,91 persen dengan konsumsi terbesar ada pada kelompok makanan dan minuman jadi. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kebutuhan non makanan Mamuju Tengah di tahun 2024 adalah senilai Rp 633.652,-. Persentase pengeluaran non makanan terhadap total pengeluaran perkapita sebulan masyarakat Mamuju Tengah adalah sebesar 51,09 persen dengan konsumsi terbesar ada pada kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga. Garis kemiskinan Mamuju Tengah tahun 2024 adalah sebesar Rp. 324.888,-. Berdasarkan garis kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Tengah tercatat sekitar 11,16 ribu jiwa atau sekitar 7,72 persen dari total penduduk.

4. Pelayanan publik

Pelayanan Publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas, dimana pemerintah daerah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Mewujudkan *good governance* dalam pelayanan publik, pemerintah

daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga masyarakat untuk mendapat akses pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Permasalahan utama pelayanan publik adalah berkaitan dengan peningkatan dan perluasan pelayanan yang berkualitas, dimana sangat bergantung pada aspek pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumberdaya manusia, dan kelembagaan. Dari sisi pola penyelenggaraan, pelayanan publik masih diperhadapkan pada pemerintahan daerah kurang responsif, kurang informatif, kurang koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, inefisien. Dari sisi sumberdaya manusia, memiliki kelemahan berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empathy dan etika. Dari sisi kelembagaan, kelemahan utamanya terletak pada desain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit (birokratis), dan tidak terkoordinasi sehingga menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien.

5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Pembangunan jaringan infrastruktur merupakan bagian penting dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian guna pencapaian pembangunan kemajuan dan daya saing daerah. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur juga dapat meningkatkan produktivitas, menyerap tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, serta membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengembangan wilayah. Panjang jalan di Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2024 mencapai 572,09 kilometer. Berdasarkan kewenangan, 104,71 kilometer merupakan jalan Negara, 25,2 kilometer jalan Provinsi dan 442,18 kilometer merupakan jalan Kabupaten. Pada tahun 2024 jalan dengan kondisi baik 84,55 km, jalan dengan kondisi sedang 24,00 km, jalan dengan kondisi rusak ringan 4,32 km, jalan dengan kondisi rusak berat 328,31 km. jaringan listrik dan air bersih yang masih terbatas dan belum tersedia diseluruh desa, jaringan telekomunikasi yang belum merata semua di wilayah kecamatan. Transportasi, telekomunikasi dan informasi, akan memegang peranan yang sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya pergerakan perekonomian wilayah dan daerah. Oleh karena itu, pembangunan jaringan jalan/jembatan, fasilitas penyediaan listrik dan air bersih hingga perdesaan serta penyediaan telekomunikasi, yang fokus mendorong

distribusi barang dan orang, pemerataan pembangunan, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah masih harus terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

6. Pengembangan Komoditas Unggulan

Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan di antaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dsb. Untuk Kabupaten Mamuju Tengah rata-rata kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB sebesar 87% setiap tahunnya.

Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016-2018 cenderung menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2017 menurun sebesar 0,02 persen dan kembali menurun pada tahun 2018 sebesar 0,04 persen. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,59 persen atau meningkat sebesar 0,004 persen dan pada tahun 2020 menurun sebesar 0,01 persen dari tahun sebelumnya.

7. Pertambangan Investasi Daerah

Berdasarkan data BPS dari seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, di Mamuju Tengah hanya terdiri dari kategori kegiatan Pertambangan dan Penggalian Lainnya. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subsektor ini adalah komoditi garam hasil penggalian. Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap pembentukan PDRB Mamuju Tengah relatif rendah selama lima tahun terakhir. Kontribusinya hanya sebesar 35,403 milyar rupiah atau sekitar 1,19 persen tahun 2018 dan meningkat menjadi 36,927 milyar rupiah atau sekitar 1,17 persen pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 nilai kontribusi perdagangan menurun menjadi 1,13 persen.

8. Keberagaman Masyarakat

Kabupaten Mamuju Tengah dihuni oleh komunitas dengan latar belakang etnis, kultur, dan agama yang cukup beragam. Keberagaman ini mudah dipahami, mengingat Kabupaten Mamuju Tengah merupakan salah satu daerah transmigrasi penting di Indonesia. Meski demikian, kehidupan sosial masyarakat berlangsung secara harmonis dan penuh toleransi. Hal ini telah menjadi sebuah catatan keberhasilan tersendiri bagi daerah ini. Kondusifnya kehidupan sosial masyarakat tersebut merupakan prasyarat dasar yang diperlukan bagi kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah. Interaksi positif secara inklusif dalam fluralisme bahkan menjadi pondasi dan energi positif bagi akselerasi pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah.

2.3.7 Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran Target Kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Untuk Pemerataan Pembangunan
 1. Program Penyelenggaraan Jalan
 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 4. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 5. Program Kawasan Permukiman
 6. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- b. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia
 1. Program Pengembangan Kurikulum
 2. Program Pendidik dan Tenaga Pendidik
 3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 5. Program Pembinaan Perpustakaan

6. Program Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 7. Program Perekonomian dan Pembangunan
 8. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 9. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 10. Program Pengelolaan Pendidikan
 11. Program Pengelolaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 12. Program Pengembangan Sistem Air Limbah
 13. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 14. Program Pembinaan Keluarga Berencana
 15. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
 16. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- c. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1. Program Pengelolaan Pendidikan
 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 6. Program Pengembangan Perumahan
 7. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 8. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelematan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 9. Program Penganggulangan Bencana
 10. Program Rehabilitasi Sosial
 11. Program Penanganan Bencana
 12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- d. Perkembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri
1. Program Penyuluhan Pertanian
 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 3. Program Perizinan Usaha Pertanian
 4. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- e. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Penyelenggaraan Pengawasan
4. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Program Kepegawaian Daerah
7. Program pengelolaan Keuangan Daerah
8. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
10. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- f. Terpeliharanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 5. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- g. Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati Daerah
 1. Program perencanaan Lingkungan Hidup
 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 4. Program Pengelolaan Persampahan
 5. Program pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 8. Program Penanggulangan Bencana

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah/Kabupaten Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

Nama Satker Penerima : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Mamuju Tengah

Dasar Hukum : SP-DIPA -018.08.1.633656/2024, Tanggal
24 November 2023

3.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang di Terima dari Pemerintah Tingkat Atasnya

Instansi Pemerintahan yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 adalah :

Instansi Pemberi : Kementerian Pertanian
Unit Organisasi : DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
Nama Instansi : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penerima : Kabupaten Mamuju Tengah
Anggaran : Rp. 1.866.131,250 (Satu Milyar Delapan ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)
Program : Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Yang menjadi target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh Instansi Pemberi yaitu Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang tertuang dalam dokumen lembar penugasan yang secara terinci sebagai berikut :

Program : Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Anggaran : Rp. 1.866.131,250,-
Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian
Output : Meningkatnya Pengembangan Sarana Pertanian
Rincian Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian memiliki beberapa rincian kegiatan pendukung diantaranya :

- Traktor Roda 2
- Pompa Air
- Hand Sprayer
- Rehabilitasi jaringan irigasi tersier

Realisasi merupakan target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Kabupaten Mamuju Tengah atas pelaksanaan tugas pembantuan tersebut, dimana diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana

Dari total anggaran Rp. 1.866.131,250,- yang dapat direalisasikan adalah Rp. 1.866.131,250,- dengan mencapai presentase 100% adapun kegiatan telah terlaksana dengan baik.



Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN,OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET .
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP)	SP-DIPA - 018.08.1.633656/ 2024,	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana PertanianKegiatan: Pengembangan Prasarana Pertanian Ouput: Meningkatnya Pengembangan Sarana Pertanian	Kabupaten Mamuju Tengah	Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian	1.866.131,250,-	1.866.131,250,-	100	334 Unit	100	

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah/Kabupaten Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

Nama Satker Penerima : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Mamuju Tengah

Dasar Hukum : SP DIPA 018.08.4.340146/2024 Tahun
2024 tanggal, 28 November 2024

3.2.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang di Terima dari Pemerintah Tingkat Atasnya

Instansi Pemerintahan yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 adalah :

Instansi Pemberi : Kementerian Pertanian
Unit Organisasi : DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN

Nama Instansi Penerima : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Mamuju Tengah

Anggaran : Rp 338.400.000,- (Tiga Ratus tiga puluh
Delapan juta Empat ratus ribu rupiah)

Program : Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi
Pangan Berkualitas

Yang menjadi target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh Instansi Pemberi yaitu Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang tertuang dalam dokumen lembar penugasan yang secara terinci sebagai berikut :

Program : Program Penyediaan dan Pengembangan
Prasarana Pertanian

Anggaran : Rp 338.400.000,-

Kegiatan : Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

Output : Meningkatnya Pengembangan Sarana
Pertanian

Rincian Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian
memiliki beberapa rincian kegiatan pendukung diantaranya:

- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
- Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
- Fasilitasi Pupuk dan Pestisida

Realisasi merupakan target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Kabupaten Mamuju Tengah atas pelaksanaan tugas pembantuan tersebut, dimana diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Dari total anggaran Rp 338.400.000,- yang dapat direalisasikan adalah Rp 338.400.000,- dengan mencapai presentase 100% adapun kegiatan telah terlaksana dengan baik.



Tabel 3.2
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN,OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET .
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP)	aftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Nomor : SP DIPA 018.08.4.340146/ 2024	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan : Pengelolaan Air Irigasi Untuk PertanianOuput: Meningkatnya Pengembang Prasarana Pertanian	Kabupaten Mamuju Tengah	Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian	338.400.000,-	338.400.000,-	100	3 Unit	100	

3.3 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah/Kabupaten Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

Nama Satker Penerima : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah

Dasar Hukum : SP DIPA- 067.07.4. 340605/2024 Tahun 2024 tanggal, 28 November 2024

3.3.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang di Terima dari Pemerintah Tingkat Atasnya

Instansi Pemerintahan yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 adalah :

Instansi Pemberi : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Unit Organisasi : DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Nama Instansi Penerima : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah

Anggaran : Rp. 1.045.655.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Program : - Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan Dan Transmigrasi
- Program Dukungan Manajemen

Yang menjadi target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh Instansi Pemberi yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang tertuang dalam dokumen lembar penugasan yang secara terinci sebagai berikut :

Program : **Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi**

Anggaran : Rp. 993.946.000,-

Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

- Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang terpenuhi sarana dan prasarana permukimannya

Output Kegiatan

:

- Jumlah satuan permukiman yang tertata persebaran penduduknya pada kawasan transmigrasi
- Jumlah satuan transmigrasi (Satuan Permukiman Baru, Satuan Permukiman Pugar, Satuan Permukiman tempatan) yang dibangun dan fungsional di kawasan Transmigrasi.

Kegiatan pembangunan permukiman transmigrasi ini berlokasi di desa tobadak 4 yaitu UPT Saloandeang dan UPT Salulisu kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Koordinasi
- Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
- Fasilitasi dan Pembinaan masyarakat
- Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga
- Bantuan Peralatan / Sarana
- Bantuan Keluarga
- Prasarana Bidang Konektivitas Darat

Program

Anggaran

Kegiatan

Output Kegiatan

Rincian Kegiatan

:

Program Dukungan Manajemen

Rp. 51.709.000,-

Dukungan Manajemen Eselon 1 Dirjen

P2KT

Layanan Dukungan Manajemen internal

Layanan Perkantoran

Realisasi merupakan target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Kabupaten Mamuju Tengah atas pelaksanaan tugas pembantuan tersebut, dimana diuraikan sebagai berikut:

1.

Program

:

Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi

Dari total angggaran Rp. 993.946.000,- terealisasi sebesar Rp. 987.031.270,- dengan presentase 99.30% kegiatan telah terlaksana dengan baik.
2.

Program

:

Program Dukungan Manajemen

Dari total anggaran Rp. 51.709.000,- terealisasi sebesar Rp. 43.479.600,- dengan presentase 84.09% kegiatan telah terlaksana dengan baik.

Tabel 3.3
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KE T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	DITJEN Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans)	SP DIPA-067.07.4.340605/2024	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kabupaten Mamuju Tengah	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Mamuju Tengah	1,045,665,000	1,030,510,870	98.55			
			Koordinasi	Kabupaten Mamuju Tengah	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Mamuju Tengah	1,840,000	1,600,000	86.96	1	Kegiatan	
			Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Kabupaten Mamuju Tengah	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Mamuju Tengah	252,500,000	248,200,000	98.30	4	lembaga	
			Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Kabupaten Mamuju Tengah	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Mamuju Tengah	157,120,000	156,760,000	99.77	27	Orang	
			Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	Kabupaten Mamuju Tengah	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.	77,896,000	76,270,283	97.91	18	Keluarga	

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KE T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Mamuju Tengah						
			Bantuan Keluarga	Kabupaten Mamuju Tengah	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Mamuju Tengah	12,840,000	12,782,477	99.55	18	Keluarga	
			Bantuan Peralatan / Sarana	Kabupaten Mamuju Tengah	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Mamuju Tengah	304,250,000	303,942,3900	99.90	2	Unit	
			Prasarana Bidang Konektivitas Darat	Kabupaten Mamuju Tengah	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Mamuju Tengah	187,500,000	187,476,120	99.99	1	Km	
2.	DITJEN Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans)	SP DIPA-067.07.4.340605/2024	Dukungan Manajemen Eselon I, Dirjen PPKTrans	Kabupaten Mamuju Tengah	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Mamuju Tengah	51,709,000	43,479,000	84.09			
			Layanan Dukungan Manajemen Internal	Kabupaten Mamuju Tengah	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Mamuju Tengah	51,709,000	43,479,000	84.09	1	Layanan	

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada Pasal 14 ayat (2) Indeks Pencapaian SPM meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar. Capaian mutu pelayanan dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis. Dan capaian penerima pelayanan dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui target dan indikator kinerja.

Pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal terdiri dari Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Sosial.

4.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada urusan pendidikan tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 31 Tahun 2018 tentang sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas dalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah. Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Pendidikan Anak usia dini;
- b. Pendidikan Dasar; dan
- c. Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM dalam kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian indikator SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam penddikan PAUD	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTS)	100%	Setiap Tahun
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTS	100%	Setiap Tahun

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah, 2025

4.1.3 Anggaran

Sumber alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang Pendidikan berasal dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah, yang terdiri dari:

Tabel 4.2
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. MAMUJU TENGAH	715,780,494,691
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	0
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	55,481,228,256
	APBD	0
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah 2024 siolah 2025

4.1.4 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Dukungan personil dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan pada tahun 2024, yaitu :

Tabel 4.3
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan
Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Personil	Ket
1	Kondisi personil berdasarkan kualifikasi pendidikan		
	1.1 S3	1 Orang	
	1.2 S2	8 Orang	
	1.3 S1/D-IV	17 Orang	
	1.4 D3	-	
	1.5 D2	-	
	1.6 D1	-	
	1.7 SMA	1 Orang	
	1.8 SMP	-	
	1.9 SD	-	
	Jumlah	27 Orang	
2	Pangkat/Golongan		
	Gol IV	8 Orang	
	Gol III	19 Orang	
	Gol II	-	
	Gol I	-	
	Jumlah	27 Orang	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah 2024 diolah 2025

Dukungan personil pemenuhan SPM di Bidang Pendidikan sebanyak 27 orang dengan jumlah terbanyak 17 Orang pada pendidikan terakhir di S1/D-IV dan kualifikasi pendidikan paling sedikit di pendidikan S3 sebanyak 1 Orang.

4.1.5 Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.4

Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		Tuntas Pratama			73.42%
1.	Pendidikan Anak Usia Dini					80.70%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	66.33%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5782	4794	988	82.91%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.37%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	71.83%
	1. Angka partisipasi sekolah	%	100	83.24	16.7600	83.24%
	2. Angka partisipasi murni	%	100	70.84	29.1600	70.84%
	3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	18.86	22.57	-3.7100	100.00%
	4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	29.7	38.26	-8.5600	100.00%
	5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0.5	0.4	0.1000	80.00%
	6. Kecukupan formasi guru ASN	%	37.01	36.18	0.8300	97.76%
	7. Indeks distribusi guru	%	1	0.23	0.7700	23.00%
	8. Proporsi PTK bersertifikat	%	4.54	4.16	0.3800	91.63%
	9. Proporsi PTK penggerak*	%	0.1	0	0.1000	0.00%
2 .	Pendidikan Dasar					91.61%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	72.88%
	A. JUMLAH YANG	Orang	24628	22435	2193	91.10%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapai an
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	HARUS DILAYANI :					
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.73%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	93.65%
	SD					94.94%
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	97.67	2.3300	97.67%
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	97.66	2.3400	97.66%
	1. Kemampuan literasi	Nilai	50.73	54.97	-4.2400	100.00%
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	37.85	47.1	-9.2500	100.00%
	3. Perbedaan skor literasi	Nilai	1.88	2.85	-0.9700	100.00%
	4. Perbedaan skor numerasi	Nilai	0.59	1.29	-0.7000	100.00%
	5. Indeks iklim keamanan	Nilai	74.23	71.59	2.6400	96.44%
	6. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72.68	72.39	0.2900	99.60%
	7. Indeks iklim inklusi	Nilai	62.03	54.04	7.9900	87.12%
	8. Kecukupan formasi guru ASN	%	80	72.37	7.6300	90.46%
	9. Indeks distribusi guru	%	0.69	0.67	0.0200	97.10%
	10. Proporsi PTK bersertifikat	%	52.04	35.46	16.5800	68.14%
	11. Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0.0000	100.00%
	SMP					92.36%
	1. Angka partisipasi kasar	%	100	105.57	-5.5700	100.00%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	95.68	4.3200	95.68%
	1. Kemampuan literasi	Nilai	64.99	60.96	4.0300	93.80%
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	61.44	54.28	7.1600	88.35%
	3. Perbedaan skor literasi	Nilai	2.16	4.2	-2.0400	100.00%
	4. Perbedaan skor numerasi	Nilai	0.28	1.62	-1.3400	100.00%
	5. Indeks iklim keamanan	Nilai	74.07	69.28	4.7900	93.53%
	6. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70.85	73.62	-2.7700	100.00%
	7. Indeks iklim inklusi	Nilai	62.23	55.27	6.9600	88.82%
	8. Kecukupan formasi guru ASN	%	7	6.88	0.1200	98.29%
	9. Indeks distribusi	%	0.39	0.38	0.0100	97.44%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	guru					
	10. Proporsi PTK bersertifikat	%	59.47	26.62	32.8500	44.76%
	11. Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0.0000	100.00%
3.	Pendidikan Kesetaraan					47.95%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani/T erpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/T erpenuhi	29.01%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8292	3007	5285	36.26%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.94%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/T erpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/T erpenuhi	94.72%
	1. Angka partisipasi kasar	%	0	0	0.0000	100.00%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	31.32	68.6800	31.32%
	3. Kemampuan literasi	Nilai	0	0	0.0000	100%
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	0	0	0.0000	100%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0.0000	100%
	6.Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0.0000	100%
	7.Indeks iklim keamanan	Nilai	0	0	0.0000	100%
	8.Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	0	0	0.0000	100%
	9.Indeks iklim inklusivitas	Nilai	0	0	0.0000	100%
	10.Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0.0000	100%
	11.Indeks distribusi guru	%	0	0	0.0000	100%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0.0000	100%
	13.Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0.0000	100%

Sumber : SPM Bangda Kemendagri, 2025

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan Solusi adalah penyelesaian dan

pemecahan masalah terhadap masalah. Adapun langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Permasalahan dan Solusi Bidang Pendidikan Tahun 2024

Urusan	Permasalahan		Solusi
Urusan pendidikan anak usia dini (PAUD)	1	Masih terdapat satuan pendidikan PAUD yang belum memenuhi standar sarana dan prasarana sesuai SPM	a. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pengadaan dan rehabilitasi sarana prasarana PAUD. b. Mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan fasilitas PAUD
	2	Ketersediaan pendidik yang berkualifikasi minimal D4/S1 di beberapa lembaga PAUD masih terbatas	a Mendorong pendidik PAUD untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan. b Menyediakan program pelatihan dan sertifikasi bagi pendidik PAUD.
	3	Rendahnya partisipasi anak usia dini dalam layanan PAUD berkualitas, terutama di daerah terpencil dan marginal	a Meningkatkan sosialisasi pentingnya PAUD kepada masyarakat. b Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu.
Urusan Pendidikan Dasar	1	Masih terdapat sekolah yang belum memenuhi standar sarana dan prasarana, seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan akses sanitasi	a Optimalisasi dana DAU dan DAK untuk pengadaan serta perbaikan sarana dan prasarana. b Mendorong kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sekolah.
	2	Ketersediaan dan pemerataan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan yang sesuai standar masih menjadi	a Pemberian insentif bagi guru yang bertugas di daerah 3T. b Pengadaan program rekrutmen dan pemerataan

Urusan	Permasalahan	Solusi
	tantangan, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	distribusi guru. c Pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik.
	3 Masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau putus sekolah sehingga belum mendapatkan layanan pendidikan dasar sesuai SPM	a Implementasi gerakan kembali bersekolah (TAKI SOLA) untuk mengembalikan anak ke sekolah. b Peningkatan akses bantuan pendidikan bagi siswa miskin. c Program jemput bola melalui pendataan dan intervensi langsung di masyarakat.
	4 Keterbatasan akses terhadap teknologi pendidikan dan internet bagi peserta didik di daerah tertentu	Penyediaan layanan internet gratis bagi sekolah di daerah terpencil
Urusan Pendidikan Kesetaraan	1 Masih rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan kesetaraan, terutama bagi kelompok rentan dan pekerja usia sekolah	a Kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat pendidikan kesetaraan. b. Pengembangan program pembelajaran fleksibel untuk pekerja usia sekolah.
	2 Fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai, termasuk ketersediaan ruang belajar dan bahan ajar	Pemanfaatan gedung sekolah formal di luar jam belajar untuk pendidikan kesetaraan
	3 Keterbatasan jumlah dan kompetensi pendidik pada lembaga pendidikan kesetaraan	Pelatihan dan sertifikasi bagi tutor pendidikan kesetaraan.

Sumber:: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah 2024 diolah 2025

4.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesehatan tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Pelayanan dasar dibidang kesehatan memiliki beberapa Standar Pelayanan Minimal yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang tertuga tuberculosis;
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);

4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM dalam kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian indikator SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 4.6
Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan	100%	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
	Hamil	kesehatan sesuai standar		
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
8.	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes militus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun
11.	Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang	100%	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
	dengan TB	mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	JumlahWarga Negara resiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah, 2025

4.2.3 Anggaran

Sumber alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang Kesehatan berasal dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah, yang terdiri dari:

Tabel 4.7
Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. MAMUJU TENGAH	715,780,494,691
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	112,124,261,239
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1,778,781,923
	APBD	0
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	75,535,000
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	1,700,809,782
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah 2024 diolah 2025

Alokasi anggaran penerapan SPM pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Rp. 1,778,781,923 rupiah dengan APBD Dau sebesar Rp. 75,535,000 rupiah dan APBD Dak Non Fisik Rp. 1,700,809,782 rupiah.

4.2.4 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Dukungan personil dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2024 yaitu :

Tabel 4.8
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan
Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Personil	Ket
1	Kondisi personil berdasarkan kualifikasi pendidikan		
	a. S3	4	
	b. S2	18	
	c. S1/D-IV	259	
	d. D3	768	
	e. D2	0	
	f. D1	2	
	g. SMA	28	
	h. SMP	0	
	i. SD	0	
	Jumlah	1079	
2	Pangkat/Golongan		
	Gol IV	25	
	Gol III	209	
	Gol II	41	
	Gol I	0	
	Jumlah	275	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah 2024 diolah 2025

Jumlah personil berdasarkan kualifikasi pendidikan di Bidang Kesehatan paling banyak terdapat pada pendidikan D3 sebanyak 768 Orang dengan urutan terbesar kedua terdapat pada kualifikasi pendidikan S1/D-IV sebanyak 259 Orang dan untuk kualifikasi pendidikan jenjang S3 untuk Bidang Pendidikan sebanyak 4 Orang.

4.2.5 Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

sebagai berikut:

Tabel 4.9
Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			84.75%
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					58.39%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	44.31%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	3512	1945	1567	55.38%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.09%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	70.44%
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	3512	1945	1567	55.38%
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	634500	257580	376920	40.60%
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	10575	1945	8630	18.39%
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	3512	1945	1567	55.38%
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	3512	1945	1567	55.38%
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	529	269	260	50.85%
	7. Alat deteksi resiko ibu hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	3512	1945	1567	55.38%
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	3512	1945	1567	55.38%
	9 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3512	1945	1567	55.38%
	10. Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket	11	11	0	100.00%
	11. Gel USG (untuk puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	70	70	0	100.00%
	12. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi ; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk	Orang	16	16	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)”					
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	221	221	0	100.00%
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	319	319	0	100.00%
	15 . Tenaga kesehatan : Kefarmasian	Orang	37	37	0	100.00%
	16. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	35	0	100.00%
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	3512	1945	1567	55.38%
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					67.23%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	49.75%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	3512	2184	1328	62.19%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.48%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	87.40%
	1 . Formulir Partograf	Formulir	3512	2184	1328	62.19%
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	Paket	3512	2184	1328	62.19%
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	3512	2184	1328	62.19%
	4 . Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket	11	11	0	100.00%
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	16	16	0	100.00%
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	319	319	0	100.00%
	7. Tenaga kesehatan : perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885) penduduk)	Orang	221	221	0	100.00%
	8. Tenaga kesehatan :	Orang	37	37	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	Tenaga Kefarmasian					
	9. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	35	0	100.00%
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					70.77%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	53.17%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	3348	2225	1123	66.46%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.60%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	88.02%
	1 . Vaksin Hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	3348	2225	1123	66.46%
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	3348	2225	1123	66.46%
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	335	335	0	100.00%
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	3348	2225	1123	66.46%
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Formulir	3348	2225	1123	66.46%
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3348	2225	1123	66.46%
	7. media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket	11	11	0	100.00%
	8. Tebaga medis : Dokter/Dokter spesialis anak	Orang	16	16	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	319	319	0	100.00%
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	221	221	0	100.00%
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	37	37	0	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	14	14	0	100.00%
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	35	0	100.00%
	14. Kader kesehatan	Orang	960	960	0	100.00%
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita					69.49%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	54.93%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	15236	10462	4774	68.67%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.56%
	B. Jumlah Mutu		Jumlah	Jumlah	Jumlah	72.80%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	Barang/Jasa/SDM		yang harus dilayani -1	yang terlayani -2	yang belum terlayani -3	
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	15236	10462	4774	68.67%
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	15236	10462	4774	68.67%
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Orang	15236	10462	4774	68.67%
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan	Kapsul	3348	2705	643	80.79%
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-29 bulan	Kapsul	30472	9419	21053	30.91%
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	1254	1620	-366	100.00%
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	1254	200	1054	15.95%
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	1254	600	654	47.85%
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT-HB-Hib	Vaksin	418	169	249	40.43%
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	420	232	188	55.24%
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan: DPT-HB-Hib	Vaksin	35330	17677	17653	50.03%
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	Vaksin	431	222	209	51.51%
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	35330	17677	17653	50.03%
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	11	11	0	100.00%
	15 . Formulasi terapi gizi buruk	Paket	11	11	0	100.00%
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	29	29	0	100.00%
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	319	319	0	100.00%
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	221	221	0	100.00%
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	35	0	100.00%
	20 . Guru PAUD	Orang	75	75	0	100.00%
	21. Kader Kesehatan	Orang	960	960	0	100.00%
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					97.03%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77.07%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	23750	22879	871	96.33%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.96%
	B. Jumlah Mutu		Jumlah	Jumlah	Jumlah	99.80%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	Barang/Jasa/SDM		yang harus dilayani -1	yang terlayani -2	yang belum terlayani -3	
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	70	70	0	100.00%
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LKPA dan Posyandu remaja)	Buku	70	70	0	100.00%
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	70	70	0	100.00%
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	70	70	0	100.00%
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/KLSA, lapas/LPKA dan posyandu remaja per puskesmas)	Formulir	70	70	0	100.00%
	5. Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada digudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	23750	22879	871	96.33%
	6. Alat pemeriksaan Hb (hermatologi analyzer di puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SPM/sederajat)	Alat	22	22	0	100.00%
	7. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di	Strip	1390	1390	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)					
	8. Media promosi kesehatan (media khusus remaja sehat)	Paket	11	11	0	100.00%
	9. Vaksin campak rubella, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD, dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	6589	6589	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	29	29	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	319	319	0	100.00%
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	221	221	0	100.00%
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	35	0	100.00%
	15. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	37	37	0	100.00%
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	12	12	0	100.00%
	17. Tenaga Non kesehatan : terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	5	5	0	100.00%
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Kader kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	960	960	0	100.00%
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					88.97%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	69.65%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	91512	79676	11836	87.07%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.31%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	96.57%
	1. Media promosi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	22	20	2	90.91%
	2. Alat : Alat ukur lingkaran lengan atas (LILA)	Unit	11	11	0	100.00%
	3. Alat : Tensimeter	Unit	22	22	0	100.00%
	4. Alat : Glukometer	Unit	33	23	10	69.70%
	5. Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	11	11	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	6 . Alat : Tes strip gula darah , lancet, kapas alkohol	Unit	91512	79676	11836	87.07%
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	22	22	0	100.00%
	8 . Strip dan reagen pemeriksaan Hb	Unit	91512	79676	11836	87.07%
	9 . Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	50	50	0	100.00%
	10. Kuesioner PUMA (deteksi dini penyakit paru obstrutif kronis/PPOK)	Dokumen	100	100	0	100.00%
	11 . Alat pelayanan KB	Unit	33	33	0	100.00%
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	22	22	0	100.00%
	13. Vaksin tetanus difteri (td)	Ampul	3000	3000	0	100.00%
	14 . Tenaga medis: Dokter	Orang	29	29	0	100.00%
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	319	319	0	100.00%
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	221	221	0	100.00%
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	35	0	100.00%
	18 . Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	12	12	0	100.00%
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	960	960	0	100.00%
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					93.83%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	74.37%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	10342	9614	728	92.96%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.46%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	97.29%
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini : alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	22	22	0	100.00%
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	10342	9614	728	92.96%
	3 . Alat pemeriksaan kolestrol	Paket	10342	9614	728	92.96%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	4 . Bahan medis habis pakai : strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	10342	9614	728	92.96%
	5 . Instrumen skrining lansia sederhana (SKILAS), instrument aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS)/ activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	10342	9614	728	92.96%
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	10342	9614	728	92.96%
	7 . Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket	11	11	0	100.00%
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	29	29	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	319	319	0	100.00%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	221	221	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	35	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	12	12	0	100.00%
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	960	960	0	100.00%
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					85.33%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	65.33%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	6889	5626	1263	81.67%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	100.00%
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	11	11	0	100.00%
	2 . Obat Hipertensi	Paket	40630	40630	0	100.00%
	3. Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	11	11	0	100.00%
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	11	11	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	5. Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	11	11	0	100.00%
	6 . Tenaga Medis : Dokter	Orang	29	29	0	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	319	319	0	100.00%
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	221	221	0	100.00%
	9 . Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	35	0	100.00%
	10 . Tenaga Kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	14	14	0	100.00%
	11. Tenaga Kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	37	37	0	100.00%
	12. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	12	12	0	100.00%
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					85.92%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	66.20%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	2076	1718	358	82.76%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.72%
	B. Jumlah Mutu Braang/Jasa/SDM		Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	98.58%
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	390600	390600	0	100.00%
	2 . Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	83	83	0	100.00%
	3 . BMHP (Bahan medis habis pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alcohol, lancet	Unit	27150	22516	4634	82.93%
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (sistem informasi penyakit tidak menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	11	11	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	5 . Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) (minimal 3 disetiap fasyankes terdiri dari : 1 (satu) panduan praktik klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes mellitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	11	11	0	100.00%
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	29	29	0	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	319	319	0	100.00%
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	221	221	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	37	37	0	100.00%
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	12	12	0	100.00%
	11 . Tenaga Kesehatan : Tenaga gizi	Orang	35	35	0	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis medis ahli teknologi laboratorium medic (ATLM)	Orang	14	14	0	100.00%
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	223	223	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	20.00%
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) (bentuk fisik atau elektronik	Buku	11	11	0	100.00%
	2 . Penyediaan psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenis	11	11	0	100.00%
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrument untuk skrining masalah	Formulir	201	201	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)					
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	201	201	0	100.00%
	5 . Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Media	201	201	0	100.00%
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	29	29	0	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh:psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	11	11	0	100.00%
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	11	11	0	100.00%
	9. Tenaga profesional lainnya	Orang	11	11	0	100.00%
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	1853	3148	-1295	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	100.00%
	1 . Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket	1853	3148	-1295	100.00%
	2 . Reagen Zn TB	Kit	11	11	0	100.00%
	3 . Masker bedah dan masker N95	Paket	17150	17150	0	100.00%
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	3706	3706	0	100.00%
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	3706	3706	0	100.00%
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	24	24	0	100.00%
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	11	11	0	100.00%
	8 . Tuberkulin	Vial	185	185	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dlaam/dokter spesialis paru	Orang	23	23	0	100.00%
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	221	221	0	100.00%
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	25	25	0	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	12	12	0	100.00%
	13 . Tenaga kesehatan : Analis teknik laboratorium medic (ATLM)	Orang	14	14	0	100.00%
	14. Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	1	1	0	100.00%
	15. Kader kesehatan	Orang	135	135	0	100.00%
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	3679	3782	-103	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	100.00%
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Paket	11	11	0	100.00%
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	3679	3782	-103	100.00%
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	3679	3782	-103	100.00%
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	11	11	0	100.00%
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	16	16	0	100.00%
	6 . Tenaga kesehatan :	Orang	319	319	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	Bidan					
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	221	221	0	100.00%
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	14	14	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	12	12	0	100.00%
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : pendampingan dan penjangkauan	Orang	5	5	0	100.00%

Sumber :SPM Bangda Kemendagri, 2025

Berdasarkan tabel di atas bahwa, realisasi capaian SPM Bidang Kesehatan telah terlaksana dengan total pencapaian 84.75% dengan tiga indikator yang memperoleh realisasi capaian 100% yaitu Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, Pelayanan kesehatan orang tak terduga tuberculosis, Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV),serta realisasi capaian terendah terdapat pada Pelayanan kesehatan ibu hamil yang mencapai 58.39%.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan Solusi adalah penyelesaian dan pemecahan masalah terhadap masalah. Adapun langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. <u>Data Sasaran</u> dari Kemenkes berdasarkan Data Pusdatin lebih tinggi 25% dari cakupan yang ada 2. Ibu hamil yang memeriksakan kehamilan pertama kali pada umur kehamilan dibawah 12 minggu hanya 87,8 % dari total ibu hamil baru tahun 2024	1. Akhir Tahun 2024 telah dibuat SK Data Sasaran untuk tahun 2025 2. Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkhusus pemerintah desa terkait untuk mengatasi kendala pemberian pelayanan kesehatan ibu hamil

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
		3. adanya kasus kehamilan yang tidak diinginkan dan kasus abortus 6,5 % yang mempengaruhi pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar 4. Dokter PKM yang rata-rata masih kontrak apabila masa kontrak sudah selesai dan tidak diperpanjang maka ketersediaan Dokter PKM terlatih USG tersebut kosong yang sangat menghambat pelayanan pemeriksaan ibu hamil terkait indikator pemeriksaan USG oleh dokter di pkm yang merupakan salah satu kriteria pemeriksaan kesehatan ibu hamil yang berstandar 5. Adanya Jaringan Puskesmas yang sulit mengakses pemeriksaan USG di Puskesmas (faktor jarak tempuh dan keadaan jalan untuk ke puskesmas yang sulit) 6. Adanya sasaran yang tinggal diluar daerah yang sulit untuk dijangkau dan dikonfirmasi pelayanan yang didapatkan	3. perlunya dilakukan pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan bagi ibu hamil 4. Melakukan Pelatihan USG bagi Dokter secara Blended Learning(melalui anggaran DAK NF tahun 2025) 5. koordinasi dengan pemerintah setempat untuk memfasilitasi memudahkan akses masyarakat datang ke puskesmas
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Masih ada ibu bersalin di luar fasilitas kesehatan (yang dimaksud fasilitas kesehatan yakni Puskesmas, PMB dan RS) sekitar 2,5% dengan berbagai faktor sehingga pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar belum capai target	Petugas kesehatan Berinovasi untuk meningkatkan pelayanan persalinan difasilitas kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	1. Masih ada ibu yang bersalin diluar fasilitas kesehatan akan mempengaruhi pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar 2. adanya kejadian kematian neonatus (bayi	selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mendukung persalinan di fasilitas kesehatan

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
		0-28 hari) yang menjadi salah satu rendahnya cakupan	
4	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Kunjungan balita di posyandu masih rendah (D/S tahun 2024 60,86%)	1. Bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk Menciptakan suasana posyandu yang menarik, nyaman dan aman bagi semua sasaran 2. meminta kesediaan pemerintah setempat menaikkan insentif kader sebagai salah satu motivasi untuk meningkatkan kinerja kader dalam pelayanan dan memiliki kader yang mampu mengajak masyarakat untuk rutin dan rajin ke posyandu
5	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Melakukan pemeriksaan anak sekolah secara berkala untuk sasaran yang belum pemeriksaan kesehatan

Sumber : Dinas kesehatan Kab. Mamuju Tengah 2024 diolah 2025

4.3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Pelayanan dasar dibidang pekerjaan umum memiliki beberapa Standar Pelayanan Minimal yaitu:

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM dalam kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 4.11
Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah, 2025

4.3.3 Anggaran

Sumber alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum berasal dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, yang terdiri dari :

Tabel 4.12
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. MAMUJU TENGAH	715,780,494,691
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	76, 988,342,500
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	16, 387,364,000
	APBD	16, 387,364,000
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	16, 387,364,000
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0

NO	PENDANAAN	PAGU
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber : SPM Bangda Kemendagri, 2025

Alokasi Anggaran Bidang Pekerjaan Umum untuk penerapan SPM sebesar Rp. 16,387,364,000 rupiah terdapat pada dana APBD DAK FISIK.

4.3.4 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Dukungan personil dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2024 yaitu :

Tabel 4.13
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Personil	Ket
1.	Kondisi personil berdasarkan kualifikasi Pendidikan		
	a. S3	1 Orang	Kepala Dinas Kepala bidang ASN/Non ASN
	b. S2	1 Orang	
	c. S1/D-IV	11 Orang	
	d. D3		
	e. D2		
	f. D1		
	g. SMA		
	h. SMP		
	i. SD		
	Jumlah	13 orang	
2.	Pangkat /Golongan		
	a. Gol IV	2 Orang	
	b. Gol III	5 Orang	
	c. Gol II	2 Orang	
	d. Gol I		
	Jumlah	9 orang	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah 2024 diolah 2025

Jumlah personil Bidang Pekerjaan umum berdasarkan kualifikasi pendidikan terbanyak pada pendidikan S1/D-IV 11 Orang dan kualifikasi pendidikan jenjang S3 sebanyak 1 Orang.

4.3.5 Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.14
Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			88.53%
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					92.61%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	73.43%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	5796	5320	476	91.79%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.18%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	95.89%
	JARINGAN PERPIPAAN					
	1 . Ukuran kuantitas air minum, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	1449	1330	119	91.79%
	2 . Ukuran kualitas air minum, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Sambungan Rumah/SR	1449	1330	119	91.79%
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	3 . Ukuran kuantitas air minum, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	0	0	0	100.00%
	4 . Ukuran kualitas air minum, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	0	0	0	100.00%
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					84.44%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	66.67%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	1368	1140	228	83.33%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.78%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	88.89%
	1 . Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan air limbah domestik	Rumah Tangga	342	285	57	83.33%
	2 . Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan	Rumah Tangga	0	0	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T					
	3 . Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	342	285	57	83.33%

Sumber : SPM Bangda Kemendagri 2024, diolah 2025

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum sebesar 88.53% dengan capaian tertinggi pada Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 92.61% dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik 84.44%.

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan Solusi adalah penyelesaian dan pemecahan masalah terhadap masalah. Adapun langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2024

No	Permasalahan	Solusi
1	Pemasangan Sambungan Rumah pada kegiatan Sistem Pengolahan Air minum tahun 2024 tidak sesuai dengan jumlah unit yang ada direncana.	realisasi data penerima manfaat beberapa tidak siap menerima pemasangan sambungan Rumah.
2	Terdapat 1 Desa yang tidak menyelesaikan pekerjaan dilapangan karena tidak sesuai dengan realisasi keuangan dan fisik dilapangan.	untuk pencairan tahap 3 dipending dan diinstruksikan untuk segera

		penyelesaian pekerjaan dilapangan.
--	--	------------------------------------

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah 2024 diolah 2025

4.4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Pelayanan dasar dibidang pekerjaan umum memiliki beberapa Standar Pelayanan Minimal yaitu :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintahan daerah kabupaten/kota.

4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM dalam kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 4.16
Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2.	Fasilitas	Jumlah Warga Negara yang	100%	Setiap

penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintahan daerah kabupaten/kota	terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		Tahun
---	---	--	-------

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Mamuju Tengah, 2025

4.4.3 Anggaran

Sumber alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM bidang Perumahan Rakyat berasal dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, yang terdiri dari :

Tabel 4.17
Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat
Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. MAMUJU TENGAH	715,780,494,691
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	35, 018,310
	APBD	35, 018,310
	A. APBD MURNI	30, 000,000
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	5, 018,310
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber : SPM Bangda Kemendagri, 2025

Pada alokasi anggaran penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat sebesar Rp. 35,018,310 Rupiah dengan anggaran yang terdapat pada APBD Murni Rp. 30,000,000 Rupiah dan Kerjasama 5,018,310 Rupiah.

4.4.4 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang

terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Dukungan personil dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat pada tahun 2024 yaitu:

Tabel 4.18
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat
Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Personil	Ket
1	Kondisi personil berdasarkan kualifikasi pendidikan		
	a. S3	1 Orang	Kepala Dinas
	b. S2	1 Orang	Kepala Bidang
	1.1 S1/D-IV	6 Orang	2 PNS dan 4 Non ASN
	1.2 D3	1 Orang	PNS
	1.3 SMA	2 Orang	Non ASN
	1.4 SMP		
	1.5 SD		
	Jumlah	11 Orang	
2	Pangkat/Golongan		
	Gol IV	2 Orang	
	Gol III	3 Orang	
	Gol II		
	Gol I		
	Jumlah	5 Orang	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Mamuju Tengah 2024 diolah 2025

Dukungan personil dalam penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat berdasarkan kualifikasi pendidikan jenjang S3 yaitu 1 Orang dan jenjang S1/D-IV menempati kualifikasi pendidikan terbanyak yaitu 6 Orang.

4.4.5 Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.19
Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00%
Ya Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2	2	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	1	1	0	100.00%
	2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	1	1	0	100.00%
	3. Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00%
	4.Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00%
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100.00%
	Ada relokasi program pemerintahan					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5	5	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan	Rumah	5	5	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	Tanah dan/atau Bangunan					
	a.Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	0	0	0	0.00%
	b.Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	0	0	0	0.00%
	c.Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	5	5	0	100.00%
	2 . Bantuan akses rumah sewa layak huni	Rumah	0	0	0	100.00 %

Sumber : SPM Bangda Kemendagri, 2025

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian Bidang Perumahan Rakyat telah terealisasi secara sempurna dengan mencapai 100%, yang mana kategori indeks pencapaian SPM yaitu Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota masing-masing mencapai 100%.

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan Solusi adalah penyelesaian dan pemecahan masalah terhadap masalah. Adapun langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2024

No	Permasalahan	Solusi
1	Penyusunan Program Pembangunan Daerah belum memprioritaskan pada pemenuhan urusan SPM.	Penyusunn Program terkait urusan SPM menjadi program prioritas.
2	Penerapan SPM belum berjalan secara maksimal seperti: • belum terbangunnya koordinasi lintas sektor pemangku SPM • Pengumpulan data masih kurang, masih terfokus pada data korban bencana dan dampak pembangunan	• Perlu adanya rapat koordinasi lintas sektor secara berkala; • Perlu adanya dokumen kajian resiko bencana dan dokumen rencana penanggulangan bencana; • Adanya pembinaan,Pengawasan dan sosialisasi

	Kurangnya Evaluasi dan Pelaporan SPM	
3	Minimnya Anggaran dalam penerapan SPM.	Dukungan Anggaran TAPD.

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Mamuju Tengah 2024 diolah 2025

4.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Peneraoan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada STandar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum);
- Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan);
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan);
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan);
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)

4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM dalam kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2024, sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara kabupaten/kota	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

4.5.3 Anggaran

Sumber alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang Trantibumlinmas berasal dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, yang terdiri dari :

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. MAMUJU TENGAH	715,780,494,691
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	4.368.970.088
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	0
	APBD	4.368.970.088

	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	4.368.970.088
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Mamuju Tengah 2024 diolah 2025

Alokasi anggaran SPM Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum dan Damkar pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdapat pada APBD DAU Rp. 4, 368,970,088 Rupiah.

Tabel 4.23
Alokasi Anggaran SPM Bidang Trantibumlinmas
Sub Urusan Kebencanaan Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. MAMUJU TENGAH	715,780,494,691
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	3.356.043.087
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1.648.716.924
	APBD	0
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mamuju Tengah 2024 diolah 2025

Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Kebencanaan sebesar Rp. 1,648,716,924 Rupiah.

4.5.4 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan

Minimal. Dukungan personil dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas pada tahun 2024 yaitu :

Tabel 4.24
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Trantibumlinmas
Sub Urusan Trantibum dan Damkar Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Personil	Ket
1	Kondisi personil berdasarkan kualifikasi pendidikan		
	a. S3	1 Orang	
1.1	S2	3 Orang	
1.2	S1/D-IV	39 Orang	
1.3	D3	5 Orang	
1.4	D2	3 Orang	
1.5	D1	0 Orang	
1.6	SMA	264 Orang	
1.7	SMP	0 Orang	
1.8	SD	Orang	
	Jumlah	315 Orang	
2	Pangkat/Golongan		
	Gol IV	11 Orang	
	Gol III	5 Orang	
	Gol II	1 Orang	
	Gol I	-	
	Jumlah	17 Orang	

Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Mamuju Tengah 2024 diolah 2025

Dukungan personil pemenuhan SPM Sub Urusan Trantibum dan Damkar paling banyak pada jenjang kualifikasi pendidikan SMA 264 Orang, jenjang S1/D-IV 39 Orang dan untuk kualifikasi pendidikan jenjang S3 sebanyak 1 Orang.

Tabel 4.25
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Trantibumlinmas
Urusan Kebencanaan Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Personil	Ket
1	Kondisi personil berdasarkan kualifikasi pendidikan		
	a. S2	2 Orang	
	b. S1/D-IV	8 Orang	
	c. D3	2 Orang	
	d. SMA/SMK	-	
	e. SMP	-	

	f. SD	-	
Jumlah		12	
2	Pangkat/Golongan		
	Gol IV	3 Orang	
	Gol III	9 Orang	
	Gol II	-	
	Gol I	-	
Jumlah		12	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mamuju Tengah 2024 diolah 2025

Dukungan personil pemenuhan SPM Sub Urusan Kebencanaan berdasarkan jenjang kualifikasi pendidikan terbanyak pada jenjang S1/D-IV 8 Orang dan jenjang pendidikan S2 2 Orang.

4.5.5 Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.26
Realisasi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4			-5
Total Trantibumlinmas			(Tuntas Utama)			95.00%
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						90.00%
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					90.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		15	15	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					10.00%
	B.JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	50.00%
			Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan	unit	1	1	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4			-5
	perda dan perkara (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)					
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusakan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	1	1	0	0.00%
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	0	0	0	0.00%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan	Dokumen	0	0	0	0.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4			-5
	pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal					
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	100.00%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	100.00%
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4			-5
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						98.33%
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		123.547	123.547	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB	dokumen	1	1	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4			-5
	dalam bentuk dokumen yang sah/legal)					
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	123.547	123.547	0	100.00%
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	50	50	0	100.00%
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	9	9	0	100.00%
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					95.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		123.547	234.547	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	75.00%
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	unit	10	5	5	50.00%
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang	Orang	49	49	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4			-5
	berada di kawasan rawan bencana)					
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	ya	Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	6.306	6.306	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	4	4	0	100.00%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	6.306	6.306	0	100.00%
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	6	6	0	100.00%
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	0	0	100.00%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban	layanan	8	8	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4			-5
	bencana					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4			-5
KATEGORI INDKES PENCAPAIAN SPM DAMKAR						96.67%
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					96.67%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		8	8	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.67%
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	83.33 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	7	7	0	100.00%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	1	1	0	0.00%
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	11	11	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4			-5
	(pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)					
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	104	104	0	100.00%
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	0	0	0	100.00%
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	0	0	0	100.00%

Sumber : SPM Bangka kemendagri, 2025

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan Solusi adalah penyelesaian dan pemecahan masalah terhadap masalah. Adapun langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

a) Sub Urusan Trantibum dan Damkar

Tabel 4.27
Permasalahan dan Solusi Bidang Trantibumlinmas
Sub Urusan Trantibum dan Damkar Tahun 2024

No	Permasalahan	Solusi
1	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran belum optimal	Diperlukan pengadaan sarana, prasarana penyelamatan kebakaran dan non kebakaran dan anggaran
2	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan belum optimal	Diperlukan pengadaan sarana, prasarana pencegahan gangguan ketentraman dan anggaran yang cukup

Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Mamuju Tengah 2024 diolah 2025

b) Urusan Kebencanaan

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam urusan kebencanaan, di jelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.28
Permasalahan dan Solusi Bidang Trantibumlinmas
Sub Urusan Kebencanaan Tahun 2024

No	Permasalahan	Solusi
1	Kurangnya sinkronisasi informasi dari dinas dan instansi terkait	Melakukan rapat koordinasi dengan stake holder terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana secara rutin.
2	Kurangnya anggaran untuk sarana prasarana, operasional penanggulangan bencana kebakaran baik pada saat pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk penanganan bencana dan bantuan santunan terhadap korban.
3	Belum optimalnya kualitas SDM BPBD dan minimnya peronil yang memahami manajemen kebencanaan	Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas personil BPBD

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mamuju Tengah 2024 diolah 2025

4.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan Bidang Sosial memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM dalam kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian indikator SPM Bidang Sosial di Kabupaten Mamuju Tengah Pada Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 4.29
Target Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia	Jumlah WargaNegara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial	100%	Setiap Tahun

	Terlantar di Luar Panti	di luar panti		
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis Tuna Sosial Khususnya yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/ kota	100%	Setiap Tahun

Sumber :Dinas Sosial Kab. Mamuju Tengah, 2025

4.6.3 Anggaran

Sumber alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang Sosial berasal dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, yang terdiri dari:

Tabel 4.30
Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. MAMUJU TENGAH	715,780,494,691
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	2,438,734,019
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	216,459,082
	APBD	216,459,082
	A. APBD MURNI	216,459,082
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber : SPM Bangda Kemendagri, 2025

Alokasi Anggaran satuan kerja Dinas Sosial Rp. 2.438.734.019 dengan anggaran pada penerapan SPM Bidang Sosial terdapat pada APBD Murni sebesar Rp. 216.459.082 Rupiah.

4.6.4 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Dukungan personil dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada tahun 2024 yaitu :

Tabel 4.31
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Sosial
Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Personil	Ket
1	Kondisi personil berdasarkan kualifikasi pendidikan		
	1.1 S2	5 Orang	
	1.2 S1/D-IV	2 Orang	
	1.3 D3	0 Orang	
	1.4 SMA	2 Orang	
	1.5 SMP	0	
	1.6 SD	0	
	Jumlah	9 Orang	9 ASN
2	Pangkat/Golongan		
	Gol IV	2 Orang	
	Gol III	6 Orang	
	Gol II	1 Orang	
	Gol I		
	Jumlah	9 Orang	ASN

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah 2024 diolah 2025

Dukungan personil pemenuhan SPM Bidang Sosial terdapat 9 orang ASN dan berdasarkan kualifikasi pendidikan tertinggi terletak pada jenjang pendidikan S2 yaitu 5 orang.

2.6.5 Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.32
Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		Tuntas Utama			96.79%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti					95.38%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		74	74	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.38%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	76.92%
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	3	3	0	100.00%
	2 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	18	18	0	100.00%
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas	Orang	0	0	0	0.00%

	sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlanter)					
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	30	30	0	100.00%
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	4	4	0	100.00%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	0	0.00%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	0	0	0	0.00%
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlanter (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlanter serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan	Orang	2	2	0	100.00%

	oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)					
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	4	4	0	100.00%
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1	1	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	10	10	0	100.00%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	0	0	100.00%
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	2	2	0	100.00%
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					98.33%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		15	15	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.33%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	91.67%
	1 . Layanan data dan	Orang	15	15	0	100.00%

	pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial					
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	7	7	0	100.00%
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	15	15	0	100.00%
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	15	15	0	100.00%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	15	15	0	100.00%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual	Orang	7	7	0	100.00%

	adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	0	0	0	0.00%
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	2	2	0	100.00%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	2	2	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	2	2	0	100.00%
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	2	2	0	100.00%

3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					96.92%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		35	35	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.92%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	84.62%
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	35	35	0	100.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	35	35	0	100.00%
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	18	18	0	100.00%
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang	Orang	18	18	0	100.00%

	mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)					
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	5	5	0	100.00%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	18	18	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	35	35	0	100.00%
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	35	35	0	100.00%
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	10	0	100.00%
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0	0.00%

	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)					
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0	0	0	0.00%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	0	0	100.00%
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	0	0	0	100.00%
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					93.33%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		2	2	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					13.33%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	13.33%
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti	Orang	2	2	0	100.00%

	informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial					
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	2	2	0	100.00%
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	2	2	0	100.00%
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	2	2	0	100.00%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0	0	0	0.00%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan	Orang	2	2	0	100.00%

	mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	0	0	0	0.00%
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	0	0	0	0.00%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	0	0	0	0.00%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	2	2	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	2	2	0	100.00%
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan	Orang	0	0	0	100.00%

	lainnya)					
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		433	433	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1 . Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	433	433	0	100.00%
	2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	433	433	0	100.00%
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	25	25	0	100.00%
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu	Orang	153	153	0	100.00%

	hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)					
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	433	433	0	100.00%

Sumber : SPM Bangda Kemendagri, 2025

2.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan Solusi adalah penyelesaian dan pemecahan masalah terhadap masalah. Adapun langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.33
Permasalahan dan Solusi Bidang Sosial Tahun 2024

Permasalahan	Solusi
Kurangnya SDM yang kompeten terkait pelayanan kesejahteraan Sosial seperti Penyuluh Sosial, Psikolog	Pelatihan & Rekrutmen – Tingkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan perekrutan tenaga ahli.
Fasilitas sarana dan prasarana yang Tidak Memadai	Optimalisasi Sarana – Ajukan anggaran, gandeng CSR, dan maksimalkan fasilitas yang ada.
Perencanaan Program pelayanan sosial yang tidak tepat sasaran	Pendataan Akurat – Gunakan teknologi untuk memastikan program tepat sasaran.
Pengawasan yang Lemah: Minimnya evaluasi dan monitoring terhadap pelayanan sosial	Monitoring Ketat – Bentuk tim pengawas dan lakukan evaluasi berkala.

Permasalahan	Solusi
Pengelolaan Dana yang Tidak Efektif: Penyerapan anggaran yang tidak maksimal dan sering kali tidak tepat sasaran	Efisiensi Anggaran – Perencanaan dan penyerapan anggaran harus berbasis kebutuhan riil.
Kurangnya Kesadaran dan keterlibatan Masyarakat	Edukasi Masyarakat – Sosialisasi dan dorong keterlibatan aktif masyarakat.
Tidak adanya pengalokasian Anggaran Kabupaten terkait Bantuan Kelompok Usaha Bersama	Advokasi Anggaran KUBE – Dorong pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk bantuan KUBE.
Kurangnya Penekanan Kepala Daerah untuk memaksimal Bantuan KUBE	Komitmen Kepala Daerah – Tekankan peran kepala daerah dalam mendukung program sosial.

Sumber : Dinas Sosial Kab. Mamuju Tengah 2024 diolah 2025

2.7 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

2.7.5 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program dan kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Pada Bidang Pendidikan, Kawasan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.34
Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan
Tahun 2024

No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KAB. MAMUJU TENGAH				55,184,109,99 2	47,802,042,14 6	86.62%
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				55,184,109,99 2	47,802,042,14 6	86.62%
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			31,066,679,31 3	28,359,661,08 1	91.29%
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1,111,366,330	815,601,761	73.39%

No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	454,361,470	312,658,274	68.81%
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	4,738,762,923	4,552,709,058	96.07%
		6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
		8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	361,552,228	251,004,928	69.42%
		10	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1,705,153,769	1,705,153,769	100.00%
		12	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
		13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
		14	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	275,859,195	275,859,195	100.00%
		16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	0	0	0%
		17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	183,173,425	183,173,425	100.00%
		18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	Orang	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00%

No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Pendidikan Sekolah Dasar				
		19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	140,236,444	140,236,444	100.00%
		20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	70,604,627	70,604,627	100.00%
		21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	13,818,180,000	13,818,180,000	100.00%
		22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	256,610,646	256,610,646	100.00%
		23	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	909,154,953	624,972,344	68.74%
		24	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	0	0	0%
		25	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		26	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Orang	0	0	0%
		27	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	49,753,077	49,753,077	100.00%
		28	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	50,003,150	49,999,862	99.99%
		29	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		30	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		31	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan	Dokumen	149,997,447	149,997,447	100.00%

No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Bidang Pendidikan				
		32	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		33	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		34	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		35	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		36	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	445,742,631	444,117,331	99.64%
		38	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1,434,321,972	916,652,128	63.91%
		39	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		40	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		41	Penyelenggaraa n Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	0	0	0%
		42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	3,911,845,026	2,742,376,765	70.10%
	JUMLAH INDIKATOR				31,066,679,313	28,359,661,081	91.29%
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			15,020,076,226	11,726,323,958	78.07%
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%

No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	665,873,646	458,236,132	68.82%
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	465,298,979	318,581,728	68.47%
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		5	Pembangunan Laboratorium	Ruang	497,753,644	342,157,138	68.74%
		6	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		7	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
		8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		9	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
		10	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%
		11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	3,251,728,704	1,785,769,235	54.92%
		12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1,792,830,478	888,613,038	49.56%
		13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		14	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	185,024,177	114,893,802	62.10%
		15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	497,753,644	324,631,945	65.22%
		16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		18	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
		19	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%

No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	55,305,130	37,868,605	68.47%
		21	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	199,750,786	198,059,886	99.15%
		22	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
		23	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
		24	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		25	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	80,641,443	80,641,443	100.00%
		26	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	0	0	0%
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	251,711,766	251,711,766	100.00%
		29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
		30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	49,911,842	49,911,842	100.00%
		31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidik an	177,791,887	177,783,867	100.00%
		32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidik an	5,608,920,000	5,608,920,000	100.00%
		33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS	Orang	171,089,097	171,089,097	100.00%

No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Sekolah Menengah Pertama				
		34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang	0	0	0%
		35	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang	0	0	0%
		36	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		37	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
		38	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		39	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		40	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	149,998,916	149,998,916	100.00%
		42	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	100,543,205	100,493,205	99.95%
		43	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunita s	0	0	0%
		44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%

No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		45	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		46	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		47	Penyelenggaraa n Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidik an	0	0	0%
		48	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	411,469,577	260,488,008	63.31%
		49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	199,851,472	199,851,472	100.00%
		50	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	155,761,583	155,556,583	99.87%
		51	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	51,066,250	51,066,250	100.00%
		52	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
		53	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				15,020,076,226	11,726,323,958	78.07%
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			6,392,368,244	5,011,070,898	78.39%
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	1,861,424,163	1,075,651,283	57.79%
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	474,002,928	205,219,993	43.30%
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	0	0	0%
		4	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	112,700,000	112,700,000	100.00%
		5	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket	0	0	0%

No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		6	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	0	0	0%
		7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	0	0	0%
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	184,500,000	184,365,000	99.93%
		9	Penyelenggaraa n Proses Belajar PAUD	Peserta didik	0	0	0%
		10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	0	0	0%
		11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	0	0	0%
		12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidik an	226,057,644	226,057,644	100.00%
		13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidik an	2,587,800,000	2,587,800,000	100.00%
		14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	163,267,223	163,267,223	100.00%
		15	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		16	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang	0	0	0%
		17	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		18	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		19	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		20	Koordinasi, Perencanaan,	Dokumen	0	0	0%

No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				
		21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		22	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	168,230,165	41,894,500	24.90%
		23	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunita s	0	0	0%
		24	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	403,743,610	203,472,744	50.40%
		25	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		26	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		27	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	87,897,840	87,897,840	100.00%
		29	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		30	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		31	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		33	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas	Orang	122,744,671	122,744,671	100.00%

No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Bidang Pendidikan				
		34	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		35	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		36	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				6,392,368,244	5,011,070,898	78.39%
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			2,704,986,209	2,704,986,209	100.00%
		1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0%
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	0	0	0%
		3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket	0	0	0%
		4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	99,657,518	99,657,518	100.00%
		7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	2,517,800,000	2,517,800,000	100.00%
		8	Peningkatan Kapasitas	Orang	64,384,610	64,384,610	100.00%

No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				
		9	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0%
		10	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		11	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		12	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		13	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	23,144,081	23,144,081	100.00%
		15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		17	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		18	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan	Orang	0	0	0%

No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Pendidikan Nonformal/Keset araan				
		19	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		20	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		21	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0%
		22	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		23	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		24	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
		25	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
		26	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
		27	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		28	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%
		30	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		31	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
		32	Penyelenggaraa n Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0%
		33	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%
		34	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	0	0	0%

No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		36	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				2,704,986,209	2,704,986,209	100.00%
	JUMLAH PROGRAM				55,184,109,992	47,802,042,146	86.62%

Sumber : SPM Bangda Kemendagri, 2025

2.7.6 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program dan kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Pada Bidang Kesehatan, Kawasan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.35
Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Kab. Mamuju Tengah			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota			
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	195,380,000	192,390,000	98.47%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	137,386,000	96,990,000	70.60%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	46,375,000	46,250,000	99.73%
4	Pelayanan kesehatan balita			
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	598,958,500	581,503,500	97.09%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus			
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	29,160,000	17,280,000	59.26%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	640,535,282	605,641,250	94.55%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	130,987,141	129,867,141	99.14%
	Jumlah Indikator	1,778,781,923	1,669,921,891	93.88%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Mamuju Tengah 2024 diolah 2025

2.7.7 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Pada Bidang Pekerjaan Umum, Kawasan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.36
Program dan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2024

No	PRO GRA M	KE GIA TA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KAB. MAMUJU TENGAH				20,576,701,832	14,956,156,004	72.68%
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				15,182,528,832	11,180,234,905	73.64%
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			15,182,528,832	11,180,234,905	73.64%
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%

No	PRO GRA M	KE GIA TA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	0	0	0%
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
		8	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
		20	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		21	Perbaiki SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Unit	0	0	0%

No	PRO GRA M	KE GIA TA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			(SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				
		23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	0	0	0%
		24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	0	0	0%
		25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	0	0	0%
		26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	5,562,522,080	3,731,865,550	67.09%
		27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0%
		28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	6,045,555,886	4,946,253,749	81.82%
		29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	3,574,450,866	2,502,115,606	70.00%
		30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
		31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
		32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	0	0	0%
		33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				15,182,528,832	11,180,234,905	73.64%
	JUMLAH PROGRAM				15,182,528,832	11,180,234,905	73.64%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				5,394,173,000	3,775,921,099	70.00%

No	PRO GRA M	KE GIA TA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	2		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota		5,394,173,000	3,775,921,099	70.00%
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	0	0	0%

No	PRO GRA M	KE GIA TA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		12	Pembangunan/penyed iaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
		15	Pembangunan/penyed iaan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
		16	Rehabilitasi/peningkat an/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
		17	Supervisi pembangunan/rehabili tasi/peningkatan/perlu asan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%
		18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	0	0	0%
		19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	0	0	0%
		20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
		21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0%
		22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0%
		23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
		24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	0	0	0%
		25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%

No	PRO GRA M	KE GIA TA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		26	Facilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
		27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
		28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%
		29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0	0	0%
		30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
		31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
		32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0%
		33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
		34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0	0	0%
		35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelen ggara	0	0	0%
		36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0%
		37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0%
		38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air	Unit	0	0	0%

No	PRO GRA M	KE GIA TA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			Limbah Domestik (SPALD)				
		39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	5,394,173,00 0	3,775,921,09 9	70.00%
		40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	0	0	0%
		41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				5,394,173,00 0	3,775,921,09 9	70.00%
	JUMLAH PROGRAM				5,394,173,00 0	3,775,921,09 9	70.00%
KEGIATAN LAINNYA							
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

Sumber : SPM Bangda Kemendagri, 2025

2.7.8 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat

Program dan kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Pada Urusan Bidang Perumahan Rakyat , Kawasan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.37
Program dan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat
Tahun 2024

No	PR OG RA M	KE GIA TA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KAB. MAMUJU TENGAH				1,028,347,500	1,028,347,500	100.00%
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				113,760,000	113,760,000	100.00%
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			83,760,000	83,760,000	100.00%
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

No	PR OG RA M	KE GIA TA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0%
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	83,760,000	83,760,000	100.00%
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0%
		7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		JUMLAH INDIKATOR			83,760,000	83,760,000	100.00%
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			30,000,000	30,000,000	100.00%
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	10,000,000	10,000,000	100.00%
		2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
		4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	20,000,000	20,000,000	100.00%
		5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan	Unit Rumah	0	0	0%

No	PR OG RA M	KE GIA TA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			pada relokasi program Kabupaten/Kota				
		7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
			JUMLAH INDIKATOR		30,000,000	30,000,000	100.00%
			JUMLAH PROGRAM		113,760,000	113,760,000	100.00%
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1	Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan		914,587,500	914,587,500	100.00%

Sumber : SPM Bangda Kemendagri, 2025

2.7.9 Urusan Pemerintah Bidang Trantibumlinmas

Program dan kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Pada Urusan Bidang Trantibumlinmas , Kawasan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan Sub Urusan Trantibum dan Damkar

Sub Urusan Trantibum dan Damkar memiliki Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.38
Program dan Kegiatan Trantibum dan Damkar
Tahun 2024

Program Kegiatan	Sub Kegiatan	SATUAN		ANGGARAN N	REALISASI			CAPAIAN %
ANGGARAN PENERAPAN SPM				4,368,970,088			4,368,802,460	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%		2,912,770,088	100%		2,912,602,460	100%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%		2,912,770,088	100%		2,912,602,460	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dokumen	37,358,750	1	Dokumen	37,194,160	100%
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Dokumen	150,483,000	1	Dokumen	150,480,000	100%
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan	12	Laporan	2,724,928,338	12	Laporan	2,724,928,300	100%

Program Kegiatan	Sub Kegiatan	SATUAN		ANGGARAN	REALISASI			CAPAIAN %
	Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan							
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		100,000		1,456,200,000	100,00		1,456,200,000	100%
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		100,000		1,456,200,000	0,00%		1,456,200,000	100%
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	Laporan	1,456,200,000	12	Laporan	1,456,200,000	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2024 diolah 2025

- b. Program dan Kegiatan Sub Urusan Kebencanaan**
- Urusan Kebencanaan memiliki Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.39
Program dan Kegiatan Kebencanaan
Tahun 2024

No	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		%	1,707,326,163	1,642,105,961	96.18%

No	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	30,339,479	30,304,000	99.88%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12,236,197	12,227,500	99.93%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,142,574	2,136,000	99.69%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	965,436	964,000	99.85%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	2,161,662	2,154,500	99.67%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	1,050,436	1,049,000	99.86%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	11,783,174	11,773,000	99.91%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	1,149,669,201	1,088,684,854	94.70%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1,104,368,417	1,043,507,354	94.49%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	11,645,436	11,534,000	99.04%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	33,655,348	33,643,500	99.96%

No	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		%	16,854,935	16,847,500	99.96%
		Pembinaan, Pengawasan , dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	16,854,935	16,847,500	99.96%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	211,029,500	210,600,176	99.80%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	7,790,000	7,770,000	99.74%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	4,321,500	4,320,000	99.97%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	13,600,000	13,600,000	100.00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	185,318,000	184,910,176	99.78%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%	109,314,431	109,304,431	99.99%
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	109,314,431	109,304,431	99.99%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	75,243,000	74,719,750	99.30%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6,000,000	6,000,000	100.00%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	26,043,000	25,519,750	97.99%
		Penyediaan Jasa Pelayanan	Laporan	43,200,000	43,200,000	100.00%

No	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
		Umum Kantor				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	114,875,617	111,645,250	97.19%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	49,393,250	46,325,250	93.79%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	62,682,367	62,575,000	99.83%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2,800,000	2,745,000	98.04%
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		%	1,648,716,924	1,077,007,889	65.32%
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		%	20,511,603	20,505,000	99.97%
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang	20,511,603	20,505,000	99.97%
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		%	128,589,278	128,582,675	99.99%

No	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kawasan	17,211,603	17,205,000	99.96%
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	11,650,000	11,650,000	100.00%
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	81,727,675	81,727,675	100.00%
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	18,000,000	18,000,000	100.00%
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		%	825,000,000	823,720,000	99.84%
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	786,600,000	786,600,000	100.00%
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	14,400,000	13,120,000	91.11%
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Dokumen	24,000,000	24,000,000	100.00%
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		%	674,616,043	104,200,214	15.45%
		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) Dan Rencana Rehabilitasi	Dokumen	674,616,043	104,200,214	15.45%

No	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
		Dan Rekontruksi Pascabencana (R3p) Kab/kota				

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2024 diolah 2025

2.7.10 Urusan Pemerintah Bidang Sosial

Program dan kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Pada Urusan Bidang sosial , Kawasan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.40
Program dan Kegiatan Bidang Sosial Tahun 2024

No	PRO GRA M	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. MAMUJU TENGAH				-	0	0.00%
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				143,191,382	142,106,380	99.24%
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			143,191,382	142,106,380	99.24%
		1	Penyediaan permakanan	Orang	-	0	0%
		2	Penyediaan sandang	Orang	-	0	0%
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	-	0	0%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	-	0	0%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	-	0	0%
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	-	0	0%
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	-	0	0%

No	PRO GRA M	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	-	0	0%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	101,686,830	100,614,611	98.95%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	41,504,552	41,491,769	99.97%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	-	0	0%
		12	Pemberian layanan rujukan	Doku men	-	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					-	0	0.00%
JUMLAH PROGRAM					143,191,382	142,106,380	99.97%
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				73,267,700	73,082,000	99.75%
		1	Penyediaan makanan	Orang	8,351,700	8,320,800	99.63%
		2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0.00%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0.00%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0.00%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	64,916,000	64,761,200	99.76%
JUMLAH INDIKATOR					73,267,700	73,082,000	99.76%
JUMLAH PROGRAM					73,267,700	73,082,000	99.75%
KEGIATAN LAINNYA							
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

Sumber : SPM Bangda Kemendagri 2025

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan laporan tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal tersebut menyatakan bahwa Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan tersebut diatur secara teknis oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 yang mencakup penyelenggaraan urusan konkuren, urusan tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Dari pelaksanaan urusan tersebut, dapat dilihat hasil capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2024 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. Selain LPPD ini, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah kepada Gubernur Sulawesi Barat dan secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah berhasil mencapai sejumlah prestasi yang patut diapresiasi semua pihak, baik itu dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun masyarakat turut andil dalam memperoleh pencapaian tersebut. Melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terlihat jelas adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan kinerja yang optimal di masa depan. Meski demikian, masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki guna memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam hal ini, LPPD dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam mengevaluasi kinerja yang telah dicapai dan melakukan perbaikan untuk mencapai tujuan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini, semoga di tahun-tahun mendatang keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.



LPPD 2024